



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Perekonomian

Provinsi Maluku

Agustus 2026





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI MALUKU

AGUSTUS 2026

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI MALUKU

VISI BANK INDONESIA

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

MISI BANK INDONESIA

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Kami sangat mengharapkan komentar, saran dan kritik demi perbaikan buku ini

Alamat Redaksi :

Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Maluku
Jl. Ahmad Yani Nomor 9
Ambon, 97124

Telp : 0911-352762-63 ext. 8350
Fax : 0911-356517

e-mail : rakhmat_p@bi.go.id
ivan_firmanda@bi.go.id
mabiyu_adikara@bi.go.id

Homepage : www.bi.go.id



KATA PENGANTAR

Buku Laporan Perekonomian Provinsi Maluku merupakan kajian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku yang disusun untuk menyajikan berbagai data dan informasi mengenai perekonomian daerah Provinsi Maluku kepada seluruh mitra kerja. Informasi yang terkandung dalam buku ini dapat dimanfaatkan oleh para mitra kerja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dalam upaya memperkuat kinerja perekonomian Provinsi Maluku mendatang. Buku ini memuat asesmen perkembangan ekonomi Provinsi Maluku terkini yang meliputi ekonomi makro, inflasi, stabilitas keuangan daerah, pengembangan akses keuangan dan UMKM, sistem pembayaran tunai dan nontunai, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta prospek perekonomian daerah.

Kinerja perekonomian Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), peningkatan kinerja terutama ditopang oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) sejalan dengan peningkatan produksi pertanian dan perikanan, LU Administrasi Pemerintahan yang didukung akselerasi belanja pemerintah, serta LU Perdagangan dan Reparasi yang tetap solid seiring terjaganya permintaan domestik. Dari sisi pengeluaran, penguatan ekonomi ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga seiring tingginya aktivitas sosial-keagamaan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi yang didukung akselerasi belanja modal dan investasi swasta, serta Konsumsi Pemerintah sejalan dengan peningkatan aktivitas belanja pemerintah.

Prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada Tahun 2026 diperkirakan meningkat, didukung oleh tetap kuatnya Konsumsi Rumah

Tangga seiring terjaganya daya beli masyarakat serta kontribusi Konsumsi Pemerintah melalui realisasi belanja prioritas nasional. Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan terutama ditopang oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sejalan dengan implementasi program swasembada pangan, peningkatan produksi perikanan, serta investasi swasta dan pemerintah. Selain itu, LU Perdagangan dan Reparasi diperkirakan tumbuh positif didukung meningkatnya aktivitas distribusi barang, terjaganya stabilitas inflasi, dan membaiknya daya beli masyarakat.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku, Perbankan, responden survei, akademisi, dan berbagai pihak terutama masyarakat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Dalam rangka meningkatkan kualitas buku ini, saran dan masukan sangat diharapkan untuk memaksimalkan dampak dan manfaat yang lebih besar, khususnya bagi masyarakat Provinsi Maluku. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini dan semoga Tuhan memberikan berkah-Nya kepada kita semua dalam mengupayakan kinerja yang lebih baik.

Ambon, Agustus 2026

ttd.

Surya Alamsyah

Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Maluku



DAFTAR ISI

III	KATA PENGANTAR
IV	DAFTAR ISI
VI	DAFTAR TABEL
VIII	DAFTAR GRAFIK
XI	RINGKASAN EKSEKUTIF
XII	TABEL INDIKATOR EKONOMI

1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

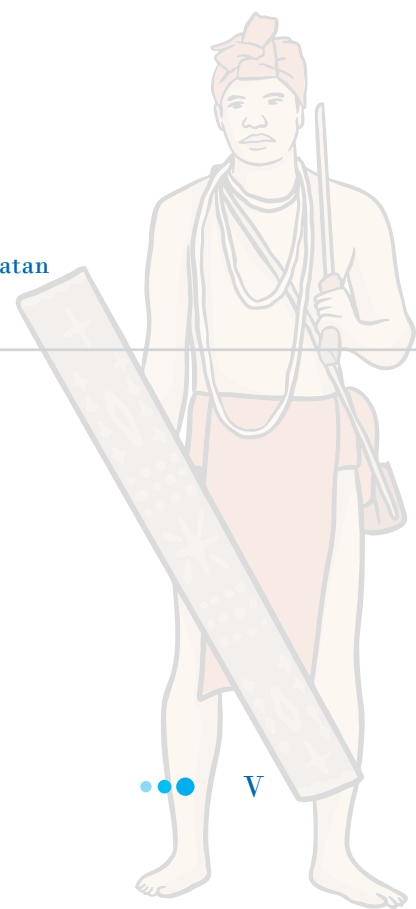
01

02	1.1. Gambaran Umum Perkembangan Ekonomi Makro Provinsi Maluku
03	1.2. Perkembangan PDRB Sisi Pengeluaran
05	1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga (RT)
06	1.2.2. Konsumsi Pemerintah
07	1.2.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
08	1.2.4. Ekspor dan Impor Luar Negeri dan Dalam Negeri
11	1.3. Perkembangan PDRB Sisi Lapangan Usaha
11	1.3.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP)
12	1.3.2. Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib
13	1.3.3. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
14	1.3.4. Transportasi dan Pergudangan
14	1.3.5. Konstruksi



- 18 2.1. Gambaran Umum Perkembangan Inflasi
- 20 2.2. Perkembangan Realisasi IHK di Provinsi Maluku
 - 20 2.2.1. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
 - 20 2.2.2. Kelompok Penyumbang Inflasi
- 22 2.3. Perkembangan Inflasi Spasial Provinsi Maluku
 - 22 2.3.1. Inflasi Kota Ambon
 - 24 2.3.2. Inflasi Kota Tual
 - 25 2.3.3. Inflasi Kabupaten Maluku Tengah
- 26 2.4. *Tracking Realisasi IHK Provinsi Maluku Triwulan III 2026*
 - 27 2.4.1. *Tracking* Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau
 - 28 2.4.2. *Tracking* Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
 - 28 2.4.3. *Tracking* Inflasi Kelompok Transportasi
- 29 2.5. Kegiatan Pengendalian Inflasi di Provinsi Maluku

- 32 3.1. Gambaran Umum
- 33 3.2. Perkembangan Stabilitas Keuangan Daerah
 - 33 3.2.1. Perkembangan Penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga
 - 35 3.2.2. Perkembangan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Syariah
 - 37 3.2.3. Asesmen Stabilitas Keuangan Rumah Tangga
 - 39 3.2.4. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pemerintah Daerah
- 40 3.3. Perkembangan Penyaluran kredit UMKM
- 41 Boks 1: Penguatan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Kegiatan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia Tahun 2026



- 46 4.1 Perkembangan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
- 46 4.1.1. Perputaran Uang Tunai
- 46 4.1.2. Pelayanan Perkasan & Edukasi Rupiah)
- 47 4.2 Perkembangan Sistem Pembayaran Non-Tunai
- 47 4.2.1 Transaksi *Real-Time Gross Settlement* (RTGS)
- 48 4.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Maluku
- 48 4.2.3 Transaksi BI-FAST di Provinsi Maluku
- 49 4.2.4 Transaksi QRIS di Provinsi Maluku
- 52 4.2.5 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)
- 53 4.2.6 Transaksi Alat Pembayaran Uang Elektronik (UE)
- 54 4.2.7 Edukasi Masyarakat dan Kegiatan Lainnya
- 56 Boks 2: QRIS JELAJAH INDONESIA 2026: Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan QRIS

- 62 5.1 Perkembangan Ketenagakerjaan
- 62 5.1.1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja
- 62 5.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- 63 5.1.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
- 63 5.1.4. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
- 64 5.1.5. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
- 65 5.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka
- 65 5.2 Perkembangan Kesejahteraan Daerah
- 66 5.2.1. Jumlah Penduduk Miskin
- 67 5.2.2. Tingkat Ketimpangan (*Gini Ratio*)
- 67 5.2.3. Nilai Tukar Petani (NTP)
- 68 5.3. Pembangunan Manusia

- 70 6.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi
- 71 6.2 Prospek Inflasi

DAFTAR ISTILAH

TIM PENYUSUN LAPORAN

DAFTAR TABEL



BAB 1 • Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Tabel 1.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Sisi Pengeluaran	4
Tabel 1.2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Sisi Penawaran (ADHK 2010)	10

BAB 2 • Perkembangan Inflasi Daerah

Tabel 2.1.	Inflasi Gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku	18
Tabel 2.2.	Prakiraan Curah Hujan Maluku Triwulan II 2026	21
Tabel 2.3.	Perkembangan Inflasi Kota Ambon, Kab. Malteng, Kota Tual, Gabungan Kota di Provinsi Maluku, dan Nasional	22
Tabel 2.4.	Kegiatan TPID Provinsi Maluku Hingga Triwulan II 2026	29

BAB 4 • Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

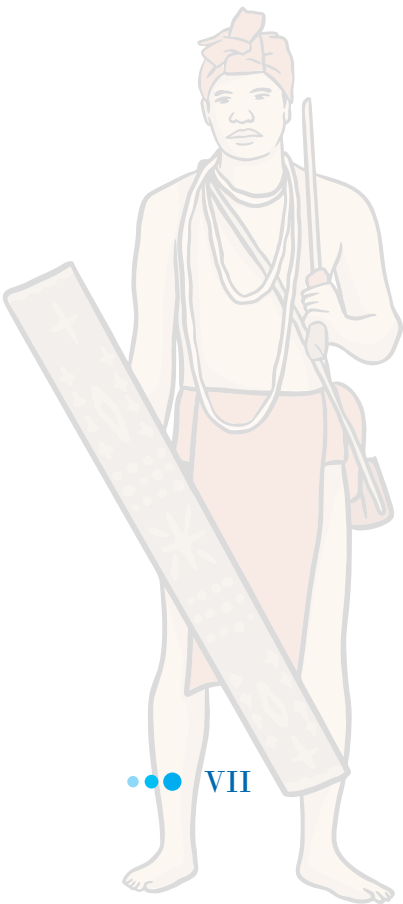
Tabel 4.1.	Data Spasial Pangsa Volume Transaksi QRIS di Provinsi Maluku	50
Tabel 4.2.	Data Spasial Pangsa Merchant QRIS di Provinsi Maluku	52

BAB 5 • Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tabel 5.1.	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku	63
Tabel 5.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Karakteristik	65
Tabel 5.3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Dimensi Penyusunnya	68

BAB 6 • Prospek Perekonomian Daerah

Tabel 6.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global	70
------------	-------------------------------------	----





DAFTAR GRAFIK

BAB 1 • Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Grafik 1.1	Perkembangan PDRB Riil Provinsi Maluku	2
Grafik 1.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Maluku & Nasional	2
Grafik 1.3	Kredit Konsumsi di Provinsi Maluku	5
Grafik 1.4	Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Maluku	5
Grafik 1.5	Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Maluku	5
Grafik 1.6	Konsumsi Pemerintah Provinsi Maluku	5
Grafik 1.7	Realisasi Total Belanja APBN di Provinsi Maluku	6
Grafik 1.8	Realisasi Total Belanja APBD Wilayah Maluku	6
Grafik 1.9	Realisasi Belanja Pegawai dan Barang dan Jasa APBN di Provinsi Maluku	6
Grafik 1.10	Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Maluku	7
Grafik 1.11	Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) di Provinsi Maluku	7
Grafik 1.12	Kredit Investasi di Provinsi Maluku	7
Grafik 1.13	Realisasi dan Ekspektasi Investasi SKDU Provinsi Maluku	7
Grafik 1.14	Realisasi Belanja Modal APBN Provinsi Maluku	8
Grafik 1.15	Ekspor Luar Negeri Provinsi Maluku	8
Grafik 1.16	Komoditas Ekspor Luar Negeri Provinsi Maluku	9
Grafik 1.17	Ekspor Komoditas Asal Maluku melalui Pelabuhan Luar Maluku	9
Grafik 1.18	PDRB LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi Maluku	12
Grafik 1.19	Kredit LU Pertanian dan Perikanan di Provinsi Maluku	12
Grafik 1.20	Produksi Padi (GKG) di Provinsi Maluku	12
Grafik 1.21	Nilai Tukar Petani di Provinsi Maluku	12
Grafik 1.22	PDRB LU Administrasi Pemerintah	13
Grafik 1.23	PDRB LU Perdagangan Besar dan Eceran	14

Grafik 1.24	SKDU Kegiatan Usaha Perdagangan	14
Grafik 1.25	Arus Bongkar Muat Pelabuhan Yos Sudarso	14
Grafik 1.26	PDRB LU Transportasi & Pergudangan Provinsi Maluku	14
Grafik 1.27	Arus Penumpang Pelabuhan di Provinsi Maluku	15
Grafik 1.28	PDRB LU Konstruksi Provinsi Maluku	15
Grafik 1.29	Kredit LU Konstruksi di Provinsi Maluku	15

BAB 2 • Perkembangan Inflasi Daerah

Grafik 2.1	Perbandingan Inflasi Pada Gabungan Kota di Maluku dan Nasional	18
Grafik 2.2	Inflasi Gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku	19
Grafik 2.3	Inflasi Kelompok Transportasi Provinsi Maluku	20
Grafik 2.4	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Provinsi Maluku	21
Grafik 2.5	Inflasi Kelompok Peralatan Pribadi dan Jasa Lainnya Provinsi Maluku	21
Grafik 2.6	Disagregasi Inflasi Kota Ambon	23
Grafik 2.7	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau Kota Ambon	23
Grafik 2.8	Inflasi Kelompok Transportasi Kota Ambon	23
Grafik 2.9	Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Kota Ambon	23
Grafik 2.10	Disagregasi Inflasi Kota Tual	24
Grafik 2.11	Inflasi Komponen Makanan, Minuman & Tembakau Kota Tual	24
Grafik 2.12	Inflasi Komponen Transportasi Kota Tual	24
Grafik 2.13	Inflasi Komponen Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Kota Tual	24
Grafik 2.14	Disagregasi Inflasi Kab. Maluku Tengah	25
Grafik 2.15	Inflasi Komponen Makanan, Minuman & Tembakau Kab. Maluku Tengah	25
Grafik 2.16	Inflasi Komponen Transportasi Kab. Maluku Tengah	26

DAFTAR GRAFIK



Grafik 2.17	Inflasi Komponen Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Kab. Maluku Tengah	26
Grafik 2.18	Perkembangan Survei Konsumen	26
Grafik 2.19	Rata-Rata Tinggi Gelombang Provinsi Maluku 5 Tahun Sebelumnya	28

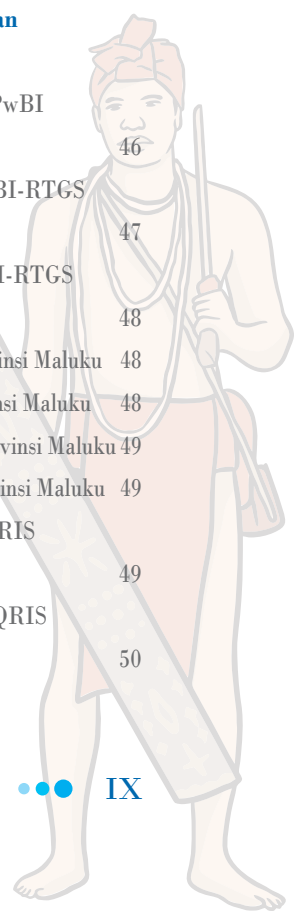
BAB 3 • Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Grafik 3.1	Perkembangan Kredit Maluku dan Nasional	32
Grafik 3.2	Perkembangan Kredit Maluku Berdasarkan Penggunaannya	32
Grafik 3.3	Perkembangan Kredit Sektoral Maluku	32
Grafik 3.4	Share Kredit Berdasarkan Sektor	32
Grafik 3.5	Perkembangan NPL Berdasarkan Sektor	33
Grafik 3.6	Pertumbuhan Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Maluku	34
Grafik 3.7	Pangsa Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Maluku	34
Grafik 3.8	Perkembangan DPK Maluku dan Nasional	35
Grafik 3.9	Pangsa DPK Maluku Berdasarkan Sumbernya	35
Grafik 3.10	Perkembangan DPK Maluku Berdasarkan Sumber	35
Grafik 3.11	Pangsa DPK Maluku Berdasarkan Golongan Nasabah	35
Grafik 3.12	Perkembangan DPK Perseorangan Maluku	35
Grafik 3.13	Perkembangan Pembiayaan Syariah Maluku	36
Grafik 3.14	Perkembangan Pangsa Pembiayaan Syariah Maluku	36
Grafik 3.15	Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan	36
Grafik 3.16	Perkembangan NPF Maluku Berdasarkan Penggunaannya	36
Grafik 3.17	Perkembangan DPK Syariah Maluku	37
Grafik 3.18	Perkembangan DPK Syariah Maluku	37
Grafik 3.19	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Maluku	37

Grafik 3.20	NPL Kredit Rumah Tangga Maluku	38
Grafik 3.21	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Maluku Berdasarkan Jenis Penggunaannya	38
Grafik 3.22	NPL Kredit Rumah Tangga Maluku Berdasarkan Jenis Penggunaannya	38
Grafik 3.23	Perkembangan DPK Rumah Tangga/ Perseorangan Maluku	38
Grafik 3.24	Perkembangan Komponen DPK Rumah Tangga Maluku	39
Grafik 3.25	Pangsa DPK Rumah Tangga Maluku	39
Grafik 3.26	Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Maluku	39
Grafik 3.27	Pangsa DPK Pemerintah Daerah Maluku Berdasarkan Komponennya	39
Grafik 3.28	Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Maluku Berdasarkan Komponennya	40
Grafik 3.29	Perkembangan Kredit dan NPL UMKM Maluku	40
Grafik 3.30	Perkembangan Kredit UMKM Maluku berdasarkan Jenis Penggunaan	40

BAB 4 • Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

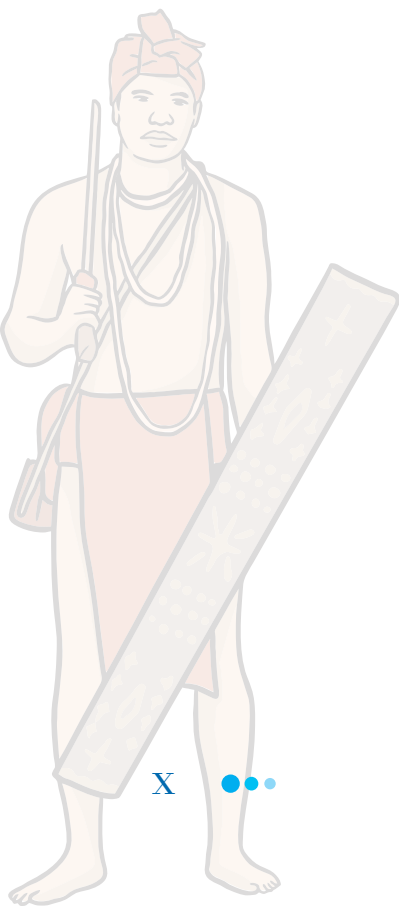
Grafik 4.1	Rekapitulasi Kegiatan Perkasan KPwBI Provinsi Maluku	46
Grafik 4.2	Perkembangan Nominal Transaksi BI-RTGS Provinsi Maluku	47
Grafik 4.3	Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS Provinsi Maluku	48
Grafik 4.4	Perkembangan Nominal SKNBI Provinsi Maluku	48
Grafik 4.5	Perkembangan Volume SKNBI Provinsi Maluku	48
Grafik 4.6	Perkembangan Nominal BI-FAST Provinsi Maluku	49
Grafik 4.7	Perkembangan Volume BI-FAST Provinsi Maluku	49
Grafik 4.8	Perkembangan Volume Transaksi QRIS Provinsi Maluku	49
Grafik 4.9	Perkembangan Nominal Transaksi QRIS Provinsi Maluku	50





DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.10	Perkembangan Total User QRIS Provinsi Maluku	51	BAB 5 • Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan		
Grafik 4.11	Perkembangan New User QRIS Provinsi Maluku	51	Grafik 5.1	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku	62
Grafik 4.12	Perkembangan Total Merchant QRIS Provinsi Maluku	51	Grafik 5.2	Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	63
Grafik 4.13	Perkembangan New Merchant QRIS Provinsi Maluku	51	Grafik 5.3	Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Tamatan Tingkat Pendidikan	64
Grafik 4.14	Perkembangan Nom. Transaksi KATMD Provinsi Maluku	52	Grafik 5.4	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	64
Grafik 4.15	Perkembangan Vol. Transaksi KAMTD Provinsi Maluku	52	Grafik 5.5	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Maluku	65
Grafik 4.16	Perkembangan Nom. Transaksi KK Provinsi Maluku	53	Grafik 5.6	Perkembangan Penduduk Miskin Maluku	66
Grafik 4.17	Perkembangan Vol. Transaksi KK Provinsi Maluku	53	Grafik 5.7	Garis Kemiskinan Penduduk Maluku	66
Grafik 4.18	Perkembangan Nom. Transaksi UE Provinsi Maluku	54	Grafik 5.8	Perbandingan Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan di Maluku	67
Grafik 4.19	Perkembangan Vol. Transaksi UE Provinsi Maluku	54	Grafik 5.9	Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan	67



TABEL INDIKATOR

Indikator	2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
Ekonomi Makro Regional												
Produk Domestik Bruto ADHK Tahun Dasar 2010 (% yoy)	5,45	3,13	6,24	6,53	5,34	5,07	3,39	4,31	5,44	4,56	5,16	5,31
Berdasarkan Lapangan Usaha												
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,95	0,95	4,40	3,24	3,39	4,63	6,85	7,94	6,23	6,42	6,85	5,11
2 Pertambangan dan Penggalian	1,72	9,95	-2,30	-10,64	-0,33	-6,84	-15,08	9,37	20,49	1,07	-6,31	-15,68
3 Industri Pengolahan	6,43	-12,90	11,63	11,64	4,00	2,69	6,25	3,43	9,11	5,35	-2,70	10,67
4 Pengadaan Listrik, Gas	6,20	1,00	1,03	0,24	2,08	0,22	0,77	1,99	13,39	4,09	-1,83	16,70
5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	2,52	2,89	2,11	0,23	1,92	1,64	0,89	-0,03	0,87	0,84	-0,62	0,86
6 Konstruksi	1,29	8,14	3,04	6,95	4,88	1,14	4,98	5,46	3,95	3,94	5,66	7,15
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,88	8,27	9,53	8,93	8,44	8,01	4,99	5,23	9,06	6,82	8,26	6,95
8 Transportasi dan Pergudangan	5,39	7,42	7,84	7,09	6,96	8,16	5,31	4,35	5,71	5,84	6,48	0,26
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,95	5,76	3,49	4,50	4,42	0,19	1,26	4,31	7,40	3,36	18,89	15,92
10 Informasi dan Komunikasi	5,40	5,50	3,10	3,79	4,43	3,76	5,29	5,22	5,06	4,84	5,48	3,31
11 Jasa Keuangan	5,67	2,37	3,99	2,82	3,70	3,63	1,92	8,49	15,40	7,38	9,02	-0,02
12 Real Estate	1,78	5,40	5,39	4,43	4,25	4,17	0,52	3,47	4,25	3,09	4,31	4,33
13 Jasa Perusahaan	5,22	5,48	3,57	4,66	4,72	2,66	2,79	6,75	5,45	4,44	8,43	6,22
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,34	1,81	7,41	9,91	6,53	7,69	-0,01	-1,02	0,07	1,57	3,07	5,76
15 Jasa Pendidikan	2,54	4,76	5,94	7,79	5,27	5,62	-0,02	-0,36	-0,16	1,20	1,61	6,73
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,17	9,92	7,54	5,17	7,67	1,87	0,60	5,04	1,73	2,29	5,94	4,08
17 Jasa lainnya	5,38	6,08	4,75	7,75	6,02	2,53	5,05	5,22	3,51	4,07	5,88	3,05
Berdasarkan Permintaan												
1 Konsumsi Rumah Tangga	4,60	3,82	3,54	4,12	4,02	3,41	3,45	3,35	4,11	3,58	6,56	6,62
2 Konsumsi LNPRT	20,30	9,72	11,10	12,61	13,37	4,36	9,61	4,82	1,41	4,95	4,56	8,33
3 Konsumsi Pemerintah	9,70	3,86	0,74	2,40	3,51	15,01	-9,95	0,32	-17,82	2,32	3,32	2,26
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	1,88	2,86	0,68	2,72	2,03	1,77	0,45	0,79	0,75	0,92	4,82	6,17
5 Perubahan Inventori	0,26	0,72	3,08	0,97	1,25	0,33	-3,48	0,80	3,69	0,31	-0,59	-0,17
6 Ekspor Luar Negeri	-19,44	-33,94	-31,68	24,98	-17,16	-20,24	-29,48	21,35	22,35	23,35	24,35	1,57
7 Impor Luar Negeri	115,09	123,82	118,41	-8,44	68,28	-12,14	-20,27	-39,72	20,76	-15,41	52,13	109,29
8 Net Ekspor/Impor Antar Provinsi	-73,86	-44,84	-88,43	-2,77	-44,57	54,47	-14,10	218,92	-64,97	-29,23	-124,46	-127,02
Indeks Harga Konsumen												
1 Kota Ambon	105,29	109,10	106,99	107,20		108,31	110,87	110,17	111,73		111,76	115,06
2 Kota Tual	106,58	109,34	107,31	106,50		106,81	111,36	110,48	110,69		112,89	115,85
3 Kab. Malteng	101,96	105,57	105,57	106,73		107,13	108,00	108,83	109,46		110,81	112,10
4 Provinsi Maluku	104,10	107,78	106,47	106,99		107,79	109,81	109,68	110,82		111,46	113,98
Inflasi Tahunan (% yoy)												
1 Kota Ambon	2,80	4,49	2,66	-0,40		2,87	1,62	2,97	4,23		3,19	3,78
2 Kota Tual	2,59	3,38	0,59	0,16		0,22	1,85	2,95	3,93		5,69	4,03
3 Kab. Malteng	2,71	2,35	0,63	0,45		5,07	2,31	3,09	2,56		3,44	3,80
4 Provinsi Maluku	2,75	3,63	1,79	1,27		3,54	1,88	3,01	3,58		3,40	3,80
Perbankan												
Dana Pihak Ketiga (% yoy)												
1 Giro	-0,36	-1,61	-18,32	-22,82		-13,65	-8,02	30,46	17,28		-1,04	-1,91
2 Tabungan	3,87	1,54	3,18	5,30		6,79	5,77	8,53	5,51		7,22	7,56
3 Deposito	7,99	3,88	1,69	-3,53		-2,68	0,03	17,26	3,25		3,33	0,53
4 Provinsi Maluku	4,16	1,59	-1,02	-0,58		1,18	2,21	13,94	6,16		5,17	4,54
Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (% yoy)												
1 Modal Kerja	7,03	9,85	6,57	5,48		3,48	1,99	8,84	1,72		2,53	2,71
2 Investasi	-5,60	-7,18	-53,70	-64,22		-60,79	-59,97	-23,05	7,13		8,05	13,32
3 Konsumsi	5,63	6,21	7,99	10,26		11,36	11,19	12,43	13,01		13,96	15,73
4 Provinsi Maluku	3,69	4,51	-5,45	-6,57		-4,93	-4,56	7,55	8,66		9,61	10,70

RINGKASAN EKSEKUTIF

PROVINSI MALUKU • AGUSTUS 2026

Asesmen Perkembangan Ekonomi Makro

Perekonomian Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,31% (yoy).

Perekonomian Provinsi Maluku Triwulan II 2026 menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Perekonomian Provinsi Maluku tumbuh 5,31% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 sebesar 5,16% (yoy) dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29% (yoy). Perkembangan tersebut mencerminkan terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi Maluku yang tetap positif dan resilien. Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Maluku tercatat sebesar Rp17,68 triliun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp9,98 triliun. Secara kuartalan, perekonomian Maluku pada Triwulan II 2026 tumbuh sebesar 1,11% (qtq), berada di atas capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -3,26%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kinerja positif komponen Konsumsi RT, PMTB, dan Konsumsi Pemerintah.

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 didorong oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT), PMTB/Investasi, dan Konsumsi Pemerintah. Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga didukung oleh tingginya aktivitas konsumsi masyarakat seiring berbagai momentum sosial dan keagamaan, antara lain rangkaian Hari Raya Paskah, Tradisi Pawai Obor, dan pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Maluku 2026, serta berbagai tingginya aktivitas masyarakat selama penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Kondisi tersebut sejalan dengan tetap terjaganya optimisme masyarakat berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, dengan indikator IKK dan IEK berada pada level optimis. Sementara itu, penguatan PMTB/Investasi didukung oleh akselerasi realisasi belanja modal pemerintah serta peningkatan investasi swasta, sedangkan Konsumsi Pemerintah tumbuh meningkat sejalan dengan akselerasi belanja pegawai dan belanja barang pemerintah pada periode laporan.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Maluku didukung oleh kinerja positif LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, LU Administrasi pemerintah, dan LU Perdagangan dan Reparasi.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 terutama ditopang oleh kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP), LU Administrasi Pemerintahan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Perdagangan dan Reparasi). Kinerja LU PKP tetap tumbuh solid didukung oleh peningkatan produksi padi dan luas panen sejalan dengan berlanjutnya program swasembada pangan, serta tetap positifnya produksi perikanan. Sementara itu, LU Administrasi Pemerintahan tumbuh meningkat didukung oleh akselerasi realisasi belanja pemerintah pusat, terutama belanja pegawai dan belanja barang, serta tetap positifnya realisasi belanja pemerintah daerah. Di sisi lain, LU Perdagangan dan Reparasi tetap tumbuh solid sejalan dengan terjaganya permintaan domestik dan meningkatnya

aktivitas distribusi barang, serta didukung oleh berbagai momentum sosial dan keagamaan,

Asesmen Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,80% (yoy) dipengaruhi dominasi volatile food serta sensitivitas distribusi wilayah kepulauan.

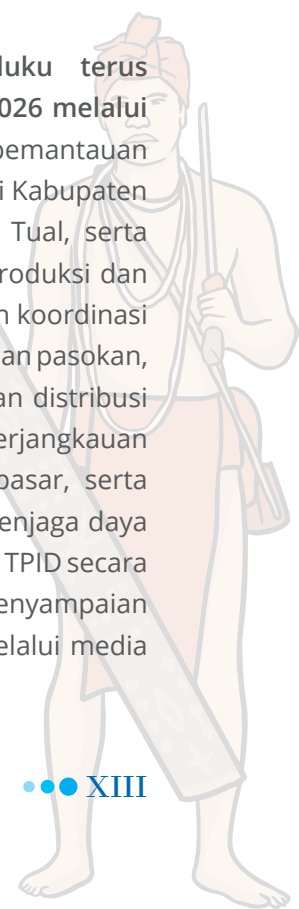
Capaian Inflasi Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan lalu yang sebesar 3,40% (yoy). Dalam lingkup kawasan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), sebagian besar provinsi mengalami peningkatan inflasi pada Triwulan II 2026. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketergantungan sebagian besar provinsi di wilayah Sulampua terhadap pasokan dari luar wilayah, sehingga tekanan inflasi volatile food menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan inflasi pada periode laporan.

Realisasi inflasi di Maluku didorong oleh Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Transportasi.

Realisasi inflasi pada triwulan laporan utamanya disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Transportasi. Peningkatan harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau utamanya disebabkan oleh peningkatan harga komoditas hortikultura dan ikan pelagis yang dipengaruhi oleh peningkatan tinggi gelombang laut dan curah hujan, sehingga mengurangi aktivitas penangkapan serta menekan pasokan ikan tangkap di pasar di tengah terbatasnya pasokan hortikultura dari dalam Maluku seiring berakhirnya momen puncak panen. Sementara itu, peningkatan harga pada kelompok transportasi utamanya disebabkan oleh penyesuaian kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-subsidi serta peningkatan harga tiket pesawat sejalan dengan masih diberlakukannya kebijakan penyesuaian besaran biaya tambahan (*surcharge*) pada tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara dalam negeri di tengah tren peningkatan permintaan perjalanan pada momen libur sekolah.

TPID Provinsi Maluku terus bersinergi dalam menjalankan program pengendalian inflasi di Provinsi Maluku.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi pada Triwulan II 2026 melalui strategi 4K. Pada aspek ketersediaan pasokan, dilakukan pemantauan stok pangan di seluruh Kabupaten/Kota, panen perdana padi di Kabupaten Maluku Barat Daya, penyerahan benih hortikultura di Kota Tual, serta program percepatan tanam dan hilirisasi untuk mendorong produksi dan nilai tambah petani. Pada aspek kelancaran distribusi, dilakukan koordinasi dengan BUMN, BUMD, dan distributor untuk pengamanan stok dan pasokan, serta kerja sama dengan PT ASDP guna mendukung kelancaran distribusi bahan pangan antarwilayah. Sementara itu, pada aspek keterjangkauan harga, dilaksanakan Gerakan Pasar Murah (GPM), operasi pasar, serta pemantauan harga dan stok bersama Satgas Pangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Dari sisi komunikasi efektif, TPID secara berkala melaksanakan rapat koordinasi serta memperkuat penyampaian informasi perkembangan harga dan imbauan belanja bijak melalui media cetak, *billboard*, dan media sosial.



Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Maluku hingga Triwulan II 2026 tetap terjaga.

Penyaluran kredit masih tumbuh positif dengan risiko kredit yang masih berada pada level baik.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh positif.

Arus kas uang kartal pada Triwulan II 2026 menunjukkan net-inflow.

Perkembangan Sistem Pembayaran Nontunai di Provinsi Maluku terus tumbuh positif, khususnya pembayaran melalui kanal QRIS.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan di Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 tetap tumbuh kuat tercermin dari pertumbuhan penyaluran kredit yang positif. Penyaluran kredit selama triwulan laporan tumbuh sebesar 10,70% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,61% (yoy). Penyaluran kredit yang membaik didorong oleh pertumbuhan kinerja Kredit Konsumsi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Maluku yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Penyaluran kredit di Provinsi Maluku terus membaik sejalan dengan peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi utama diikuti dengan risiko kredit yang terjaga baik. Pada Triwulan II 2026, tingkat risiko kredit Maluku masih berada di level yang relatif baik dengan *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 4,09%, meskipun cenderung meningkat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 3,25%, namun berada di bawah *threshold* sebesar 5%. Risiko kredit pada sektor ekonomi utama di Maluku seperti Sektor Pertanian juga terjaga relatif baik. Meskipun demikian, terdapat sektor lain yang memiliki NPL relatif tinggi, yaitu Sektor Konstruksi dan Sektor Industri Pengolahan.

Kapasitas pendanaan perbankan di Maluku didukung oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh positif sebesar 4,54% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,17% (yoy). Berdasarkan pangsaanya, DPK di Provinsi Maluku didominasi oleh Tabungan dengan pangsa mencapai 63,66% dari total penghimpunan dana.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kegiatan perkasan tunai di Provinsi Maluku selama Triwulan II 2026 mengalami *net-inflow* sebesar Rp62 miliar, didorong oleh tingginya *inflow* Uang Pecahan Besar pada April 2026 yang sejalan dengan normalisasi kebutuhan uang kartal setelah HBKN Ramadhan.

Perkembangan Sistem Pembayaran Nontunai di Provinsi Maluku tumbuh positif, khususnya pembayaran melalui kanal QRIS. Nominal transaksi QRIS selama Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp460,20 miliar atau tumbuh sebesar 90,42% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 119,79% (yoy). Sementara itu, volume transaksi QRIS mencapai 4,23 juta transaksi atau tumbuh sebesar 133,37% (yoy), namun melambat dibandingkan 144,10% (yoy) pada triwulan lalu. Pertumbuhan transaksi QRIS sejalan dengan upaya KPwBI Provinsi Maluku untuk menggalakkan digitalisasi melalui berbagai kegiatan di Triwulan II 2026, antara lain melalui kegiatan Salam Fest x Moluccas Digifest 2026 serta edukasi dan sosialisasi pembayaran nontunai dan perlindungan konsumen melalui program LEKAS (Layanan Edukasi Keliling dan Akuisisi QRIS) di berbagai wilayah.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Maluku mengalami perbaikan sejalan dengan peningkatan TPAK dan Penurunan TPT.

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Maluku pada periode laporan menunjukkan perbaikan yang tercermin dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Maluku pada Februari 2026 tercatat sebesar 67,84%, lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebesar 67,56%. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,80%, menurun dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebesar 5,95%.

Peningkatan TPAK mengindikasikan peningkatan partisipasi dari penduduk usia kerja yang aktif dalam bekerja. Selain itu, kondisi peningkatan TPAK juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah PUK beriringan dengan peningkatan serapan tenaga kerja.

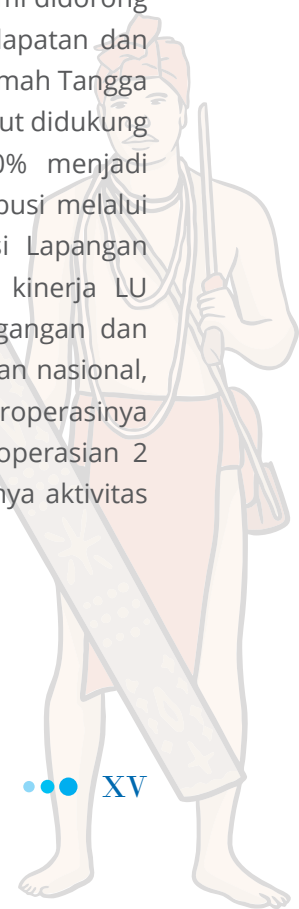
Tingkat kesejahteraan masyarakat tumbuh positif tercermin dari terjaganya kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan penurunan persentase penduduk miskin.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku tumbuh positif, tercermin dari kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang relatif terjaga dan penurunan persentase jumlah penduduk miskin kota maupun desa di Maluku pada Maret 2026. Tingkat pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga pada Triwulan I 2026 tercatat tumbuh positif sebesar 6,56% (yoy). Sementara itu, indikator angka kemiskinan pada Triwulan I 2026 mengalami perbaikan yang tercermin dari persentase jumlah penduduk miskin kota maupun desa di Provinsi Maluku yang tercatat menurun dari 15,38% pada Maret 2025 menjadi 14,91% pada Maret 2026.

Prospek Ekonomi dan Inflasi

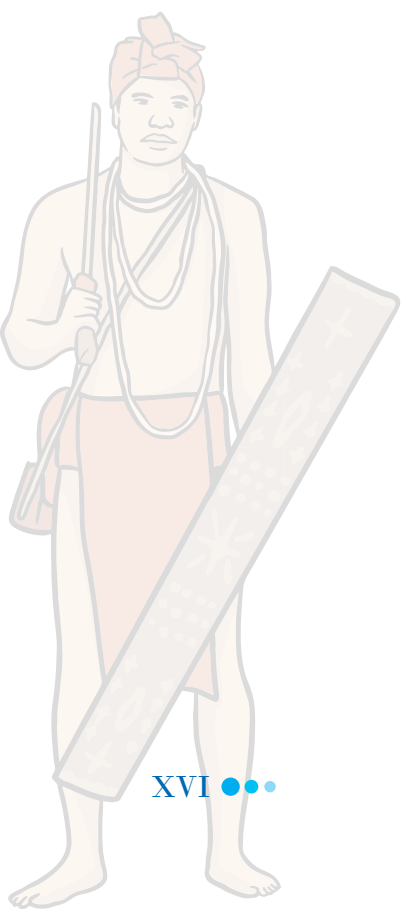
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada Tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2026 diperkirakan pada kisaran 4,98 – 5,38% (yoy). Dari sisi permintaan, kinerja ekonomi didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat seiring perbaikan pendapatan dan inflasi yang tetap terkendali, sehingga menopang Konsumsi Rumah Tangga sebagai komponen terbesar PDRB Maluku. Kondisi tersebut turut didukung oleh peningkatan UMP Maluku Tahun 2026 sebesar 6,10% menjadi Rp3.334.490. Selain itu, Konsumsi Pemerintah juga berkontribusi melalui realisasi belanja pada berbagai program prioritas. Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi diperkirakan ditopang oleh kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) serta LU Perdagangan dan Reparasi, didukung implementasi program swasembada pangan nasional, peningkatan kapasitas produksi subsektor perikanan seiring beroperasinya 2 (dua) Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru dan rencana pengoperasian 2 (dua) UPI tambahan pada Semester II 2026, serta meningkatnya aktivitas distribusi barang dan stabilitas inflasi.



*Inflasi Provinsi Maluku
Tahun 2026 diperkirakan
berada di rentang sasaran
inflasi nasional.*

Selanjutnya, inflasi Provinsi Maluku di Tahun 2026 diperkirakan tetap dalam rentang sasaran nasional sebesar $2,5\pm 1\%$ (yoy). Optimisme tersebut dilandasi beberapa faktor, seperti kebijakan moneter yang bersifat *forward looking* dan *pre-emptive*, sinergitas dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pelaksanaan GPIPS yang akan lebih intensif untuk pengendalian inflasi, dan penguatan bauran kebijakan moneter guna memitigasi risiko tekanan inflasi termasuk dari kenaikan *imported inflation* serta kenaikan harga energi dan pangan global.



An aerial photograph of a tropical coastline. The top half of the image shows a dense, lush green forest covering a rocky, elevated landmass. The bottom half shows a clear, turquoise body of water with a sandy beach area. A wooden pier extends from the shore into the water, with two small boats moored nearby. The water is shallow, revealing a sandy bottom and some coral reefs.

BAB 1

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

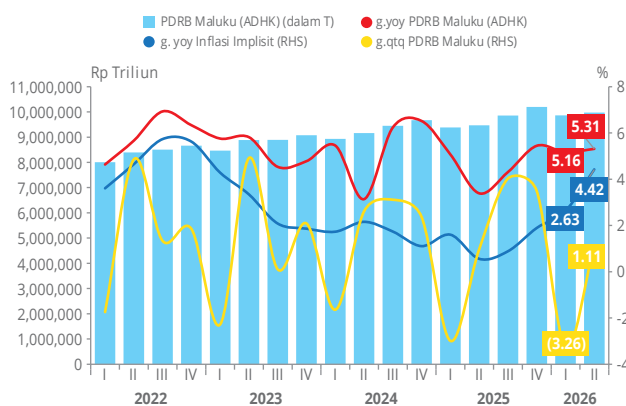
1.1. GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI MALUKU

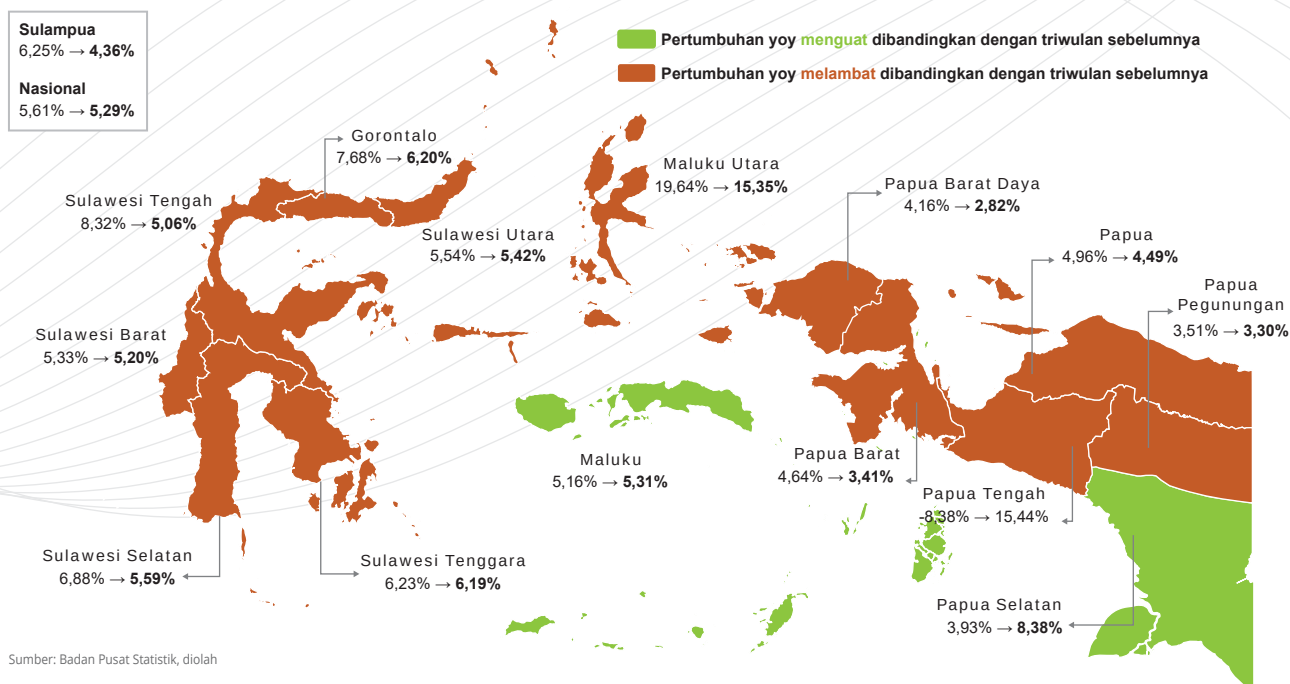
Kinerja perekonomian Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Maluku tercatat sebesar 5,31% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan Triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,16% (yoy). Perkembangan tersebut mencerminkan terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi Maluku yang positif dan resilien, didukung oleh aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha utama serta tetap kuatnya permintaan domestik. Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp17,68 triliun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp9,98 triliun. Secara kuartalan, perekonomian Maluku pada Triwulan II 2026 tumbuh meningkat sebesar 1,11% (qtq), berada di atas capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -3,26% (qtq) (Grafik 1.1).

Pertumbuhan ekonomi Maluku pada Triwulan II 2026 didorong oleh kinerja solid sejumlah lapangan usaha utama serta penguatan sisi pengeluaran. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) tetap tumbuh positif, didukung oleh

peningkatan produksi pertanian sejalan dengan perluasan lahan dan luas panen serta berlanjutnya program swasembada pangan, di tengah tetap positifnya produksi perikanan. LU Administrasi Pemerintahan juga mengalami peningkatan pertumbuhan didukung oleh akselerasi realisasi belanja pemerintah, terutama belanja pegawai dan belanja barang, sejalan dengan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur serta meningkatnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sementara itu, LU Perdagangan dan Reparasi tetap tumbuh solid, ditopang oleh terjaganya permintaan domestik, peningkatan aktivitas distribusi barang, serta berbagai momentum sosial dan keagamaan pada periode laporan. Dari sisi pengeluaran, penguatan ekonomi turut ditopang oleh meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga (RT) seiring tingginya aktivitas konsumsi masyarakat pada berbagai momentum sosial-keagamaan dan HBKN. Konsumsi Pemerintah juga tumbuh meningkat, didukung oleh akselerasi belanja pemerintah pusat serta tetap positifnya belanja pemerintah daerah, terutama pada komponen belanja pegawai dan barang dan jasa. Selain itu, kinerja PMTB meningkat sejalan dengan akselerasi realisasi belanja modal pemerintah pusat serta menguatnya aktivitas investasi swasta pada periode laporan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Triwulan II 2026 tercatat berada di atas





Gambar 1.1 Peta Pertumbuhan Kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua)

pertumbuhan ekonomi kawasan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Pertumbuhan ekonomi kawasan Sulampua tercatat tumbuh sebesar 4,36% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,25% (yoy) (Gambar 1.1). Secara spasial, pada Triwulan II 2026, Provinsi Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sulampua sebesar 15,35% (yoy), diikuti oleh Gorontalo dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20% (yoy). Di sisi lain, Provinsi Papua Tengah mengalami kontraksi perekonomian sebesar 15,44% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 8,38% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi kawasan Sulampua secara umum dipengaruhi oleh moderasi kinerja sejumlah Lapangan Usaha (LU) utama dan komponen pengeluaran. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan terjadi pada hampir seluruh LU utama, dipengaruhi oleh pemangkasan kuota RKAB nikel, penurunan produksi industri MHP, kontraksi produksi padi, serta normalisasi aktivitas perdagangan ritel masyarakat pasca-HBKN pada triwulan sebelumnya. Dari sisi Pengeluaran, perlambatan terjadi pada seluruh komponen,

kecuali PMTB, sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat pasca *long festive season* pada triwulan sebelumnya, serta perlambatan ekspor sejumlah komoditas strategis. Namun demikian, perlambatan ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh tetap kuatnya aktivitas investasi, terutama yang terkait dengan keberlanjutan pembangunan sejumlah proyek hilirisasi nikel.

1.2. PERKEMBANGAN PDRB SISI PENGELUARAN

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 didorong oleh peningkatan kinerja Konsumsi RT, PMTB dan Konsumsi Pemerintah. Kinerja positif Konsumsi RT didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi seiring berlangsungnya berbagai momentum perayaan dan kegiatan sosial-keagamaan, antara lain rangkaian Hari Raya Paskah, Tradisi Pawai Obor, dan pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Maluku 2026. Selain itu, penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 sejak awal Juni 2026 turut mendorong berbagai aktivitas dan *event* pendukung yang berdampak positif terhadap

konsumsi masyarakat. Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan tetap terjaganya optimisme masyarakat Maluku terhadap kondisi perekonomian, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang konsisten berada pada level optimis selama triwulan laporan.

Secara umum, struktur perekonomian Provinsi Maluku dari sisi pengeluaran tidak mengalami perubahan (Tabel 1.1). Tiga komponen utama dalam struktur ekonomi Provinsi Maluku masih didominasi Konsumsi RT, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/Investasi), serta Konsumsi Pemerintah. Dari sisi PMTB dan Konsumsi Pemerintah, penguatan ekonomi Maluku

didukung oleh akselerasi realisasi belanja pemerintah, terutama belanja modal dan belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai dipengaruhi oleh realisasi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur, termasuk pembayaran gaji ke-13 serta pelaksanaan rekrutmen TNI dan PPPK yang turut memperkuat ekspansi belanja pegawai. Sementara itu, peningkatan Ekspor Luar Negeri terutama ditopang oleh menguatnya ekspor komoditas ikan dan udang, sejalan dengan peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok dan Hong Kong. Namun demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku yang lebih tinggi tertahan oleh peningkatan Impor Luar Negeri. Peningkatan impor terutama didorong oleh naiknya impor migas untuk memenuhi kebutuhan energi, sejalan

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Sisi Pengeluaran

	Komponen Pengeluaran	2024					2025					2026	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
Pangsa (%)	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	71,17	69,22	67,11	68,28	68,90	70,96	71,22	69,63	69,50	70,30	74,04	72,21
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,03	2,74	2,73	2,90	2,85	3,02	2,98	2,82	2,81	2,90	3,04	3,00
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,40	27,20	24,57	36,02	26,74	20,40	24,37	23,09	27,36	23,89	20,10	23,20
	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	28,13	28,24	28,66	28,87	28,48	27,28	27,83	27,87	27,39	27,59	26,92	27,30
	Perubahan Inventori	0,49	0,47	0,46	0,43	0,46	0,47	0,44	0,45	0,42	0,45	0,44	0,41
	Ekspor Luar Negeri	3,05	3,06	2,04	3,92	3,02	2,58	2,32	2,98	3,45	2,85	2,06	2,35
	Impor Luar Negeri	11,60	12,97	13,28	9,78	11,89	9,01	8,68	8,03	10,18	8,99	14,53	24,35
	Net Ekspor Antar Daerah	(12,67)	(17,95)	(12,28)	(30,64)	(18,56)	(15,71)	(20,49)	(18,80)	(20,74)	(18,98)	(12,07)	(4,12)
	Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Komponen Pengeluaran	2024					2025					2026	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
Pertumbuhan yoy (%)	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,60	3,82	3,54	4,12	4,02	3,41	3,45	3,35	4,11	3,58	6,56	6,62
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	20,30	9,72	11,10	12,61	13,37	4,36	9,61	4,82	1,41	4,95	4,56	8,33
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,70	3,86	0,74	2,40	3,51	15,01	(9,95)	(4,11)	(17,82)	2,32	3,32	4,26
	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	1,88	2,86	0,68	2,72	2,03	1,77	0,45	0,79	0,75	0,92	4,82	6,17
	Perubahan Inventori	0,26	0,72	3,08	0,97	1,25	0,33	(3,48)	0,80	3,69	0,31	(0,59)	(0,17)
	Ekspor Luar Negeri	(19,44)	(33,94)	(31,68)	24,98	(17,16)	(20,24)	(29,77)	21,12	(16,83)	23,35	(31,93)	1,56
	Impor Luar Negeri	115,09	123,82	118,41	(8,44)	68,28	(12,14)	(21,54)	(39,72)	20,76	(15,41)	52,13	109,29
	Net Ekspor Antar Daerah	(73,86)	(44,84)	(88,43)	(2,77)	(44,57)	54,47	(14,10)	218,92	(64,97)	(29,23)	(124,46)	(127,02)
	Total PDRB	5,45	3,13	6,24	6,53	5,34	5,07	3,39	4,31	5,44	4,56	5,16	5,31
	Komponen	2024					2025					2026	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
Andil yoy (%)	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,94	2,35	2,19	2,57	2,51	2,16	2,14	2,02	2,50	2,21	4,10	4,11
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,54	0,25	0,29	0,34	0,35	0,13	0,26	0,13	0,04	0,14	0,14	0,25
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,84	1,09	0,19	0,90	0,97	2,76	(2,71)	(1,01)	(6,42)	0,62	0,68	1,04
	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	0,55	0,81	0,20	0,81	0,60	0,50	0,13	0,23	0,22	0,26	1,32	1,72
	Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	(0,02)	0,00	0,02	0,00	(0,00)	(0,00)
	Ekspor Luar Negeri	(0,65)	(1,52)	(0,93)	0,99	(0,63)	(0,62)	(0,91)	0,43	(0,66)	0,71	0,63	0,04
	Impor Luar Negeri	6,85	7,04	9,22	(1,06)	5,50	(1,41)	(2,79)	(5,27)	2,03	(1,83)	4,70	9,49
	Net Ekspor Antar Daerah	14,97	11,69	19,98	0,85	11,14	(6,90)	2,53	(26,89)	19,91	5,43	19,55	26,02
	Total PDRB	5,45	3,13	6,24	6,53	5,34	5,07	3,39	4,31	5,44	4,56	5,16	5,31

Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

* Angka sementara BPS

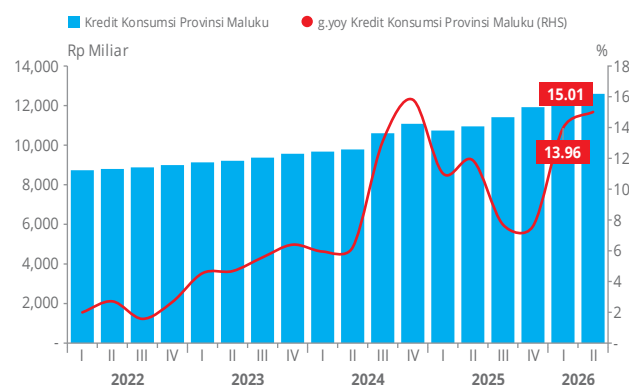
dengan aktivitas ekonomi domestik yang tetap tumbuh positif pada periode laporan.

1.2.1. KONSUMSI RT

Kinerja Konsumsi RT mengalami peningkatan pada Triwulan II 2026. Konsumsi RT tercatat tumbuh sebesar 6,62% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 sebesar 6,56% (yoy). Konsumsi RT merupakan komponen dengan porsi terbesar dalam kinerja perekonomian Maluku pada sisi permintaan, dengan pangsa mencapai 74,21% terhadap perekonomian Maluku pada triwulan laporan.

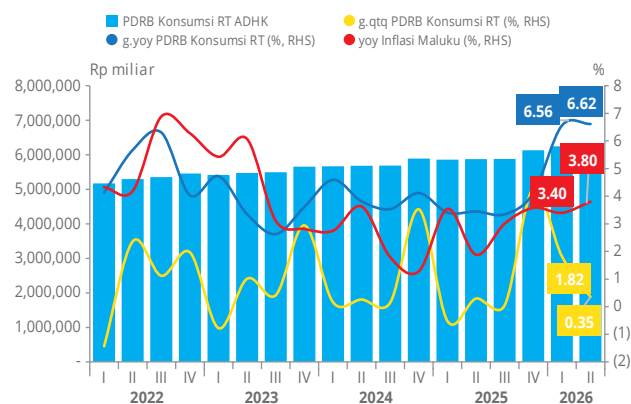
Peningkatan kinerja Konsumsi RT pada Triwulan II 2026 terjadi di tengah meningkatnya tekanan inflasi. Inflasi pada periode laporan tercatat sebesar 3,80% (yoy), meningkat dibandingkan

Triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 3,40% (yoy) dan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Perkembangan tersebut mengindikasikan meningkatnya tekanan harga di tengah tetap kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat, sehingga upaya pengendalian inflasi perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya terhadap risiko tekanan pada komponen *volatile food* dan *core inflation*. Peningkatan Konsumsi RT tersebut tidak terlepas dari adanya momentum perayaan keagamaan dan sosial yang berlangsung pada periode laporan, yaitu rangkaian Hari Raya Paskah, Tradisi Pawai Obor, dan pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Maluku 2026. Selain itu, penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 sejak Juni 2026 turut mendorong berbagai aktivitas dan *event* pendukung yang berdampak positif terhadap



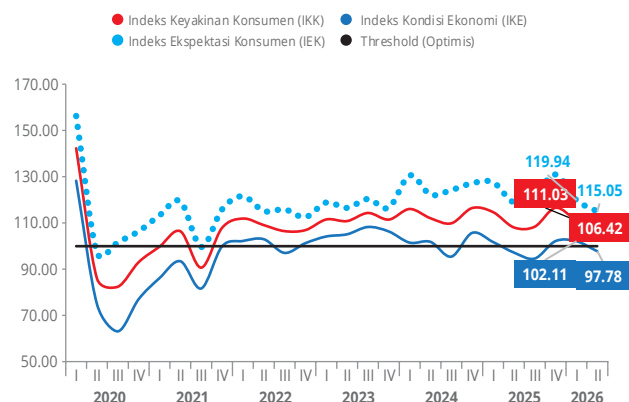
Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.3 Kredit Konsumsi di Provinsi Maluku



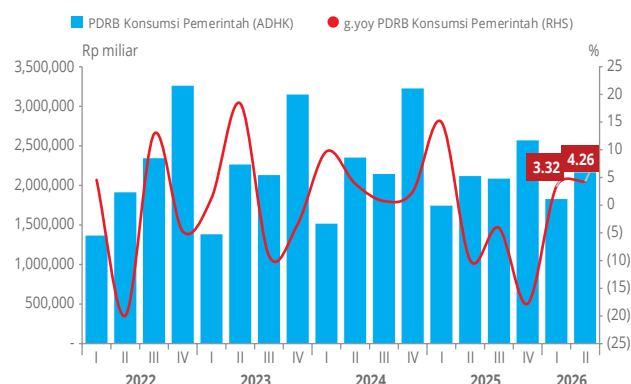
Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.4 Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Maluku



Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.5 Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Maluku



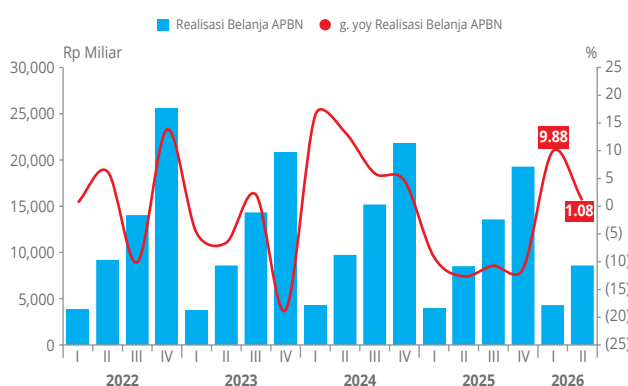
Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.6 Konsumsi Pemerintah Provinsi Maluku

konsumsi masyarakat. Penguatan Konsumsi RT juga tercermin dari kinerja Kredit Konsumsi yang tetap tumbuh positif sebesar 15,01% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,96% (yoy). Kondisi ini menunjukkan daya beli masyarakat yang relatif kuat, ditopang oleh kenaikan UMP Provinsi Maluku sebesar 6,1% di Tahun 2026. Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan bahwa permintaan domestik masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Maluku pada Triwulan II 2026, meskipun tetap memerlukan pengendalian inflasi yang terkoordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan daya beli masyarakat.

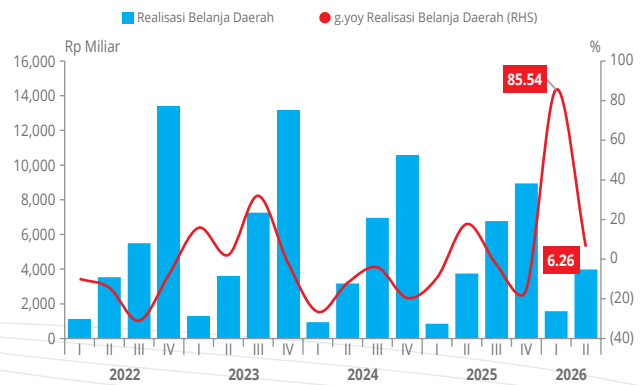
1.2.2. KONSUMSI PEMERINTAH

Kinerja Konsumsi Pemerintah tumbuh meningkat pada Triwulan II 2026, tercatat sebesar 4,26% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 3,81% (yoy). Dari sisi APBN, realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Maluku tercatat tumbuh sebesar 1,08% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,88% (yoy). Masih positifnya kinerja konsumsi Pemerintah mengindikasikan bahwa aktivitas belanja Kementerian/Lembaga di daerah masih terus didorong realisasinya. Secara komponen, belanja pegawai APBN tumbuh sebesar 24,43% (yoy), antara lain dipengaruhi oleh realisasi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur, termasuk pembayaran



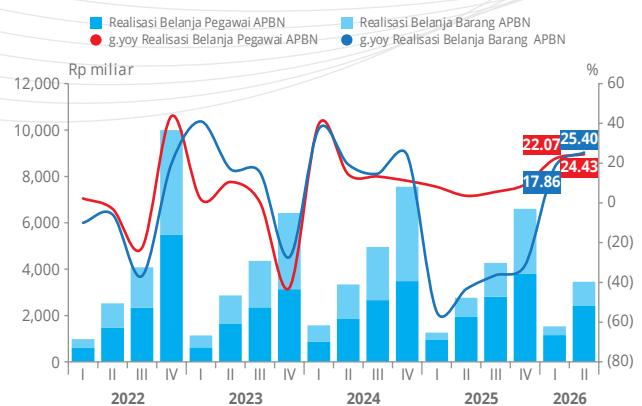
Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.7 Realisasi Total Belanja APBN di Provinsi Maluku



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.8 Realisasi Total Belanja APBD Wilayah Maluku



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.9 Realisasi Belanja Pegawai dan Barang dan Jasa APBN di Provinsi Maluku

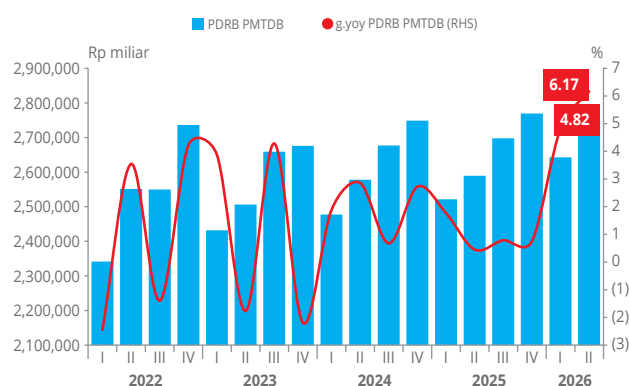
gaji ke-13 serta pelaksanaan rekrutmen TNI dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memperkuat ekspansi belanja pegawai. Selain itu, komponen belanja barang dan jasa juga tumbuh sebesar 25,40% (yoy) sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan dukungan operasional instansi vertikal di daerah.

Pada sisi belanja daerah, realisasi APBD Wilayah Maluku tercatat masih mengalami pertumbuhan positif pada Triwulan II 2026. Realisasi belanja daerah tercatat tumbuh sebesar 6,26% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 85,54% (yoy). Kondisi tersebut mencerminkan tetap berlanjutnya realisasi program dan kegiatan pemerintah daerah, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan komponennya,

peningkatan terutama terjadi pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Belanja pegawai tumbuh sebesar 11,15% (yoy), terutama dipengaruhi oleh realisasi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur, termasuk pembayaran gaji ke-13 serta penambahan PPPK. Sementara itu, belanja barang dan jasa tumbuh sebesar 20,89% (yoy), sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan program dan kegiatan operasional pemerintah daerah pada triwulan laporan. Secara keseluruhan, peningkatan Konsumsi Pemerintah pada Triwulan II 2026 dipengaruhi oleh akselerasi realisasi belanja pemerintah pusat serta tetap kuatnya belanja pemerintah daerah, khususnya pada komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang mendorong peningkatan aktivitas pemerintahan dan memberikan stimulus terhadap perekonomian Maluku.

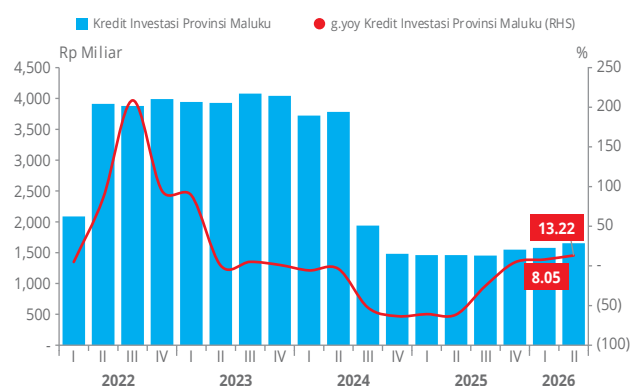
1.2.3. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Pada Triwulan II 2026, kinerja PMTB di Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan dibandingkan Triwulan I 2026. Kinerja komponen PMTB, yang mencerminkan kegiatan investasi, tercatat tumbuh sebesar 6,17% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi Triwulan I 2026 yang turut tumbuh sebesar 4,82% (yoy). Dari sisi pemerintah, realisasi belanja modal APBN mengalami peningkatan. Pada Triwulan II 2026, belanja modal tercatat tumbuh sebesar 138,23% (yoy), membaik dibandingkan capaian pada Triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 126,99% (yoy). Perkembangan tersebut mengindikasikan berlanjutnya akselerasi pelaksanaan belanja pemerintah untuk pembangunan dan pengadaan aset tetap, termasuk pembangunan berbagai



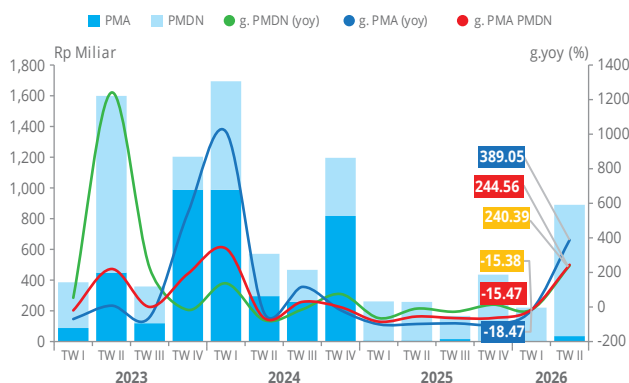
Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.10 Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Maluku



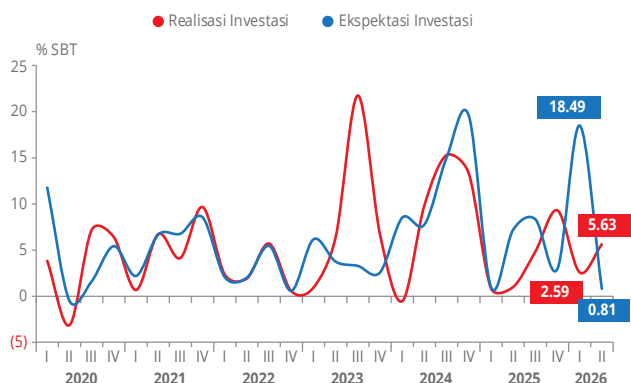
Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 1.12 Kredit Investasi di Provinsi Maluku



Sumber: DPMPSTP Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.11 Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) di Provinsi Maluku



Sumber: SKDU Bank Indonesia

Grafik 1.13 Realisasi dan Ekspektasi Investasi SKDU Provinsi Maluku

proyek infrastruktur di Provinsi Maluku. Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), komponen ekspektasi investasi berada pada area ekspansif dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 0,81% pada Triwulan II 2026. Capaian tersebut mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek kegiatan investasi ke depan, sejalan dengan rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha.

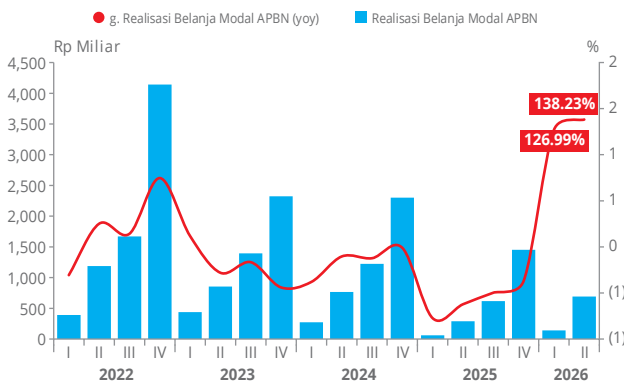
Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Investasi di Maluku juga memperlihatkan arah perbaikan. Kredit Investasi tercatat tumbuh 13,22% (yoy) pada Triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,05% (yoy). Perbaikan ini mengindikasikan peningkatan optimisme pelaku ekonomi terutama pada sektor-sektor produktif di Provinsi Maluku.

Dari sisi penanaman modal, realisasi investasi. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan signifikan pada Triwulan II 2026, secara keseluruhan tumbuh sebesar 244,56% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 15,47% (yoy). Realisasi PMA tumbuh sebesar 389,05% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 18,47% (yoy). Peningkatan PMA terutama ditopang oleh LU Jasa Lainnya, setelah pada triwulan sebelumnya kinerja PMA tertahan terutama oleh penurunan investasi pada LU Pertambangan. Sejalan dengan

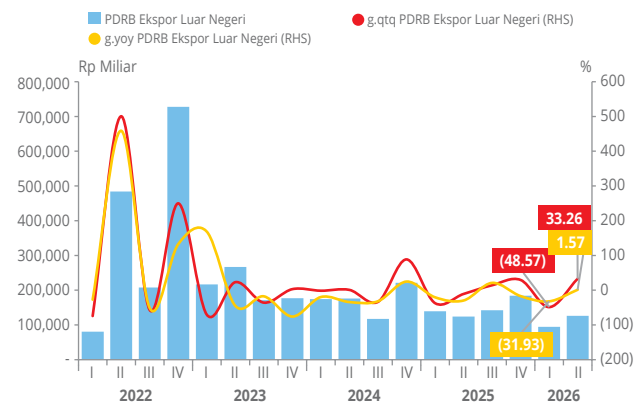
itu, realisasi PMDN tumbuh sebesar 240,39% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 15,38% (yoy). Pertumbuhan PMDN terutama ditopang oleh peningkatan investasi pada LU PKP dan LU Pertambangan, setelah pada triwulan sebelumnya kinerja PMDN tertahan terutama oleh penurunan investasi pada LU PKP. Perkembangan tersebut mengindikasikan menguatnya aktivitas investasi di Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026, terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam, serta mencerminkan meningkatnya aktivitas penanaman modal oleh investor domestik maupun asing. Akselerasi investasi tersebut berpotensi mendorong pembentukan modal, meningkatkan kapasitas produksi, serta memberikan dampak lanjutan terhadap aktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi Maluku, meskipun keberlanjutannya perlu terus dicermati mengingat tingginya pertumbuhan pada beberapa sektor turut dipengaruhi oleh efek basis yang relatif rendah (low base effect) pada periode sebelumnya.

1.2.4. EKSPOR DAN IMPOR

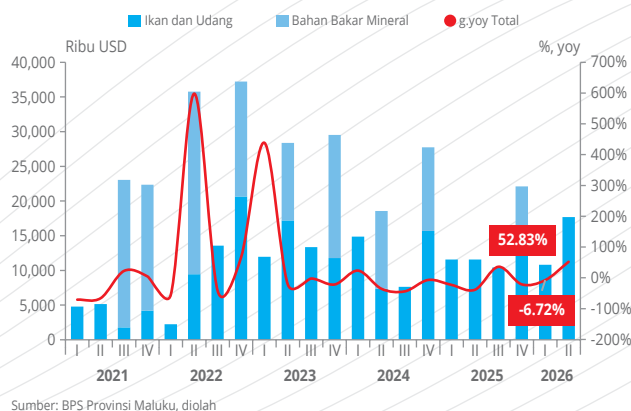
Kinerja Ekspor Luar Negeri (LN) Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan pada Triwulan II 2026. Kinerja Ekspor LN tercatat tumbuh sebesar 1,57% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar



Grafik 1.14 Realisasi Belanja Modal APBN Provinsi Maluku



Grafik 1.15 Ekspor Luar Negeri Provinsi Maluku

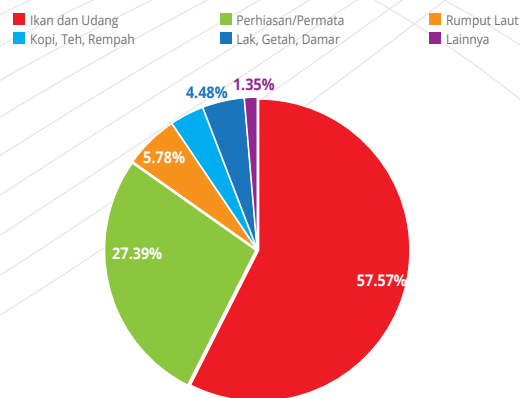


Grafik 1.16 Komoditas Ekspor Luar Negeri Provinsi Maluku

31,93% (yoy). Struktur ekspor Maluku pada Tahun 2026 masih didominasi oleh komoditas ikan dan udang. Peningkatan kinerja ekspor pada triwulan laporan terutama didorong oleh menguatnya ekspor komoditas ikan dan udang sejalan dengan peningkatan produksi dan permintaan dari negara tujuan ekspor. Perkembangan tersebut turut mencerminkan perbaikan aktivitas perdagangan luar negeri Maluku, khususnya pada komoditas unggulan sektor perikanan.

Kinerja ekspor komoditas ikan dan udang meningkat signifikan pada triwulan laporan.

Ekspor komoditas tersebut tercatat tumbuh sebesar 52,83% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 6,72% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor terutama didorong oleh menguatnya permintaan dari negara mitra dagang utama, yaitu Tiongkok, dengan pangsa sebesar 94,57% dari total ekspor ikan dan udang Maluku. Ekspor ke Tiongkok tercatat tumbuh sebesar 51,12% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, ekspor ke Hong Kong dengan pangsa sebesar 5,43% tercatat tumbuh lebih tinggi sebesar 174,22% (yoy). Perkembangan tersebut mencerminkan menguatnya permintaan eksternal terhadap komoditas perikanan Maluku, khususnya dari pasar Tiongkok dan Hong Kong, yang turut menopang perbaikan kinerja ekspor luar negeri Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026. Di sisi lain, tingginya konsentrasi ekspor pada pasar Tiongkok menunjukkan masih perlunya diversifikasi negara tujuan ekspor guna



Grafik 1.17 Ekspor Komoditas Asal Maluku melalui Pelabuhan Luar Maluku

memperkuat ketahanan kinerja ekspor Maluku terhadap perubahan permintaan pada negara mitra dagang utama. Selain ekspor melalui pelabuhan di Maluku, ekspor komoditi asal Maluku juga dilakukan melalui pelabuhan di luar Maluku. Pada Triwulan II 2026, komoditi asal Maluku yang diekspor melalui pelabuhan luar Maluku didominasi oleh komoditas ikan dan udang dengan pangsa nilai ekspor sebesar 57,57%, diikuti dengan perhiasan/permata sebesar 27,39%, dan rumput laut sebesar 5,78%.

Dari sisi impor, kinerja Impor Luar Negeri Provinsi Maluku mengalami peningkatan pada Triwulan I 2026.

Kinerja Impor Luar Negeri pada periode laporan tercatat tumbuh sebesar 109,29% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 52,13% (yoy). Peningkatan kinerja Impor Luar Negeri ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi pada kedua komponen impor migas dan non migas, masing-masing tumbuh sebesar 201,40% (yoy) dan 38,85% (yoy). Dari sisi pangsa, komoditas migas memiliki kontribusi yang signifikan pada aktivitas impor Maluku dengan pangsa nilai impor sebesar 99,46% pada triwulan laporan. Berdasarkan penggunaan akhir, impor Maluku hampir seluruhnya merupakan Bahan Baku/ Penolong dengan pangsa sebesar 99,85%, sementara Barang Modal memiliki pangsa sebesar 0,15% dan tidak terdapat impor Barang Konsumsi pada periode laporan. Dominasi impor Bahan Baku/ Penolong, sejalan dengan tingginya

pangsa impor migas, mengindikasikan bahwa peningkatan impor terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan input dan energi dalam menunjang aktivitas ekonomi domestik, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas produksi dan perdagangan pada periode laporan.

Sementara itu, terbatasnya pangsa impor Barang Modal menunjukkan bahwa peningkatan impor belum secara signifikan didorong oleh kebutuhan investasi melalui pengadaan barang modal dari luar negeri.

Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Sisi Penawaran (ADHK 2010)

	Komponen	2024					2025					2026	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
Pangsa (%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,27	23,07	23,72	23,36	23,60	24,27	23,62	24,44	23,52	23,96	24,60	23,64
	Pertambangan dan Penggalian	1,77	1,96	1,64	1,37	1,68	1,47	1,33	1,55	1,43	1,45	1,38	1,59
	Industri Pengolahan	6,55	5,53	6,68	6,46	6,31	6,56	5,77	6,74	6,94	6,51	6,37	6,35
	Pengadaan Listrik, Gas	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,09	0,11
	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	0,39	0,38	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,36	0,35	0,37	0,35	0,35
	Konstruksi	7,51	7,80	7,72	8,04	7,78	7,23	8,05	7,90	7,92	7,78	7,25	8,00
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,53	13,93	14,22	14,29	14,01	13,99	14,45	14,63	14,87	14,49	14,48	14,55
	Transportasi dan Pergudangan	5,25	5,57	5,41	5,48	5,43	5,29	5,45	5,15	5,71	5,40	5,45	5,66
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,45	1,46	1,45	1,45	1,45	1,39	1,46	1,47	1,48	1,45	1,57	1,56
	Informasi dan Komunikasi	3,18	3,12	3,06	3,03	3,10	3,11	3,15	3,06	2,97	3,07	3,04	2,97
	Jasa Keuangan	4,18	4,00	3,83	3,87	3,96	4,14	3,99	4,03	4,27	4,11	4,30	3,78
	Real Estate	0,26	0,27	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,25
	Jasa Perusahaan	0,96	0,94	0,92	0,96	0,94	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95	0,96	0,93
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,14	22,19	21,30	21,46	21,53	21,43	21,45	20,13	20,10	20,75	20,60	20,77
	Jasa Pendidikan	5,34	5,44	5,32	5,41	5,35	5,35	5,27	5,08	5,03	5,18	5,15	5,24
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,47	2,56	2,42	2,49	2,48	2,48	2,60	2,52	2,44	2,51	2,53	2,60
	Jasa lainnya	1,64	1,68	1,60	1,72	1,66	1,62	1,73	1,62	1,69	1,67	1,62	1,65
	Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Komponen Penawaran	2024					2025					2026	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
Pertumbuhan yoy (%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,95	0,95	4,40	3,24	3,39	4,63	6,85	7,94	6,23	6,42	6,85	5,11
	Pertambangan dan Penggalian	1,72	9,95	(2,30)	(10,64)	(0,33)	(6,85)	(15,08)	9,37	20,49	1,07	(6,31)	(15,68)
	Industri Pengolahan	6,43	(12,90)	11,63	11,64	4,00	2,69	6,25	3,43	9,11	5,35	(2,70)	10,67
	Pengadaan Listrik, Gas	6,20	1,00	1,03	0,24	2,08	0,22	0,77	1,99	13,39	4,09	(1,83)	16,70
	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	2,52	2,89	2,11	0,23	1,92	1,64	0,89	0,03	0,87	0,84	(0,62)	0,86
	Konstruksi	1,29	8,14	3,04	6,95	4,88	1,14	4,98	5,46	3,95	3,94	5,66	7,15
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,88	8,27	9,53	8,93	8,44	8,01	4,99	5,23	9,06	6,82	8,26	6,95
	Transportasi dan Pergudangan	5,39	7,42	7,84	7,09	6,96	8,16	5,31	4,35	5,71	5,84	6,48	0,26
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,95	5,76	3,49	4,50	4,42	0,19	1,26	4,31	7,40	3,36	18,89	15,92
	Informasi dan Komunikasi	5,40	5,50	3,10	3,79	4,43	3,76	5,29	5,22	5,06	4,84	5,48	3,31
	Jasa Keuangan	5,67	2,37	3,99	2,82	3,70	3,63	1,92	8,49	15,40	7,38	9,02	(0,02)
	Real Estate	1,78	5,40	5,39	4,43	4,25	4,17	0,52	3,47	4,25	3,09	4,31	4,33
	Jasa Perusahaan	5,22	5,48	3,57	4,66	4,72	2,66	2,79	6,75	5,45	4,44	8,43	6,22
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,34	1,81	7,41	9,91	6,53	7,69	(0,01)	(1,02)	0,07	1,57	3,07	5,76
	Jasa Pendidikan	2,54	4,76	5,94	7,79	5,27	5,62	(0,02)	(0,36)	(0,16)	1,20	1,61	6,73
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,17	9,92	7,54	5,17	7,67	1,87	0,60	5,04	1,73	2,29	5,94	4,08
	Jasa lainnya	5,38	6,08	4,75	7,75	6,02	2,53	5,05	5,22	3,51	4,07	5,88	3,05
	Total PDRB	5,45	3,13	6,24	6,53	5,34	5,07	3,39	4,31	5,44	4,56	5,16	5,31

Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Sisi Penawaran (ADHK 2010) Lanjutan

	Komponen	2024					2025					2026	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
Andil yoy (%)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,18	0,22	1,03	0,77	0,80	1,10	1,53	1,83	1,43	1,48	1,62	1,18
	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,20	(0,05)	(0,21)	(0,01)	(0,14)	(0,33)	0,18	0,34	0,02	(0,11)	(0,28)
	Industri Pengolahan	0,44	(0,88)	0,76	0,74	0,27	0,19	0,36	0,24	0,61	0,35	(0,18)	0,63
	Pengadaan Listrik, Gas	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	(0,00)	0,02
	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	0,00
	Konstruksi	0,09	0,55	0,22	0,50	0,34	0,08	0,35	0,38	0,28	0,27	0,37	0,51
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,01	1,22	1,45	1,37	1,27	1,20	0,77	0,82	1,42	1,05	1,27	1,09
	Transportasi dan Pergudangan	0,25	0,35	0,36	0,34	0,33	0,38	0,26	0,20	0,28	0,28	0,31	0,01
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,06	0,08	0,05	0,07	0,07	0,00	0,02	0,06	0,11	0,05	0,27	0,24
	Informasi dan Komunikasi	0,23	0,23	0,13	0,16	0,19	0,16	0,22	0,22	0,21	0,20	0,23	0,14
	Jasa Keuangan	0,23	0,09	0,15	0,11	0,14	0,15	0,07	0,31	0,57	0,28	0,36	(0,00)
	Real Estate	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,03	0,03	0,07	0,05	0,04	0,08	0,06
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,41	0,38	1,46	1,93	1,30	1,51	(0,00)	(0,20)	0,02	0,31	0,62	1,16
	Jasa Pendidikan	0,15	0,27	0,34	0,44	0,30	0,32	(0,00)	(0,02)	(0,01)	0,07	0,09	0,38
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,20	0,24	0,18	0,13	0,19	0,05	0,02	0,12	0,04	0,06	0,14	0,10
	Jasa lainnya	0,09	0,10	0,08	0,13	0,10	0,04	0,09	0,08	0,06	0,07	0,10	0,05
	Total PDRB	5,45	3,13	6,24	6,53	5,34	5,07	3,39	4,31	5,44	4,56	5,16	5,31

Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah

*Angka sementara BPS

1.3. PERKEMBANGAN PDRB SISI LAPANGAN USAHA

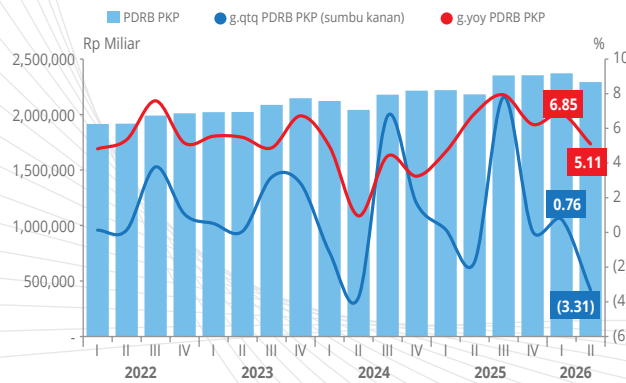
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Triwulan II 2026 dipengaruhi oleh kinerja pertumbuhan solid pada LU PKP, LU Administrasi Pemerintahan, LU Perdagangan Besar dan Reparasi, dan LU Konstruksi. Berdasarkan pangsaanya, struktur perekonomian Provinsi Maluku dari sisi penawaran cenderung stabil dalam lima tahun terakhir. Tiga lapangan usaha dengan pangsa terbesar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku adalah LU PKP; LU Administrasi Pemerintahan; serta LU Perdagangan dan Reparasi, dengan pangsa masing-masing sebesar 23,64%, 20,77%, dan 14,55%.

1.3.1. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN (PKP)

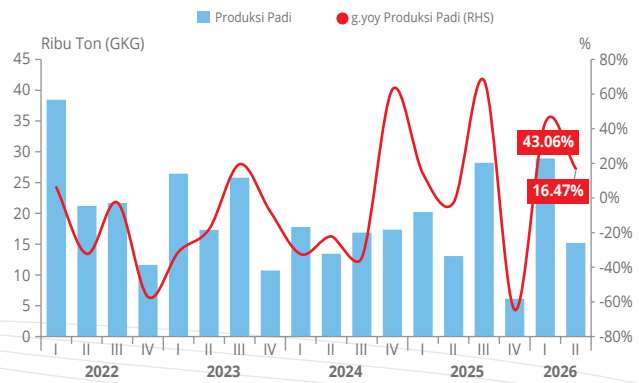
Kinerja LU PKP pada Triwulan II 2026 tumbuh melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU PKP tercatat tumbuh positif sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan laporan, tetap tumbuh

solid namun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,85% (yoy) (Grafik I.18). Capaian positif pertumbuhan LU PKP secara umum dipengaruhi oleh kinerja positif subsektor pertanian dan perikanan. Pada subsektor pertanian, produksi padi tercatat tumbuh sebesar 16,47% (yoy), tetap solid meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Triwulan I 2026 sebesar 43,06% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh berlanjutnya peningkatan luas tanam serta implementasi berbagai program swasembada pangan yang mendorong peningkatan kapasitas produksi pangan lokal. Sementara itu, subsektor perikanan turut menopang kinerja LU PKP dengan produksi perikanan yang tumbuh sebesar 4,39% (yoy) pada triwulan laporan. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut mencerminkan tetap terjaganya aktivitas produksi sektor primer Maluku, didukung oleh upaya peningkatan kapasitas produksi pertanian dan terjaganya aktivitas produksi perikanan.

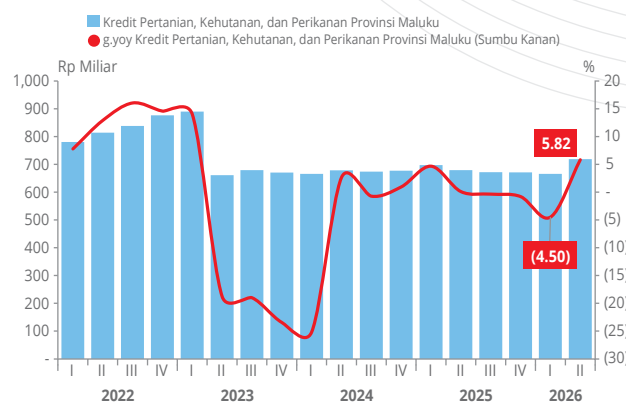
Dari sisi pembiayaan, kinerja LU PKP turut didukung oleh perkembangan penyaluran kredit kepada Sektor PKP yang menunjukkan



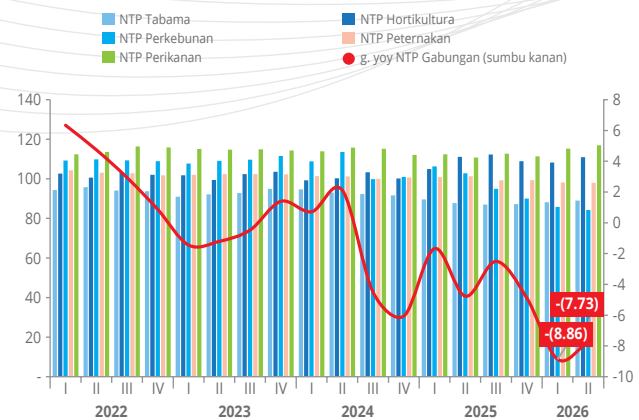
Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.18 PDRB LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi Maluku

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.20 Produksi Padi (GKG) di Provinsi Maluku

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 1.19 Kredit LU Pertanian dan Perikanan di Provinsi Maluku

Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.21 Nilai Tukar Petani di Provinsi Maluku

perbaikan pada Triwulan II 2026. Kredit sektor tersebut tercatat tumbuh sebesar 5,82% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 4,50% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya dukungan pembiayaan perbankan terhadap aktivitas usaha di Sektor PKP, yang turut memperkuat kapasitas permodalan pelaku usaha dalam mendukung kegiatan produksi dan pengembangan usaha pada triwulan laporan.

Namun demikian, peningkatan aktivitas produksi tersebut masih diiringi oleh perkembangan indikator kesejahteraan petani yang relatif terbatas, sebagaimana tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih berada di bawah 100, yaitu sebesar 93,15. Secara tahunan, NTP Gabungan Provinsi Maluku berkontraksi sebesar 7,73% (yoy), meski membaik dibandingkan

triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 8,86% (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh NTP Subsektor Perkebunan yang berkontraksi sebesar 18,07% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi sebesar 19,25% (yoy) pada Triwulan I 2026. Kondisi NTP yang masih berada di bawah 100 menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani masih lebih rendah dibandingkan indeks harga yang dibayarkan petani, sehingga perkembangan tingkat penerimaan dan pengeluaran petani masih perlu terus dicermati.

1.3.2. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

Kinerja LU Administrasi Pemerintahan pada Triwulan II 2026 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja

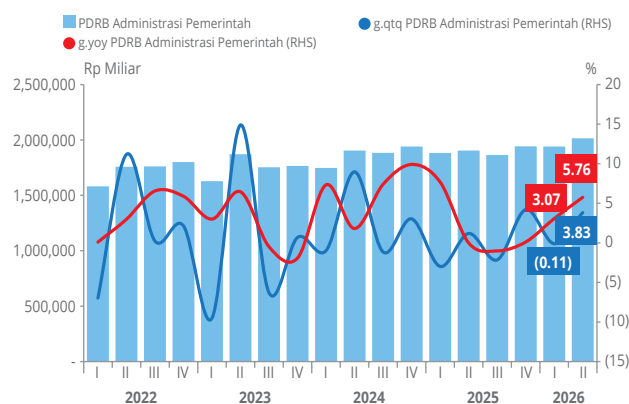
LU Administrasi Pemerintahan tercatat tumbuh sebesar 5,76% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 3,07% (yoy). Peningkatan kinerja LU tersebut didukung oleh menguatnya realisasi belanja pemerintah pusat serta tetap positifnya realisasi belanja pemerintah daerah pada periode laporan. Dari sisi APBN, peningkatan realisasi belanja terutama ditopang oleh Belanja Pegawai yang tumbuh sebesar 24,43% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 22,07% (yoy). Peningkatan tersebut mencerminkan menguatnya realisasi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur pemerintah, termasuk pembayaran gaji ke-13, serta penambahan kebutuhan belanja pegawai sejalan dengan penambahan aparatur pada instansi pemerintah. Selain itu, Belanja Barang dan Jasa tercatat tumbuh sebesar 25,40% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,86% (yoy). Perkembangan tersebut mencerminkan semakin intensifnya pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga di daerah setelah periode awal tahun anggaran, yang turut mendorong aktivitas administrasi pemerintahan pada triwulan laporan.

Sementara itu, dari sisi APBD, realisasi belanja daerah tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi belanja daerah tercatat tumbuh sebesar 6,26% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Triwulan I 2026 sebesar 85,54%

(yoy). Pertumbuhan belanja daerah didukung oleh komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 11,15% (yoy) dan 20,89% (yoy). Namun demikian, peningkatan tersebut tertahan oleh komponen Belanja Lainnya yang terkontraksi sebesar 21,55% (yoy). Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas belanja pemerintah pusat serta tetap terjaganya realisasi belanja operasional pemerintah daerah menjadi faktor yang menopang akselerasi kinerja LU Administrasi Pemerintahan pada Triwulan II 2026.

1.3.3. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Kinerja LU Perdagangan dan Reparasi pada Triwulan II 2026 tetap tumbuh solid. Pada triwulan laporan, LU Perdagangan dan Reparasi tercatat tumbuh sebesar 6,95% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Triwulan I 2026 sebesar 8,26% (yoy). Perlambatan pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas perdagangan setelah tingginya aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan sebelumnya, seiring berlangsungnya *festive season* HBKN Ramadan dan Idul Fitri. Meskipun demikian, kinerja LU Perdagangan dan Reparasi pada Triwulan II 2026 tetap solid, tercermin dari menguatnya kegiatan usaha sektor perdagangan berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sektor perdagangan tercatat positif sebesar 4,99%, meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 sebesar 2,45%. Perkembangan tersebut mengindikasikan tetap kuatnya aktivitas dan optimisme pelaku usaha perdagangan pada periode laporan, sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Selain itu, solidnya kinerja LU ini turut tercermin dari peningkatan aktivitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan yang tumbuh sebesar 7,80% (yoy) pada Triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,91% (yoy).

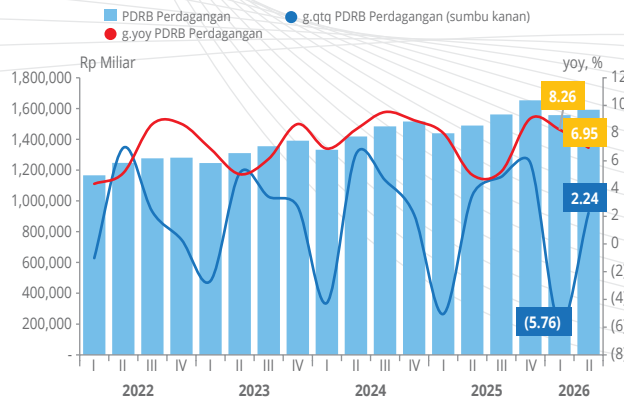


Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.22 PDRB LU Administrasi Pemerintah

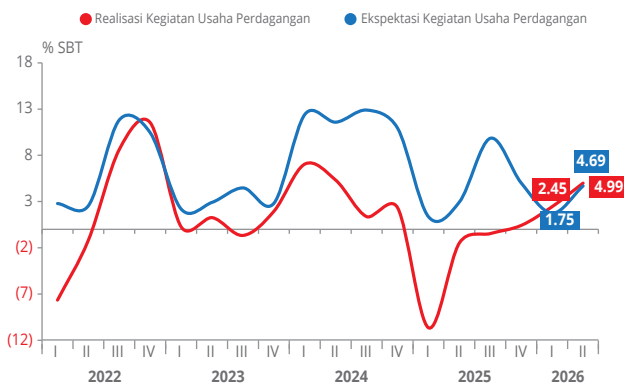
Kondisi tersebut mengindikasikan meningkatnya arus distribusi barang yang turut menopang aktivitas perdagangan di Provinsi Maluku.

Kinerja positif LU Perdagangan dan Reparasi turut didukung oleh berbagai momentum



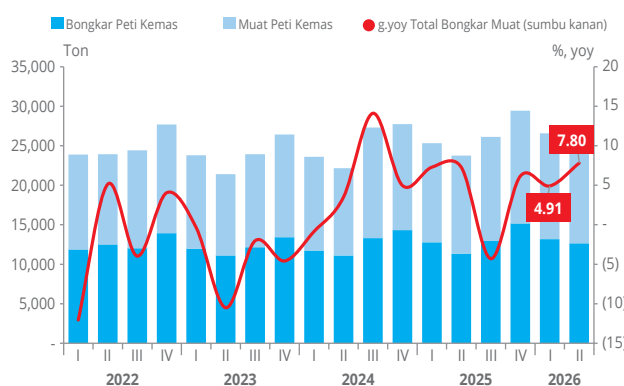
Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 1.23 PDRB LU Perdagangan Besar dan Eceran



Sumber: SKDU Bank Indonesia

Grafik 1.24 SKDU Kegiatan Usaha Perdagangan



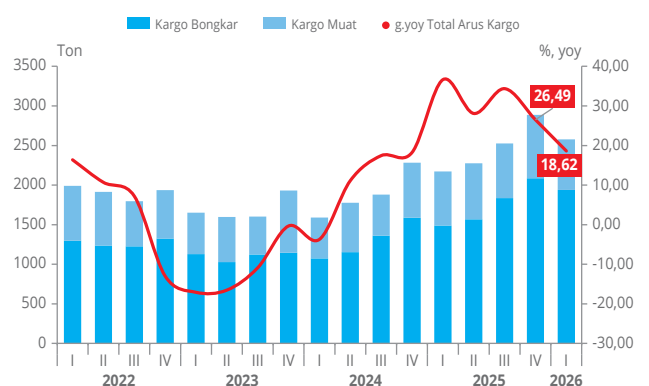
Sumber: PT Pelindo Cabang Ambon, diolah

Grafik 1.25 Arus Bongkar Muat Pelabuhan Yos Sudarso

perayaan keagamaan dan kegiatan sosial yang berlangsung selama triwulan laporan, antara lain rangkaian Hari Raya Paskah, Tradisi Pawai Obor, dan pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Maluku 2026. Selain itu, penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 sejak Juni 2026 turut mendorong penyelenggaraan berbagai aktivitas dan event pendukung yang menopang konsumsi dan aktivitas perdagangan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun mengalami normalisasi dibandingkan tingginya pertumbuhan pada triwulan sebelumnya, kinerja LU Perdagangan dan Reparasi tetap solid ditopang oleh terjaganya permintaan domestik, meningkatnya aktivitas distribusi barang, serta berlangsungnya berbagai momentum sosial dan keagamaan pada triwulan laporan.

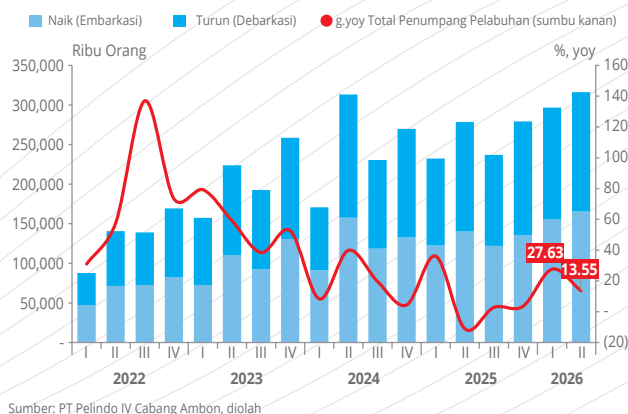
1.3.4. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan di Provinsi Maluku tumbuh melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada Triwulan II 2026, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tercatat tumbuh sebesar 0,26% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,48% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan normalisasi pertumbuhan mobilitas masyarakat setelah tingginya aktivitas perjalanan pada triwulan sebelumnya, terutama seiring momentum HBKN Ramadan dan Idul Fitri. Hal ini tercermin dari arus penumpang pelabuhan



Sumber: PT Angkasa Pura I, diolah

Grafik 1.26 PDRB LU Transportasi & Pergudangan Provinsi Maluku



Grafik 1.27 Arus Penumpang Pelabuhan di Provinsi Maluku

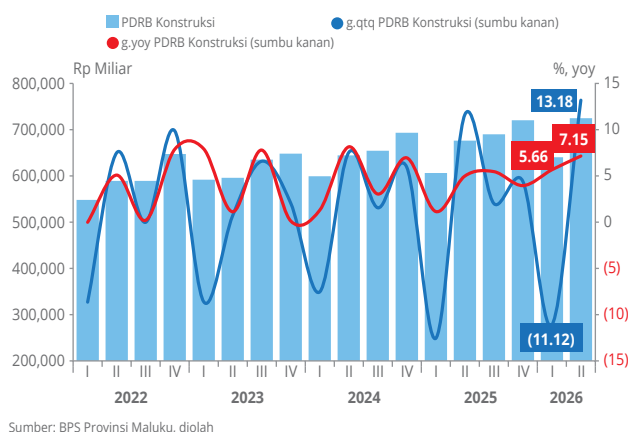
pada Triwulan II 2026 yang tetap tumbuh positif sebesar 13,55% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan I 2026 sebesar 27,63% (yoy). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas mobilitas masyarakat antardaerah dan antarpulau tetap terjaga, namun mengalami normalisasi dibandingkan tingginya mobilitas pada triwulan sebelumnya, sehingga turut mempengaruhi perlambatan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada periode laporan.

1.3.5. KONSTRUKSI

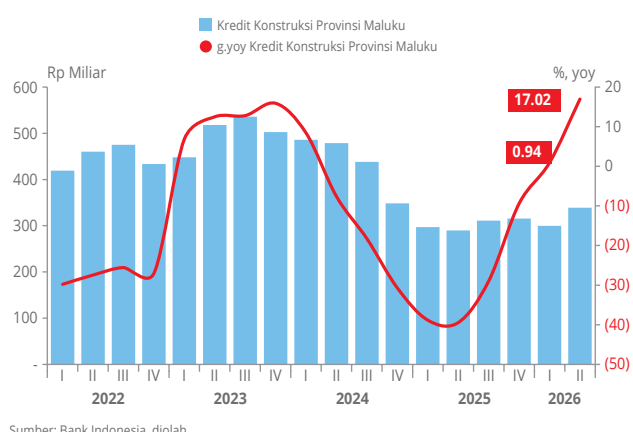
Kinerja LU Konstruksi pada Triwulan II 2026 tumbuh meningkat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, LU

Konstruksi tercatat tumbuh sebesar 7,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,66% (yoy). Peningkatan tersebut mencerminkan menguatnya aktivitas pembangunan dan penyelesaian proyek konstruksi di Provinsi Maluku, terutama yang didukung oleh akselerasi belanja pemerintah pusat pada periode laporan.

Penguatan kinerja LU Konstruksi sejalan dengan peningkatan realisasi belanja modal APBN, di tengah masih tertahannya realisasi belanja modal APBD. Realisasi belanja modal APBN tercatat tumbuh sebesar 138,23% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 126,99% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan berlanjutnya akselerasi pelaksanaan proyek pembangunan dan pengadaan aset tetap pemerintah pusat di Provinsi Maluku. Sementara itu, realisasi belanja modal APBD tumbuh terkontraksi sebesar 29,10% (yoy), menurun dibandingkan Triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 193,80% (yoy). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perlambatan realisasi belanja modal pemerintah daerah pada triwulan laporan, yang menahan lebih lanjut penguatan aktivitas konstruksi. Namun demikian, akselerasi belanja modal APBN yang tetap kuat mampu menopang kinerja LU Konstruksi secara keseluruhan sehingga tetap mencatatkan pertumbuhan yang meningkat pada Triwulan II 2026.



Grafik 1.28 PDRB LU Konstruksi Provinsi Maluku



Grafik 1.29 Kredit LU Konstruksi di Provinsi Maluku



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 2

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

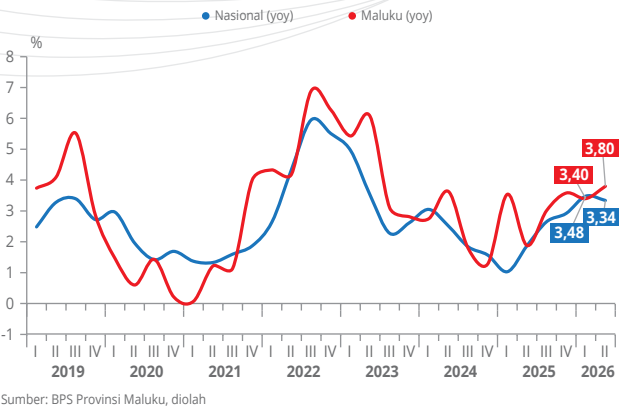
2.1. GAMBARAN UMUM
PERKEMBANGAN INFLASI

Capaian Inflasi Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, utamanya didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Realisasi inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 3,40% (yoy). Kondisi tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan capaian inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat sebesar 4,31% (yoy), serta Kelompok Transportasi turut mencatatkan inflasi yang relatif tinggi sebesar 9,87% (yoy). Kondisi tersebut menyebabkan capaian inflasi Maluku berada di atas rentang sasaran inflasi nasional Tahun 2026 sebesar 2,5±1% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi Maluku utamanya didorong oleh meningkatannya tekanan dari sisi supply. Pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, peningkatan harga disebabkan oleh seiring dengan terganggunya kondisi pasokan komoditas perikanan dan hortikultura akibat peningkatan tinggi gelombang laut di

tengah berakhirnya momen puncak panen untuk beberapa komoditas pertanian. Sementara itu, peningkatan harga pada Kelompok Transportasi utamanya disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian beberapa tarif yang diatur pemerintah yaitu peningkatan biaya *surcharge* pada transportasi udara akibat fluktuasi harga bahan bakar avtur serta penyesuaian kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-subsidi.

Secara regional, sebagian besar provinsi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) mengalami peningkatan inflasi pada Triwulan



Grafik 2.1 Perbandingan Inflasi Pada Gabungan Kota di Maluku dan Nasional

Provinsi	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Gabungan Kab/Kota IHK di Sulawesi Utara	5.43	2.90	1.38	2.94	3.82	4.42	3.66	0.44	1.41	1.71	1.57	1.23	2.20	3.83
Gabungan Kab/Kota IHK di Gorontalo	4.68	2.07	1.16	3.88	4.13	3.93	2.78	1.10	1.76	0.80	1.99	2.52	2.60	4.77
Gabungan Kab/Kota IHK di Sulawesi Tengah	5.28	3.87	2.44	2.35	3.38	2.28	2.15	1.29	1.88	2.47	3.88	3.31	2.83	3.83
Gabungan Kab/Kota IHK di Sulawesi Tenggara	6.61	5.32	3.44	2.58	2.93	2.35	1.06	1.05	1.53	2.52	3.68	2.86	3.37	4.68
Gabungan Kab/Kota IHK di Sulawesi Barat	3.88	2.28	1.18	1.82	2.76	3.05	2.05	1.49	1.55	2.57	3.04	2.48	2.94	2.29
Gabungan Kab/Kota IHK di Sulawesi Selatan	5.86	4.43	2.33	2.81	2.75	2.03	1.67	1.23	0.67	2.24	3.03	2.84	4.50	3.56
Gabungan Kab/Kota IHK di Maluku	5.43	6.07	3.11	2.81	2.75	3.63	1.79	1.28	3.54	1.88	3.01	3.58	3.40	3.80
Gabungan Kab/Kota IHK di Maluku Utara	5.11	5.37	3.35	4.41	3.57	3.21	3.56	1.50	2.32	2.01	-0.17	1.63	2.56	5.05
Gabungan Kab/Kota IHK di Papua	4.42	4.13	2.69	2.66	1.98	1.47	0.82	1.75	2.15	1.07	0.99	2.54	3.50	3.72
Gabungan Kab/Kota IHK di Papua Barat Daya					1.42	1.28	2.59	2.33	0.24	0.50	1.30	2.15	4.09	5.14
Gabungan Kab/Kota IHK di Papua Selatan					3.70	2.04	1.60	1.78	2.68	3.00	3.42	2.95	3.60	2.95
Gabungan Kab/Kota IHK di Papua Tengah					4.10	4.39	3.83	3.27	3.70	2.33	2.28	3.28	2.54	3.65
Gabungan Kab/Kota IHK di Papua Pegunungan					2.37	5.65	4.14	5.36	8.05	2.01	3.55	3.22	3.14	7.84
Gabungan Kab/Kota IHK di Papua Barat	5.00	4.30	2.69	2.94	1.84	3.73	2.91	2.53	-0.23	0.50	1.02	2.59	3.51	6.99
Sulampua														
Gabungak Kab/Kota IHK di Sulampua	5.53	3.34	2.46	2.84	2.99									
Nasional	4.97	3.52	2.28	2.61	3.05	2.51	1.84	1.57	1.03	1.87	2.65	2.92	3.48	3.34

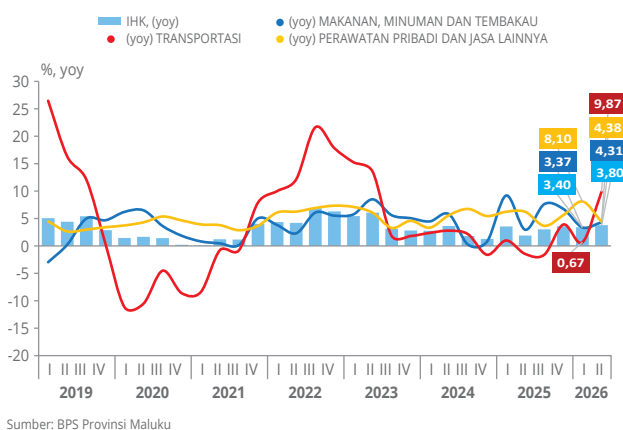
Sumber: BPS Provinsi di Sulampua, diolah

II 2026. Peningkatan capaian inflasi hampir terjadi pada seluruh provinsi di wilayah Sulampua kecuali di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Adapun, capaian inflasi terendah pada Triwulan II 2026 terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dengan capaian 2,29% (yoy). Sementara itu, capaian inflasi tertinggi tercatat pada Provinsi Papua Barat yang mengalami inflasi hingga 6,69% (yoy). Adapun, inflasi Maluku berada pada peringkat 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) Provinsi di wilayah Sulampua pada periode laporan. Secara umum, tekanan inflasi pada sebagian besar Provinsi di Wilayah Sulampua dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan pasokan dari luar wilayah sehingga komponen volatile food menjadi faktor utama peningkatan inflasi pada periode laporan.

Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota IHK di Maluku tercatat mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya kecuali di Kota Tual. Pada Triwulan II 2026, inflasi tertinggi secara spasial tercatat terjadi di Kota Tual yang mengalami inflasi sebesar 4,03% (yoy), meskipun cenderung melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,69% (yoy). Selanjutnya, Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi sebesar 3,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,44% (yoy). Sementara itu, Kota Ambon turut mengalami peningkatan inflasi dengan capaian 3,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,19% (yoy).

Berdasarkan kelompoknya, peningkatan realisasi inflasi Triwulan II 2026 utamanya dipengaruhi oleh tekanan pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Transportasi. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 4,31% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,37% (yoy). Selain itu, Kelompok Transportasi mengalami peningkatan dari semula mencatatkan inflasi sebesar 0,67% (yoy) menjadi 9,87% (yoy) pada Triwulan II 2026. Sementara itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami perlambatan capaian inflasi dengan tercatat sebesar 4,38% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,10% (yoy).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi pada Triwulan II 2026 melalui strategi 4K. Pada aspek ketersediaan pasokan, dilakukan pemantauan ketersediaan stok pangan, panen perdana Padi oleh 4 (empat) kelompok tani di Kabupaten Maluku Barat Daya, Penyerahan Benih Hortikultura kepada kelompok petani di Kota Tual, serta program percepatan tanam dan hilirisasi di wilayah Maluku untuk mendorong produksi dan nilai tambah pertanian. Pada aspek kelancaran distribusi, telah dilakukan Rapat Koordinasi TPID bersama BUMN, BUMD, dan Distributor dalam rangka pengamanan stok, menjaga stabilitas harga, dan memastikan kelancaran pasokan serta Kerja Sama TPID dengan PT ASDP untuk optimalisasi layanan penyeberangan ASDP dalam mendukung kelancaran distribusi bahan pangan antarwilayah Maluku. Darisiketerjangkauan harga, dilaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok secara berkala bersama Satgas Pangan. Sementara itu, pada aspek komunikasi efektif, dilakukan Rapat Koordinasi TPID tingkat Kota maupun Provinsi secara berkala untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi



Grafik 2.2 Inflasi Gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

dan penyampaian informasi perkembangan harga dan imbauan belanja bijak kepada masyarakat melalui media cetak, *billboard*, dan media sosial guna mendorong perilaku konsumsi yang bijak serta meningkatkan literasi masyarakat.

2.2. PERKEMBANGAN REALISASI IHK DI PROVINSI MALUKU

Inflasi IHK Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan berada di atas target capaian nasional. Tingkat inflasi IHK Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi Triwulan I 2026 sebesar 3,40% (yoy). Capaian realisasi inflasi Maluku pada periode laporan berada atas capaian inflasi nasional pada periode yang sama yang tercatat sebesar 3,34% (yoy). Lebih lanjut, realisasi inflasi Maluku pada Triwulan II 2026 berada di atas rentang sasaran inflasi nasional Tahun 2026 sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Realisasi inflasi pada triwulan laporan utamanya disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Transportasi. Peningkatan harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau utamanya disebabkan oleh peningkatan harga komoditas hortikultura dan ikan pelagis yang dipengaruhi oleh peningkatan tinggi gelombang laut dan curah hujan yang secara pola historis terjadi, sehingga mengurangi aktivitas penangkapan serta menekan pasokan ikan tangkap di pasar di tengah terbatasnya pasokan hortikultura dari dalam Maluku seiring berakhirnya momen puncak panen. Sementara itu, peningkatan harga pada kelompok transportasi utamanya disebabkan oleh penyesuaian kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi serta peningkatan harga tiket pesawat sejalan dengan masih diberlakukannya kebijakan penyesuaian besaran biaya tambahan (*surcharge*) pada tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara dalam negeri di tengah tren peningkatan permintaan perjalanan pada momen libur sekolah.

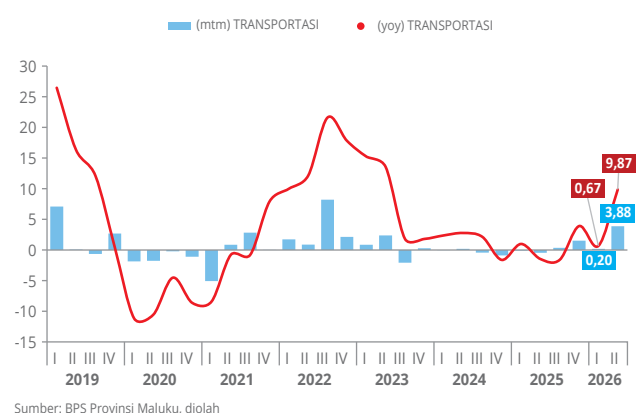
2.2.1. ANALISIS INFLASI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN

Sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami inflasi pada Triwulan II 2026. Berdasarkan andilnya, 3 (tiga) kelompok utama yang mendorong peningkatan inflasi pada periode laporan adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi tahunan mencapai 1,53%; Kelompok Transportasi dengan andil inflasi tahunan mencapai 1,33%; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,38%. Sementara itu, terdapat kelompok pada periode laporan yang mengalami deflasi yaitu Kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan andil deflasi tahunan sebesar 0,08%.

2.2.2. KELOMPOK PENYUMBANG INFLASI

Kelompok Transportasi

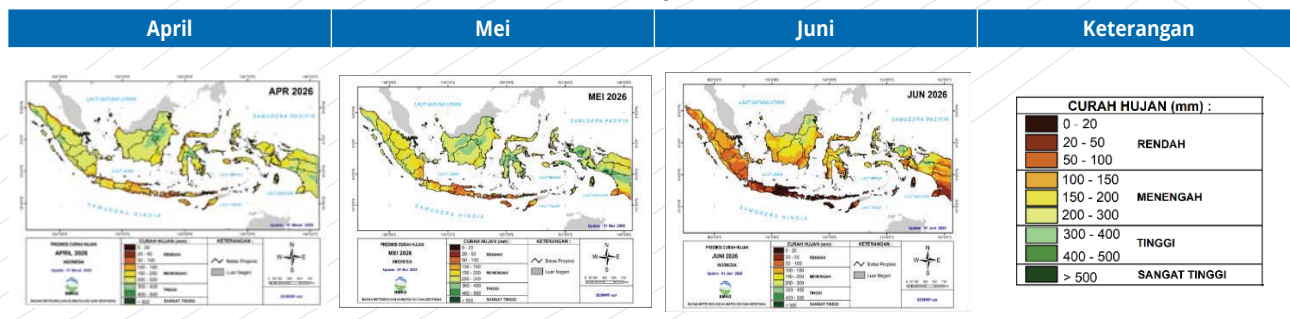
Capaian inflasi pada Kelompok Transportasi pada Triwulan II 2026 tercatat mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 9,87% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,67% (yoy). Komoditas utama yang mengalami peningkatan harga adalah Tarif Angkutan Udara dan Bensin dengan andil inflasi tahunan masing-masing sebesar 0,67% dan 0,33%. Peningkatan Tarif Angkutan Udara sejalan dengan berlanjutnya



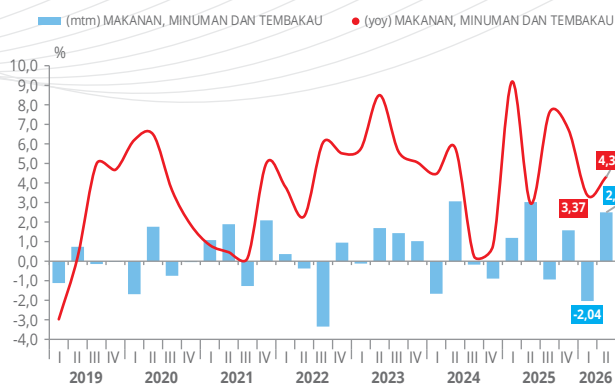
Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 2.3 Inflasi Kelompok Transportasi Provinsi Maluku

Tabel 2.2 Prakiraan Curah Hujan Maluku Triwulan II 2026



Sumber: BMKG



Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 2.4 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Provinsi Maluku

kebijakan pemerintah terkait perizinan maskapai dalam memungut biaya *fuel surcharge* hingga 50% dari tarif batas atas. Sementara itu, peningkatan harga Bensin utamanya disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian tarif BBM Non-Subsidi seiring dengan tren peningkatan harga minyak global.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Capaian inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Triwulan II 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 4,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,37% (yoy). Komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi pada kelompok ini antara lain Bawang Merah, Ikan Cakalang, Beras, dan Ikan Tongkol. Keempat komoditas tersebut memiliki andil

inflasi tahunan masing-masing sebesar 0,27%; 0,20%; 0,15% dan 0,14%. Peningkatan harga pada komoditas hortikultura utamanya disebabkan oleh berakhirnya masa puncak panen produksi pada wilayah sentra lokal di tengah cuaca yang kurang kondusif sehingga Maluku bergantung dengan pengiriman dari luar wilayah. Sementara itu, peningkatan harga komoditas Ikan Tongkol sejalan dengan pola historis bulan Juni yang mengalami peningkatan gelombang laut sehingga menghambat aktivitas nelayan.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya masih mencatatkan inflasi meski tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kelompok ini mencatat inflasi sebesar 4,38% (yoy) pada triwulan laporan, melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,10% (yoy). Melambatnya tekanan inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh penurunan harga pada beberapa komoditas seperti Sabun Mandi, Popok Bayi Sekali



Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 2.5 Inflasi Kelompok Peralatan Pribadi dan Jasa Lainnya Provinsi Maluku

Pakai/Diapers, dan *Hand Body Lotion* dengan andil deflasi tahunan masing-masing mencapai 0,05%; 0,02%; dan 0,02%. Sementara itu, penurunan harga yang lebih dalam tertahan oleh komoditas Emas Perhiasan yang masih menjadi faktor pendorong inflasi secara tahunan dengan andil inflasi sebesar 0,50% meski lebih rendah dibandingkan posisi Triwulan I 2026 yang memiliki andil inflasi tahunan sebesar 1,14%.

2.3. PERKEMBANGAN INFLASI SPASIAL PROVINSI MALUKU

Secara umum, perhitungan inflasi Provinsi Maluku dilakukan berdasarkan gabungan realisasi IHK di Kota Ambon, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah sebagai kota sampel perhitungan inflasi di Provinsi Maluku. Pada Triwulan II 2026, realisasi inflasi Kota Ambon tercatat sebesar 3,78% (yoy) atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,19% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Maluku Tengah tercatat mengalami inflasi sebesar 3,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 3,44% (yoy). Selain itu, realisasi inflasi di Kota Tual mencatatkan inflasi yang tertinggi di wilayah Maluku sebesar 4,03% (yoy), meski cenderung melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,69% (yoy).

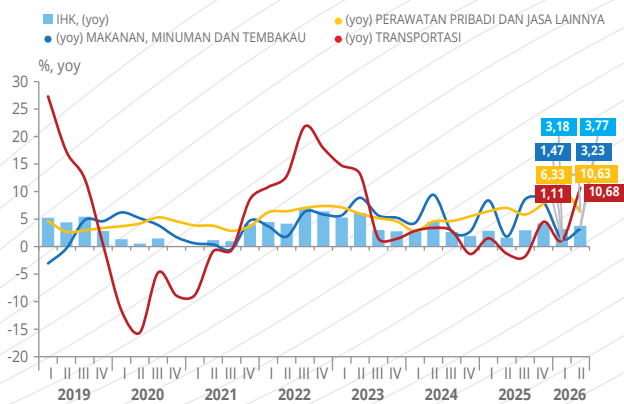
2.3.1. INFLASI KOTA AMBON

Pada Triwulan II 2026, inflasi di Kota Ambon tercatat sebesar 3,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi Triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 3,19% (yoy). Terjadinya inflasi pada periode laporan terutama disebabkan oleh tekanan pada Kelompok Transportasi pada triwulan laporan mencatatkan inflasi sebesar 10,68% (yoy), meningkat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I 2026 dengan inflasi sebesar 1,11% (yoy). Capaian inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh peningkatan tarif BBM Non Subsidi serta kebijakan pemerintah terkait perizinan maskapai dalam memungut biaya *fuel surcharge* hingga 50% dari tarif batas atas yang diberlakukan sejak Mei 2026 sehingga mendorong peningkatan tarif Angkutan Udara. berdasarkan komoditasnya,

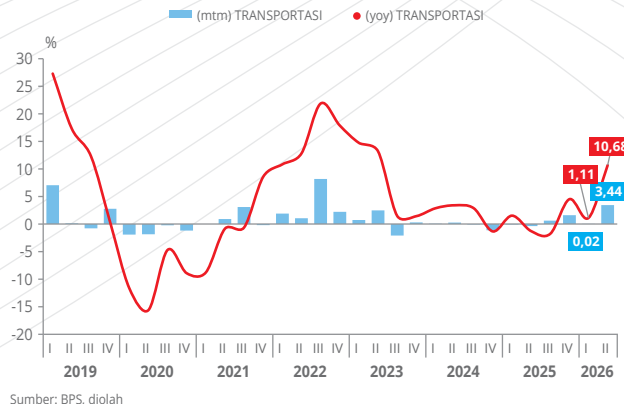
Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi Kota Ambon, Kab. Malteng, Kota Tual, Gabungan Kota di Provinsi Maluku, dan Nasional

Lingkup	2025												2026					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Maluku																		
Inflasi mtm (%)	(0,32)	(0,63)	1,71	0,09	0,80	0,97	0,26	(0,09)	(0,29)	(0,05)	0,28	0,81	0,75	0,59	(0,75)	(0,17)	0,93	1,49
Inflasi yoy (%)	0,76	1,33	3,55	3,35	2,24	1,88	2,99	3,25	3,01	2,30	2,33	3,58	4,70	5,98	3,40	3,13	3,27	3,80
Inflasi ytd (%)	(0,32)	(0,95)	0,75	0,84	1,64	2,64	2,91	2,81	2,51	2,46	2,75	3,58	0,75	1,34	0,58	0,41	1,34	2,85
Tual																		
Inflasi mtm (%)	(1,47)	0,38	1,40	1,31	1,47	1,41	0,60	(1,00)	(0,38)	(0,48)	0,16	0,51	2,35	(0,72)	0,37	0,64	0,46	1,51
Inflasi yoy (%)	(1,07)	(1,20)	0,21	1,36	0,80	1,85	3,52	2,96	2,95	1,26	3,53	3,93	7,97	6,77	5,69	4,99	3,93	4,03
Inflasi ytd (%)	(1,47)	(1,09)	0,30	1,61	3,11	4,57	5,19	4,14	3,74	3,24	3,41	3,93	2,35	1,61	1,99	2,64	3,11	4,66
Ambon																		
Inflasi mtm (%)	(0,74)	(0,44)	2,23	1,14	0,84	0,37	(0,40)	0,52	(0,75)	(0,05)	0,61	0,85	0,15	0,31	(0,43)	0,92	0,73	1,28
Inflasi yoy (%)	0,75	0,58	2,87	3,78	1,98	1,62	2,79	3,38	2,97	3,03	2,93	4,23	5,16	5,95	3,19	2,96	2,84	3,78
Inflasi ytd (%)	(0,74)	(1,17)	1,04	2,19	3,04	3,42	3,01	3,54	2,76	2,72	3,35	4,23	0,15	0,46	0,03	0,95	1,68	2,98
Maluku Tengah																		
Inflasi mtm (%)	0,46	(1,05)	0,97	(1,67)	0,63	1,89	1,23	(0,90)	0,44	(0,01)	(0,20)	0,79	1,44	1,19	(1,40)	(1,96)	1,34	1,82
Inflasi yoy (%)	1,02	2,85	5,07	2,96	2,84	2,31	3,23	3,08	3,08	1,33	1,24	2,56	3,56	5,91	3,44	3,13	3,87	3,80
Inflasi ytd (%)	0,46	(0,59)	0,37	(1,30)	(0,68)	1,19	2,44	1,52	1,96	1,96	1,75	2,56	1,44	2,66	1,23	(0,75)	0,58	2,41
Nasional																		
Inflasi mtm (%)	(0,76)	(0,48)	1,65	1,17	(0,37)	0,19	0,30	(0,08)	0,21	0,28	0,17	0,64	(0,15)	0,68	0,41	0,13	0,28	0,44
Inflasi yoy (%)	0,76	(0,09)	1,03	1,95	1,60	1,87	2,37	2,31	2,65	2,86	2,72	2,92	3,55	4,76	3,48	2,42	3,08	3,34
Inflasi ytd (%)	(0,76)	(1,24)	0,39	1,56	1,19	1,38	1,69	1,60	1,82	2,10	2,27	2,92	(0,15)	0,53	0,94	1,06	1,35	1,79

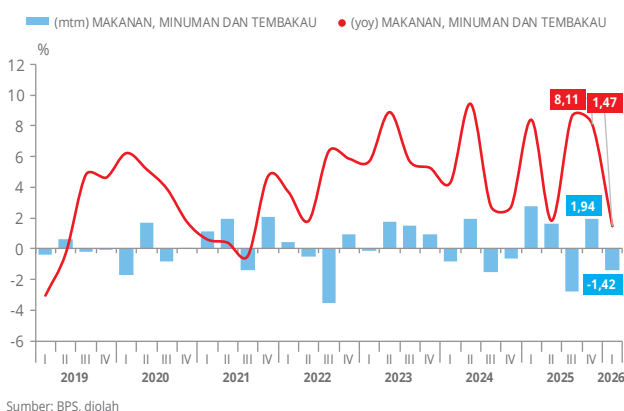
Sumber: BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku



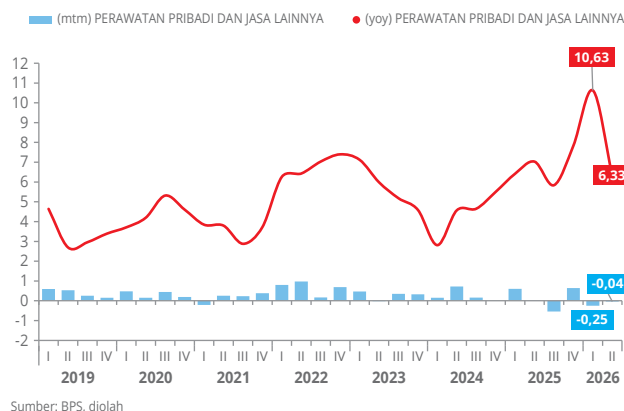
Grafik 2.6 Disagregasi Inflasi Kota Ambon



Grafik 2.8 Inflasi Kelompok Transportasi Kota Ambon



Grafik 2.7 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau Kota Ambon



Grafik 2.9 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Kota Ambon

tarif angkutan udara dan bensin mengalami peningkatan harga dengan andil inflasi tahunan masing-masing mencapai 1,11% dan 0,27%.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut mendorong peningkatan inflasi Kota Ambon. Kelompok tersebut memiliki capaian inflasi sebesar 3,23% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,47% (yoy). Berdasarkan komoditasnya, terjadinya inflasi di Kota Ambon utamanya disebabkan oleh peningkatan harga pada komoditas Bawang Merah dan Daging Ayam dengan andil inflasi tahunan masing-masing sebesar 0,25% dan 0,11%. Peningkatan harga komoditas pangan strategis didorong berakhirnya masa puncak panen komoditas hortikultura di tengah ketergantungan wilayah Maluku untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan dari luar Provinsi.

Lebih lanjut, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya masih tercatat mengalami inflasi meski cenderung melambat dibandingkan periode sebelumnya. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 6,33% (yoy) atau melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi relatif tinggi sebesar 10,63% (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan mulai melandainya tekanan harga emas global sehingga menahan peningkatan harga emas perhiasan.

2.3.2. INFLASI KOTA TUAL

Kota Tual masih mencatatkan inflasi pada Triwulan II 2026 meski tidak setinggi capaian triwulan sebelumnya. Inflasi Kota Tual pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan Triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 5,69% (yoy). Namun demikian,

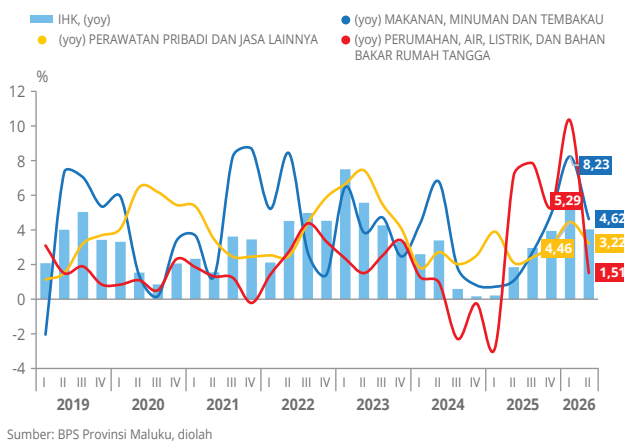
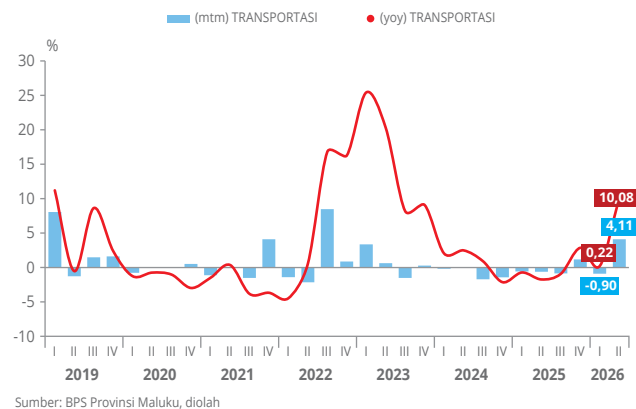
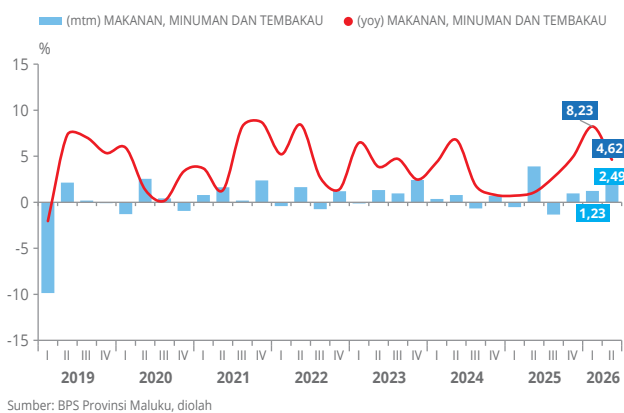
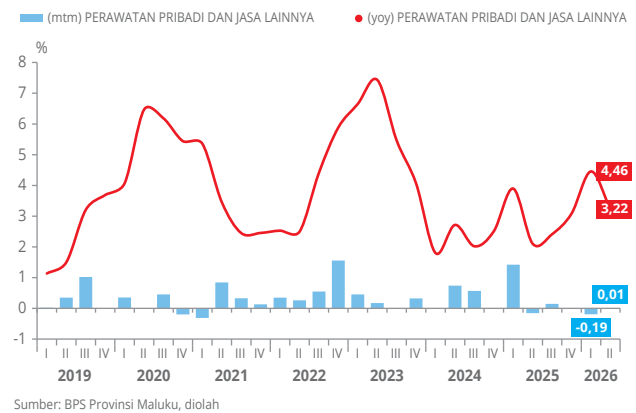
capaian tersebut berada di atas batas sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Adapun, capaian inflasi tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan harga yang terjadi pada Kelompok Transportasi di tengah masih berlanjutnya tekanan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Kelompok Transportasi pada Triwulan II 2026 mencatatkan inflasi sebesar 10,08% (yoy), meningkat dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,22% (yoy). Serupa dengan Kota Ambon, capaian tersebut utamanya didorong oleh peningkatan tarif BBM Non Subsidi serta kebijakan pemerintah terkait perizinan maskapai dalam memungut biaya *fuel surcharge* hingga 50% dari tarif batas atas yang diberlakukan sejak Mei 2026 sehingga mendorong peningkatan tarif Angkutan

Udara. berdasarkan komoditasnya, tarif angkutan udara dan bensin mengalami peningkatan harga dengan andil inflasi tahunan masing-masing mencapai 0,88% dan 0,29%.

Sementara itu, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan inflasi sebesar 4,62% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,23% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas ikan pelagis yang dipengaruhi oleh menurunnya produktivitas perikanan akibat gelombang laut yang berada pada level tinggi sehingga memengaruhi produktivitas nelayan dalam melaut. Komoditas Ikan Layang memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,88%.

Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga masih mencatatkan inflasi sebesar


Grafik 2.10 Disagregasi Inflasi Kota Tual

Grafik 2.12 Inflasi Komponen Transportasi Kota Tual

Grafik 2.11 Inflasi Komponen Makanan, Minuman & Tembakau Kota Tual

Grafik 2.13 Inflasi Komponen Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Kota Tual

3,22% (yoy), melambat dibandingkan Triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,46% (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan deflasi komoditas sabun mandi dengan andil deflasi tahunan sebesar 0,08%. Kondisi tersebut sejalan dengan mulai melandainya tekanan harga emas global sehingga menahan peningkatan harga emas perhiasan.

2.3.3. INFLASI KABUPATEN MALUKU TENGAH

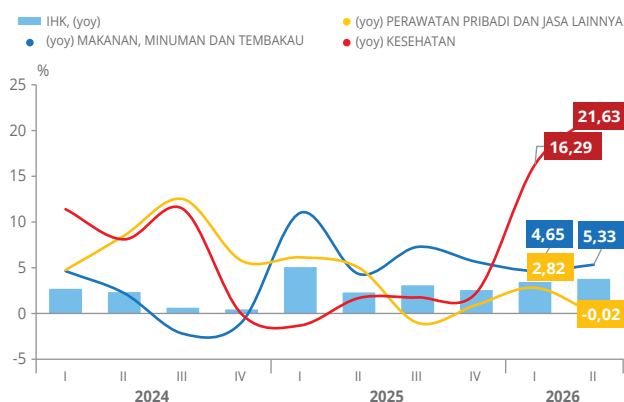
Inflasi tahunan Kabupaten Maluku Tengah pada Triwulan II 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Inflasi Kabupaten Maluku Tengah pada triwulan laporan tercatat 3,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 3,44% (yoy). Struktur inflasi masih didominasi oleh tekanan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta adanya inflasi yang cukup signifikan pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan Kelompok Kesehatan.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi salah satu penyebab peningkatan capaian inflasi Kabupaten Maluku Tengah. Pada triwulan laporan, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 5,33% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I 2026 sebesar 4,65% (yoy). Inflasi di Kabupaten Maluku Tengah utamanya disebabkan oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas hortikultura dan ikan pelagis antara lain Ikan Cakalang, Ikan Layang, Ikan Tongkol, dan Bawang Merah yang memiliki andil inflasi tahunan masing-masing sebesar 0,60%; 0,56%; 0,42%; dan 0,34%. Peningkatan harga komoditas pangan strategis tersebut didorong oleh faktor cuaca yang kurang kondusif serta tingginya gelombang laut di tengah berakhirnya masa puncak panen komoditas hortikultura. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komoditas pertanian dan perikanan memiliki pengaruh yang besar pada dinamika inflasi Maluku Tengah.

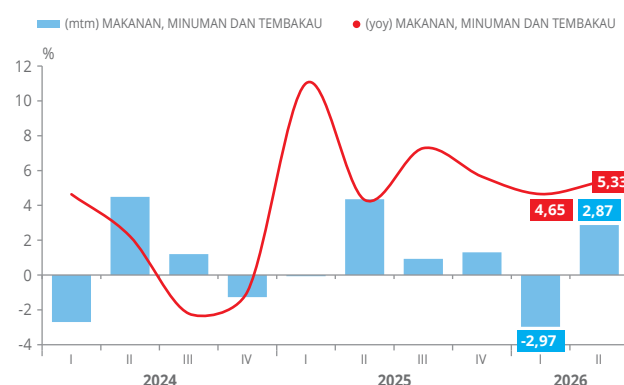
Selain itu, Kelompok Transportasi mengalami inflasi dengan capaian sebesar 7,11% (yoy), mengalami perubahan arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,68% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh adanya peningkatan tarif BBM Non-Subsidi sehingga meningkatkan harga komoditas bensin dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,43%.

Sementara itu, Kelompok Kesehatan kembali mencatatkan inflasi yang relatif tinggi dengan capaian sebesar 21,63% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan I 2026 yang mengalami inflasi sebesar 16,29% (yoy). Capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan Tarif Rawat Inap Rumah Sakit dan biaya Obat-obatan seiring dengan peningkatan biaya operasional rumah sakit dan harga bahan baku obat yang didatangkan dari luar daerah.



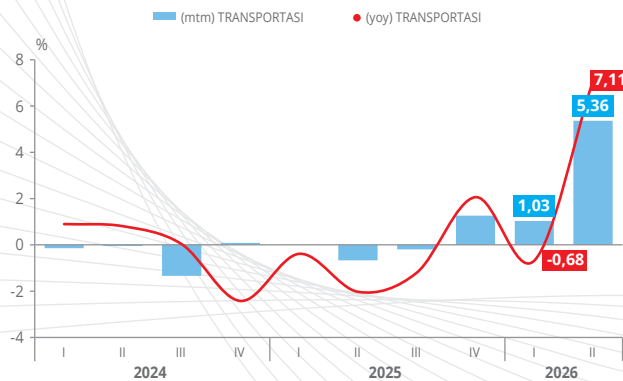
Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 2.14 Disagregasi Inflasi Kab. Maluku Tengah

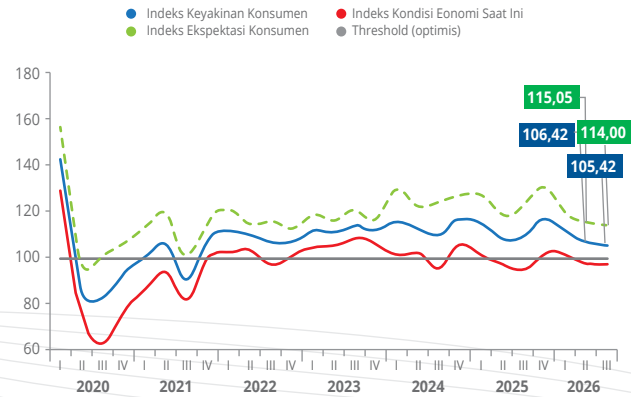


Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 2.15 Inflasi Komponen Makanan, Minuman & Tembakau Kab. Maluku Tengah



Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 2.16 Inflasi Komponen Transportasi Kab. Maluku Tengah

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.18 Perkembangan Survei Konsumen

Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 2.17 Inflasi Komponen Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Kab. Maluku Tengah

2.4. TRACKING REALISASI IHK PROVINSI MALUKU TRIWULAN III 2026

Pada Triwulan III 2026, tekanan inflasi Maluku diperkirakan masih tetap berlanjut meskipun cenderung melambat dan berada dalam rentang sasaran target inflasi 2026 sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Tekanan inflasi Triwulan III 2026 diperkirakan bersumber dari sisi permintaan, khususnya pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring peningkatan konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan berbagai kegiatan momen perayaan sosial ditengah keterbatasan pasokan dari dalam daerah. Selain itu, risiko peningkatan harga komoditas beras di Maluku masih perlu diwaspadai seiring baru dimulainya periode Panen Raya II, sehingga pasokan domestik belum sepenuhnya mampu

memenuhi kebutuhan. Tekanan inflasi Maluku juga didorong oleh perkiraan menguatnya daya beli Masyarakat pada Tahun 2026. Hal tersebut sejalan dengan telah ditetapkan penyediaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku yang meningkat sebesar 6,10% (yoy).

Dari sisi permintaan, hasil Survei Konsumen (SK) Triwulan III 2026 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya namun masih berada pada zona optimis dengan capaian **105,42**. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada triwulan laporan tercatat sebesar **114,00**, masih berada pada level optimis meski sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan keyakinan dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap kuat.

Potensi peningkatan permintaan pada Triwulan III 2026 diperkirakan masih dapat diimbangi oleh ketersediaan pasokan pangan yang relatif terjaga. Kondisi tersebut didorong oleh adanya berbagai program penguatan ketahanan pangan, seperti peningkatan LTT, program cetak sawah di Maluku Tengah dan Pulau Seram, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian, serta penguatan pangan lokal. Berbagai program tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi dan menjaga keberlanjutan peningkatan produksi pasokan pangan daerah. Selain itu, kondisi gelombang laut dan cuaca yang diperkirakan

mulai kondusif pada beberapa wilayah perairan di Maluku berpotensi meningkatkan optimalisasi produksi komoditas perikanan dan mendorong kelancaran distribusi pasokan.

Namun demikian, sejumlah risiko pasokan masih perlu diantisipasi guna mendukung pengendalian inflasi pada Triwulan III 2026. Tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah Maluku tetap menjadi risiko tekanan inflasi khususnya komoditas pangan, ditengah potensi peningkatan permintaan masyarakat dan belum optimalnya pasokan domestik pada beberapa komoditas. Lebih lanjut, dinamika faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global juga masih mendorong kenaikan harga emas yang memengaruhi tekanan inflasi pada komoditas Emas Perhiasan. Sejalan dengan prakiraan di atas, realisasi inflasi secara bulanan pada awal Triwulan III 2026 (Juli 2026) masih relatif terkendali.

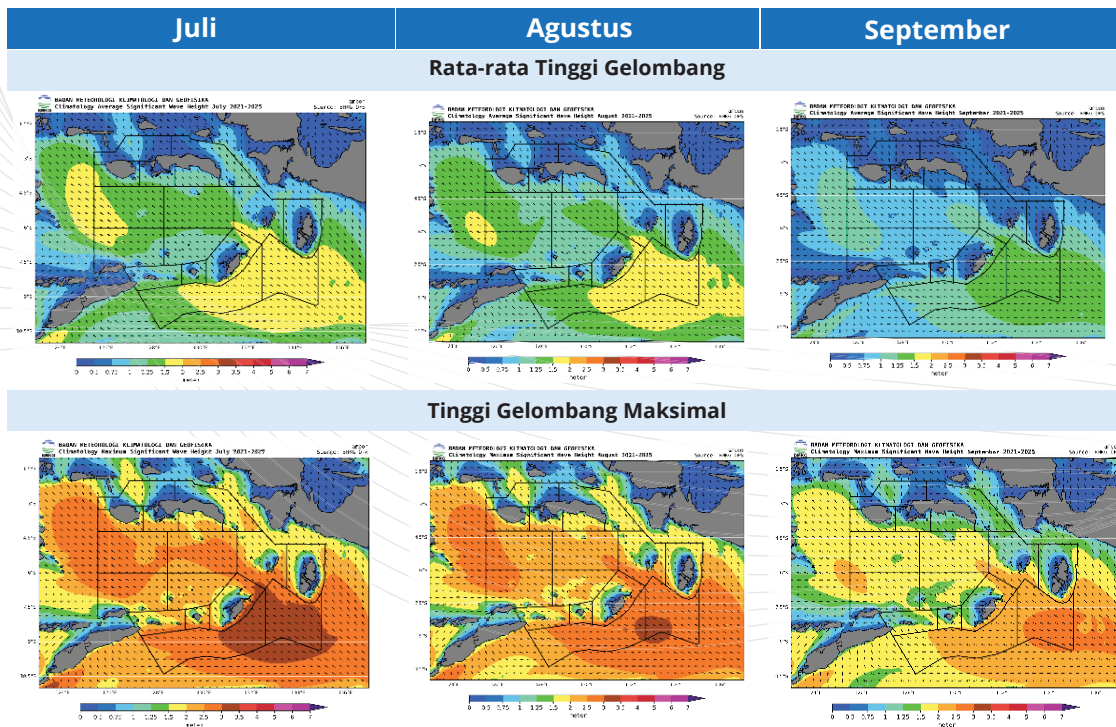
Pada Juli 2026, Provinsi Maluku tercatat mengalami deflasi sebesar 0,75% (mtm), melandai dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,49% (mtm). Realisasi deflasi Juli 2026 didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil deflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,71% dan 0,06%. Deflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau bersumber dari penurunan harga komoditas ikan pelagis kecil, antara lain Ikan Layang, Ikan Selar dan Ikan Tuna dengan andil deflasi bulanan masing-masing sebesar 0,26%, 0,15%, dan 0,05%, didorong oleh kondisi cuaca yang relatif kondusif serta pemanfaatan rumpon di perairan pesisir yang mendukung peningkatan hasil tangkapan nelayan skala kecil. Kemudian, capaian deflasi juga didorong oleh penurunan harga komoditas hortikultura, yaitu Bawang Merah dan Tomat dengan andil deflasi bulanan masing-masing sebesar 0,16% dan 0,11% seiring berlangsungnya masa panen di beberapa daerah sentra produksi serta meningkatnya pasokan yang berasal dari daerah luar Provinsi Maluku. Selain itu, realisasi deflasi Juli 2026 yang turut didorong oleh

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dipengaruhi oleh harga Emas Perhiasan yang mengalami penurunan seiring dengan koreksi harga emas global dengan andil deflasi bulanan sebesar 0,07%.

Namun demikian, realisasi deflasi yang lebih dalam pada Juli 2026 tertahan oleh capaian inflasi Kelompok Transportasi dengan andil inflasi (mtm) sebesar 0,20%. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga Bensin dengan andil inflasi bulanan sebesar 13% seiring penyesuaian harga BBM Non-subsidi pada 1 Juli 2026. Sementara itu, inflasi kelompok Transportasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi Tarif Angkutan Udara dan Tarif Angkutan Laut dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,09% dan 0,06% seiring pemberlakuan diskon tarif transportasi dalam menyambut periode liburan pada Juli 2026.

2.4.1. TRACKING INFLASI KELOMPOK MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diperkirakan tetap akan memberikan tekanan inflasi pada Triwulan III 2026, terutama dipengaruhi oleh faktor perayaan sejumlah momen sosial seperti perayaan wisuda mahasiswa, HUT Kota Ambon maupun HUT Provinsi Maluku pada Triwulan III 2026 serta sejumlah festival budaya lainnya yang berpotensi memperkuat daya beli masyarakat serta meningkatkan permintaan terhadap kelompok ini. Sementara itu, curah hujan wilayah Provinsi Maluku pada Triwulan III cenderung lebih rendah di sejumlah wilayah seiring memasuki periode musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas dan kontinuitas pasokan komoditas pangan, sehingga dapat meningkatkan risiko keterbatasan pasokan di pasar. Di sisi lain, capaian inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang lebih tinggi berpotensi tertahan seiring adanya perbaikan kinerja subsektor tanaman pangan melalui implementasi program swasembada pangan yang diharapkan dapat turut menjaga



Sumber: BMKG

Grafik 2.19 Rata-Rata Tinggi Gelombang Provinsi Maluku 5 Tahun Sebelumnya

stabilitas pasokan dan mendorong keberlanjutan peningkatan produksi pangan daerah. Lebih lanjut, pada pertengahan Agustus 2026, stok beras Bulog tercatat tersedia sebanyak 17.361 ton beras medium dan 165 ton beras premium dan diperkirakan mencukupi permintaan untuk lima bulan ke depan. Kondisi tersebut turut didukung oleh penyaluran bantuan pangan dan upaya penguatan penyerapan gabah/beras domestik, sehingga diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tengah periode musim kemarau.

2.4.2. TRACKING INFLASI KELOMPOK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA

Capaian inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya diperkirakan masih sangat dipengaruhi oleh dinamika pergerakan harga emas global yang hingga saat ini menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada Agustus 2026, harga emas tercatat kembali meningkat seiring pelemahan dolar AS dan meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, ditengah ketidakpastian global dan

tekanan geopolitik yang terus berlanjut. Kondisi tersebut berpotensi mendorong peningkatan harga emas perhiasan dan memberikan tekanan terhadap inflasi Kelompok ini di Maluku pada Triwulan III 2026.

2.4.3. TRACKING INFLASI KELOMPOK TRANSPORTASI

Pada Triwulan III 2026, Kelompok Transportasi diperkirakan mengalami inflasi lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan *fuel surcharge* angkutan udara hingga 50% dan tarif batas atas berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026. Tekanan inflasi juga diperkirakan berasal dari penyesuaian harga sejumlah BBM, terutama Dexcelite, Pertamina Dex, dan Pertamina Turbo. Namun demikian, penurunan harga avtur diperkirakan dapat menurunkan biaya operasional maskapai sehingga berpotensi menahan tekanan inflasi kelompok ini khususnya pada Tarif Angkutan Udara.

2.5. KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI DI PROVINSI MALUKU

Pada Triwulan II 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bersama Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui TPID Provinsi Maluku terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui pelaksanaan berbagai program strategis dalam kerangka 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif. Upaya tersebut difokuskan pada stabilisasi harga dan penguatan pasokan komoditas pangan utama sebagai respons terhadap dinamika harga serta untuk menjaga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional.

Dalam aspek Ketersediaan Pasokan, dilakukan pemantauan ketersediaan stok pangan di seluruh Kabupaten/Kota wilayah Maluku untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Selain itu, terdapat kegiatan panen perdana padi oleh 4 (empat) kelompok tani di Kabupaten Maluku Barat Daya, Penyerahan Benih Hortikultura kepada kelompok petani di Kota Tual, serta program percepatan tanam dan hilirisasi di wilayah Maluku dalam rangka mendorong produksi komoditas pertanian dan peningkatan nilai tambah petani.

Dalam rangka menjaga Kelancaran Distribusi, TPID melakukan Rapat Koordinasi TPID bersama BUMN, BUMD, dan Distributor dalam rangka pengamanan stok, menjaga stabilitas harga, dan memastikan kelancaran pasokan serta Kerja Sama TPID dengan PT ASDP untuk optimalisasi layanan penyeberangan ASDP dalam mendukung kelancaran distribusi bahan pangan antarwilayah Maluku.

Pada aspek Keterjangkauan Harga, TPID bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan stabilisasi harga melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) di tingkat Provinsi, operasi pasar, serta pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok secara berkala bersama Satgas Pangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan harga bahan pokok tetap terkendali di tingkat konsumen.

Sementara itu, pada aspek Komunikasi Efektif, dilakukan Rapat Koordinasi TPID di tingkat Kota maupun Provinsi secara berkala untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi. Selain itu, informasi perkembangan harga dan imbauan belanja bijak juga masih terus disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak, *billboard*, dan media sosial guna mendorong perilaku konsumsi yang bijak serta meningkatkan literasi masyarakat.

Tabel 2.4 Kegiatan TPID Provinsi Maluku Hingga Triwulan II 2026

Triwulan II - 2026			
No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
1	Operasi Pasar	TPID Provinsi Maluku	Kegiatan Operasi Pasar yang dilaksanakan di beberapa lokasi dengan menyalurkan 2.359 paket sembako bersubsidi.
2	Gerakan Pangan Murah	TPID Provinsi Maluku	Kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM) dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pasca HBKN Idul Fitri 2026 dan menjelang HBKN Idul Adha 2026.
3	Pemantauan Ketersediaan Stok Pangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku	Pemantauan harga dan stok pangan di 11 Kabupaten/Kota untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan tidak terjadi penimbunan.
4	Rapat Koordinasi TPID bersama BUMN, BUMD, dan Distributor	TPID Provinsi Maluku	Koordinasi Pemerintah Daerah bersama BUMN/BUMD/Distributor untuk pengamanan stok, menjaga stabilitas harga, dan memastikan kelancaran pasokan.
5	Kampanye Komunikasi Publik	TPID Provinsi Maluku	Pelaksanaan kampanye komunikasi pengendalian inflasi melalui media radio, billboard, dan media sosial untuk mendorong perilaku konsumsi bijak dan peningkatan literasi masyarakat.
6	Pemantauan Harga Pangan	TPID Kota Ambon	Penyediaan display informasi harga pangan secara digital di Pasar Mardika Kota Ambon guna meningkatkan transparansi harga serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan.

Tabel 2.4 Kegiatan TPID Provinsi Maluku Hingga Triwulan II 2026 Lanjutan

Triwulan II - 2026			
No	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
7	Pelaksanaan panen perdana padi di Kab. MBD	Pemerintah Desa Naumatang dan Kelompok Tani	Panen perdana padi ladang bersama 4 kelompok tani di Desa Naumatang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten MBD, dalam rangka memperkuat ketersediaan pangan lokal dan mendorong Wetar Utara sebagai lumbung pangan daerah.
8	Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).	Kelompok Demplot Desa Seriholo	Panen perdana cabai melalui Program TEKAD di Desa Seriholo, Kecamatan Amalatu, Kabupaten SBB, sebagai upaya meningkatkan produksi dan ketersediaan pasokan cabai lokal.
9	Penyerahan benih hortikultura kepada 4 kelompok tani	TPID Kota Tual	Penyerahan benih hortikultura kepada 4 Kelompok Tani di Kota Tual guna mendukung pemanfaatan lahan pekarangan, pengendalian inflasi, peningkatan daya beli masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.
10	Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng	Perum Bulog Kanwil Maluku Malut	Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 266.500 KK di 11 kabupaten/kota se-Maluku oleh Perum BULOG Kanwil Maluku dan Maluku Utara, sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pangan, dan daya beli masyarakat.
11	Percepatan Tanam dan Hilirisasi	TPID Provinsi Maluku	Upaya percepatan masa tanam, penguatan sistem pemasaran hasil pertanian, serta pengembangan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas pasokan dan harga.
12	Rapat Koordinasi dan Evaluasi TPID Provinsi Maluku	TPID Maluku	Evaluasi perkembangan inflasi dan koordinasi langkah pengendalian inflasi Provinsi Maluku.
13	Serapan Gabah/Beras BULOG	TPID Provinsi Maluku	Realisasi serapan BULOG Maluku sebesar 3.188 ton setara beras hingga Juni 2026 sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan.
14	Program Mandiri Benih	BRMP Maluku dan BBPPTP Ambon	Monitoring pelaksanaan Program Mandiri Benih di SBB untuk memastikan ketersediaan benih dan mendukung keberlanjutan produksi pertanian.
15	Optimalisasi layanan penyeberangan Khusus Bahan Pangan	TPID Provinsi Maluku dan PT ASDP	Optimalisasi layanan penyeberangan ASDP dalam mendukung kelancaran distribusi bahan pangan antarwilayah guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Sumber: TPID Provinsi, Kabupaten/Kota di Maluku



BAB 3

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM



3.1. GAMBARAN UMUM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Maluku Triwulan II 2026 tumbuh kuat tercermin dari pertumbuhan penyaluran kredit yang positif.

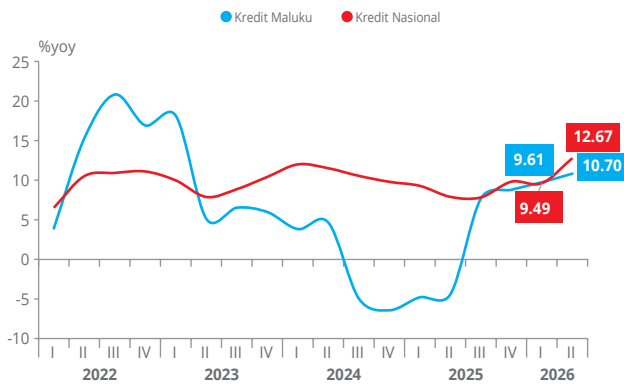
Penyaluran kredit di Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 10,70% (yoy), meningkat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,61% (yoy). Pertumbuhan penyaluran kredit yang kuat ini didorong oleh pertumbuhan kinerja Kredit Konsumsi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Maluku yang masih terjaga dalam level positif. Secara spasial, penyaluran kredit pada mayoritas kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan positif, dengan pangsa tertinggi berada di Kota Ambon. Berdasarkan sektornya, pertumbuhan kinerja kredit pada triwulan ini terutama didorong oleh Sektor Konstruksi, Sektor Pertanian, dan Sektor Lainnya.

Penyaluran kredit yang tumbuh positif diikuti dengan risiko kredit yang terjaga baik.

Pada Triwulan II 2026, tingkat risiko kredit Maluku masih berada di level yang relatif baik dengan *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 4,09%, meskipun cenderung meningkat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,25%, namun masih berada di bawah *threshold* sebesar 5%. Risiko kredit pada sektor ekonomi utama di Maluku seperti Sektor Pertanian juga terjaga relatif baik. Meskipun demikian, terdapat sektor lain yang memiliki NPL yang relatif pada Triwulan I 2026, yaitu Sektor Konstruksi dan Sektor Industri Pengolahan.

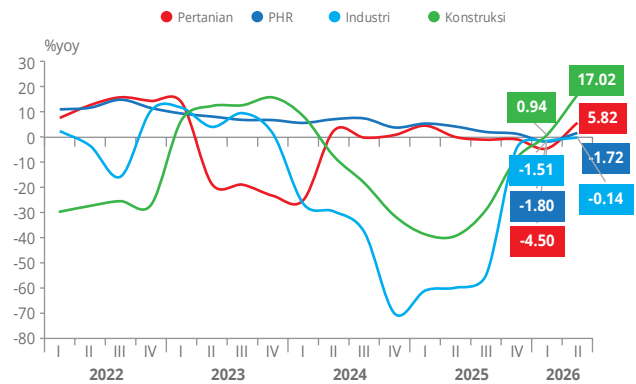
Dari sisi pendanaan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tetap tumbuh melandai dibandingkan triwulan sebelumnya.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh positif sebesar 4,54% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan Triwulan I 2026



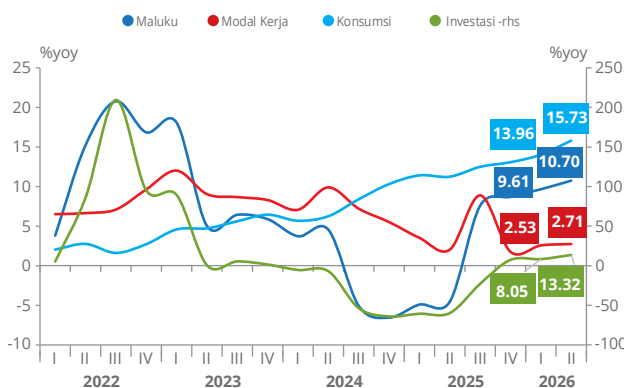
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1 Perkembangan Kredit Maluku dan Nasional



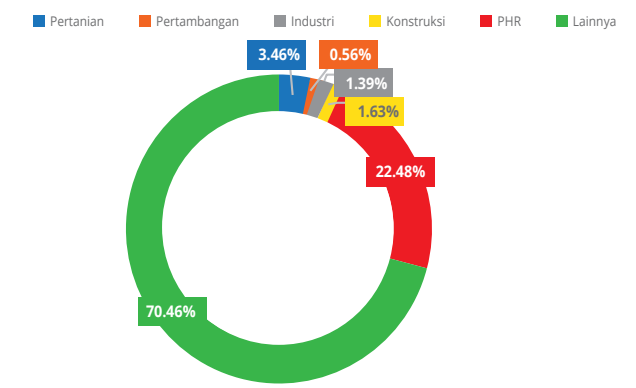
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3 Perkembangan Kredit Sektoral Maluku



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Kredit Maluku Berdasarkan Penggunaannya



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.4 Pangsa Kredit Berdasarkan Sektor

yang tumbuh sebesar 5,17% (yoy). Adapun, penurunan penghimpunan DPK bersumber dari DPK jenis Giro yang mengalami kontraksi sebesar 1,91% (yoy). Berdasarkan pangsa, DPK di Provinsi Maluku didominasi oleh Tabungan dengan pangsa mencapai 63,66% dari total penghimpunan dana.

3.2. PERKEMBANGAN STABILITAS KEUANGAN DAERAH

3.2.1. PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT DAN DANA PIHAK KETIGA

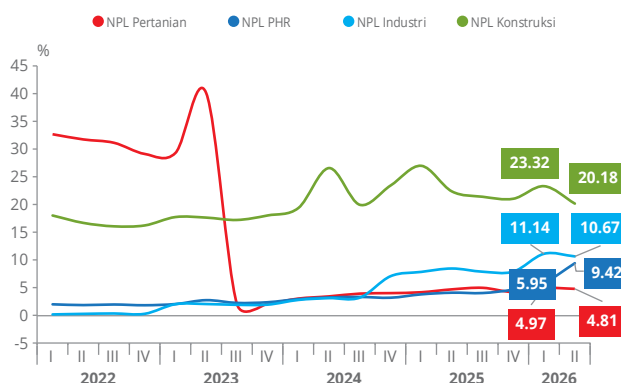
Stabilitas Sistem Keuangan di Provinsi Maluku tetap terjaga pada Triwulan II 2026, tercermin dari meningkatnya kinerja intermediasi perbankan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, penyaluran kredit Provinsi Maluku tumbuh 10,70% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 9,61% (yoy), meskipun masih berada di bawah pertumbuhan kredit nasional yang mencapai 12,67% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan penyaluran kredit didorong oleh pertumbuhan yang tetap positif pada seluruh kategori, yaitu Kredit Konsumsi, Kredit Investasi, dan Kredit Modal Kerja. Di sisi lain, risiko kredit tetap terjaga dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 4,09%, masih berada di bawah ambang batas aman sebesar 5%. Kondisi tersebut mencerminkan kualitas kredit yang tetap baik serta mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan di Provinsi Maluku.

3.2.1.1. Kinerja Penyaluran Kredit Sektoral di Provinsi Maluku

Penyaluran kredit di Provinsi Maluku terus membaik sejalan dengan masih positifnya kinerja sektor-sektor ekonomi utama. Pada Triwulan II 2026, penyaluran kredit pada Sektor Konstruksi mengalami akselerasi yang signifikan dengan pertumbuhan sebesar 17,02% (yoy),

meningkat dari 0,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, penyaluran kredit pada Sektor Pertanian serta Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran juga menunjukkan perbaikan kinerja, masing-masing tumbuh sebesar 5,82% (yoy) dan 1,72% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 4,50% (yoy) dan 1,80% (yoy). Di sisi lain, penyaluran kredit pada Sektor Industri Pengolahan masih mengalami kontraksi sebesar 0,14% (yoy) pada triwulan laporan. Meskipun demikian, capaian tersebut relatif lebih baik dari Triwulan I 2026 yang terkontraksi sebesar 1,51% (yoy).

Catatan positif kredit sektor ekonomi utama turut diiringi oleh risiko kredit yang tetap terjaga pada batas aman. Tingkat NPL pada sektor ekonomi utama seperti Sektor Pertanian masih relatif terjaga sebesar 4,81% atau masih berada di sekitar ambang batas aman 5%. Sementara itu, NPL pada Sektor Konstruksi dan Sektor Industri Pengolahan masih berada di atas ambang batas, masing-masing sebesar 20,18% dan 10,67%. Meskipun demikian, kedua sektor tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, ketika NPL tercatat sebesar 23,32% dan 11,14%. Secara keseluruhan, risiko kredit di Provinsi Maluku tetap terjaga, tercermin dari rasio NPL agregat sebesar 4,09% yang masih berada di bawah ambang batas 5%, sehingga mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan di daerah.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

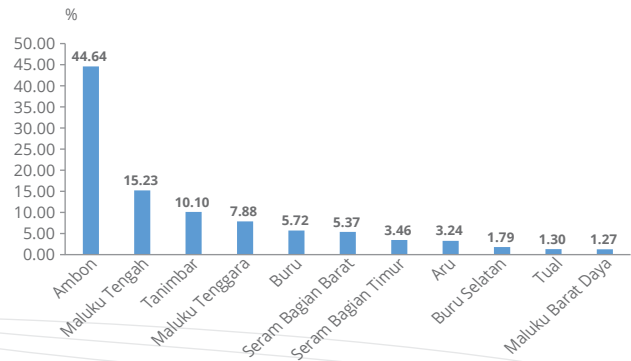
Grafik 3.5 Perkembangan NPL Berdasarkan Sektor

3.2.1.2. Kinerja Penyaluran Kredit Spasial

Secara spasial, membaiknya kinerja kredit di Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 didukung oleh capaian positif penyaluran kredit pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Beberapa kabupaten/kota yang mencatatkan peningkatan kinerja kredit dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru Selatan. Adapun kabupaten/kota lainnya yang mengalami pertumbuhan positif, meski cenderung melambat dibandingkan triwulan sebelumnya antara lain Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pertumbuhan penyaluran kredit tertinggi dialami oleh Kabupaten Buru Selatan sebesar 138,38% (yoy), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang masing-masing tumbuh sebesar 32,51% (yoy) dan 26,96% (yoy).

Berdasarkan nominalnya, penyaluran kredit masih terkonsentrasi di Kota Ambon. Pada Triwulan II 2026, Kota Ambon memiliki pangsa mencapai 44,64% dari total penyaluran kredit. Besarnya pangsa penyaluran kredit di Kota Ambon tidak terlepas dari peran kota tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi di Maluku. Sebaliknya, porsi penyaluran kredit terendah bersumber



Sumber: Bank Indonesia, diolah

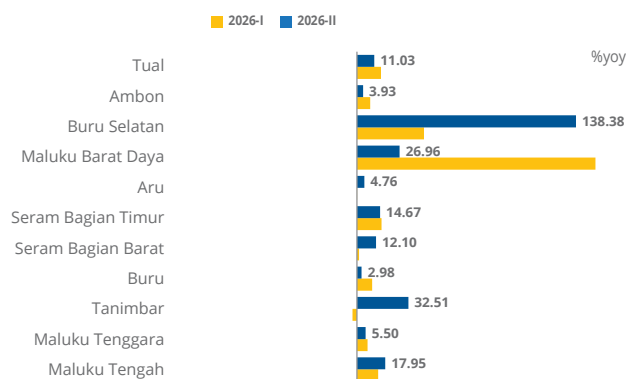
Grafik 3.7 Pangsa Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Maluku

dari Kabupaten Maluku Barat Daya yang memiliki pangsa sebesar 1,27%, relatif menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,47%.

3.2.1.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Maluku

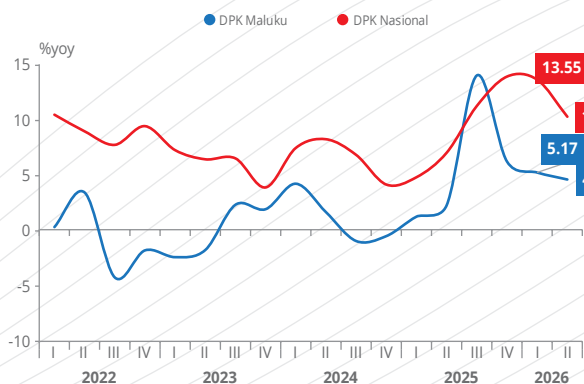
Dana Pihak Ketiga (DPK) di Provinsi Maluku tetap menunjukkan pertumbuhan meskipun melandai. Pada Triwulan II 2026, penghimpunan DPK Maluku tumbuh positif sebesar 4,54% (yoy), meski melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,17% (yoy). Capaian tersebut berada di bawah pertumbuhan DPK Nasional sebesar 10,21% (yoy). Penurunan penghimpunan DPK disebabkan oleh penurunan yang cukup dalam salah satu pembentuknya yaitu Giro yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,91% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 1,04% (yoy). Berdasarkan pangsa, DPK di Provinsi Maluku didominasi oleh Tabungan dengan pangsa mencapai 63,66%. Diikuti dengan Deposito dan Giro yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 23,15% dan 13,20%.

Berdasarkan golongan nasabah, DPK di Provinsi Maluku masih didominasi oleh nasabah perseorangan. Pada Triwulan II 2026, pangsa DPK perseorangan mencapai 77,78% dari total DPK di Provinsi Maluku, disusul oleh korporasi



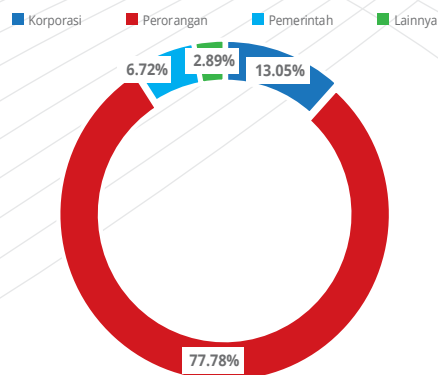
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.6 Pertumbuhan Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Maluku



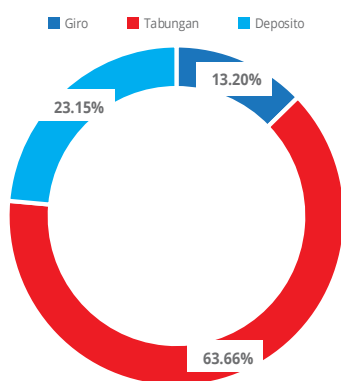
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.8 Perkembangan DPK Maluku dan Nasional



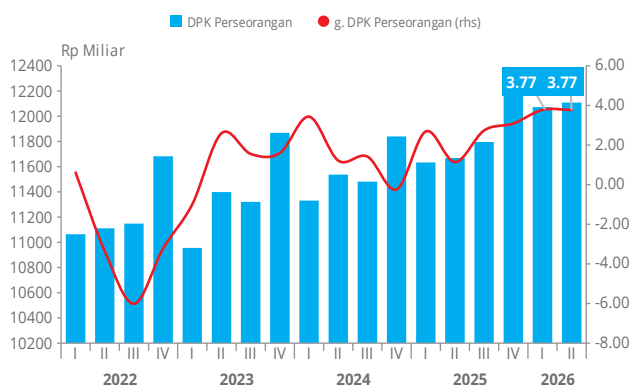
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.11 Pangsa DPK Maluku Berdasarkan Golongan Nasabah



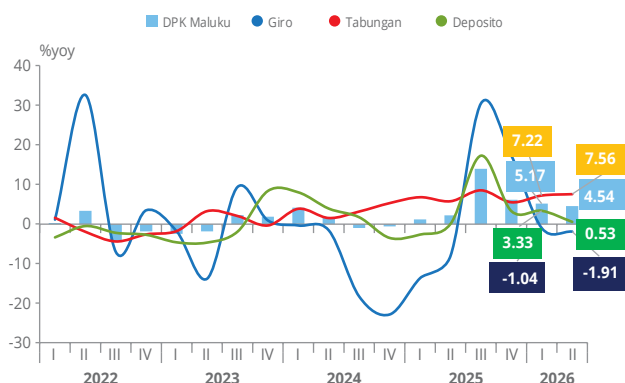
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.9 Pangsa DPK Maluku Berdasarkan Sumbernya



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.12 Perkembangan DPK Perseorangan Maluku



Sumber: Bank Indonesia, diolah

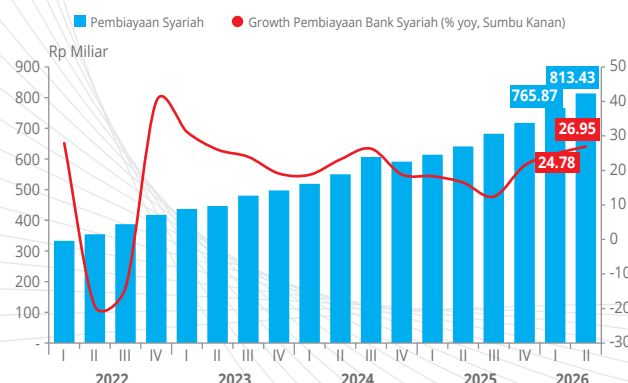
Grafik 3.10 Perkembangan DPK Maluku Berdasarkan Sumber

dan pemerintah. Tingginya DPK perseorangan terutama didorong oleh jumlah Tabungan yang dimiliki perseorangan. Adapun pada Triwulan II 2026, penghimpunan DPK perseorangan tumbuh sebesar 3,77% (yoy), relatif tidak berubah dari triwulan sebelumnya yang juga tumbuh sebesar

3,77% (yoy). Terjaganya tingkat DPK Peserorangan sejalan dengan melandainya puncak konsumsi masyarakat di tengah terdapatnya realisasi gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara yang berpotensi menambah dana pihak ketiga di perbankan.

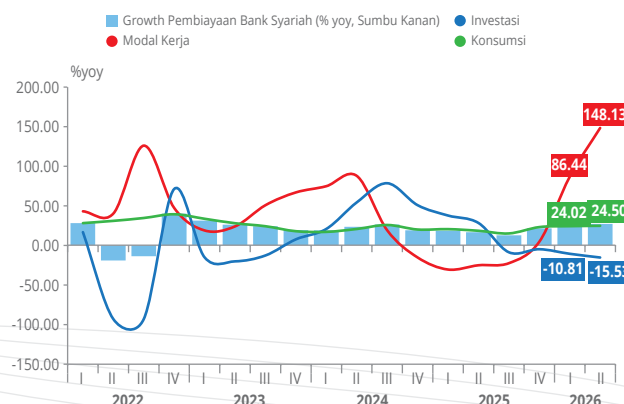
3.2.2. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DAN DANA PIHAK KETIGA SYARIAH

Kinerja penyaluran Pembiayaan Syariah pada Triwulan II 2026 menunjukkan pertumbuhan. Pembiayaan Syariah tumbuh sebesar 26,95% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 24,78% (yoy). Pangsa Pembiayaan Syariah tercatat sebesar 3,92% terhadap total penyaluran kredit/ pembiayaan di Provinsi Maluku, angka ini juga menunjukkan kenaikan dari triwulan sebelumnya sebesar 3,78%. Berdasarkan jenis penggunaan,



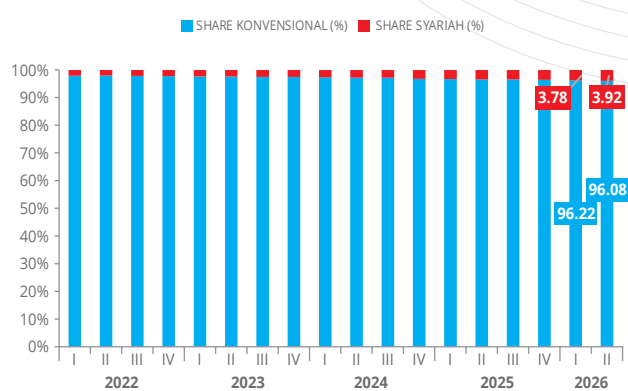
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.13 Perkembangan Pembiayaan Syariah Maluku



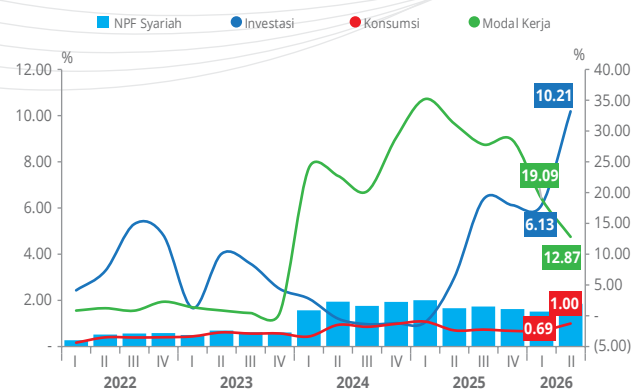
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.15 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.14 Perkembangan Pangsa Pembiayaan Syariah Maluku



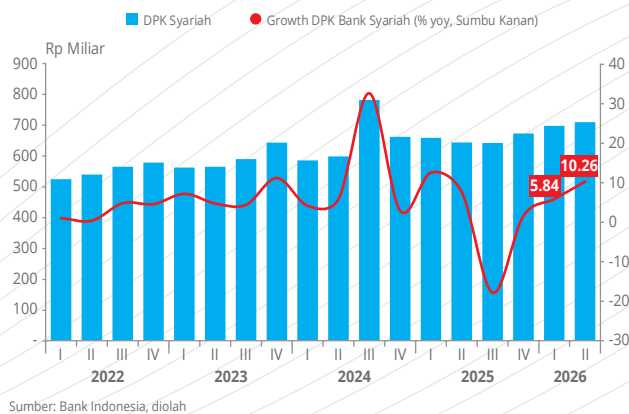
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.16 Perkembangan NPF Maluku Berdasarkan Penggunaannya

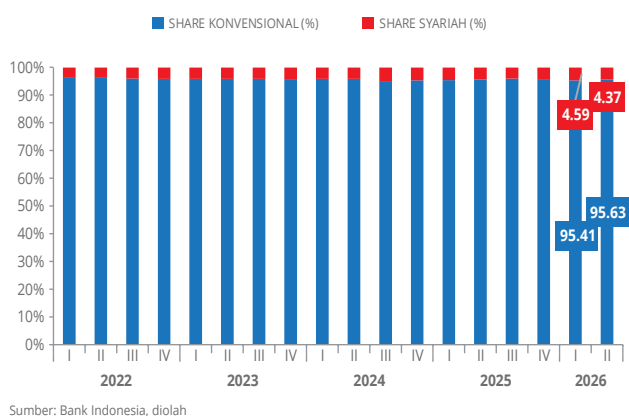
pertumbuhan Pembiayaan Syariah tertinggi berasal dari pembiayaan modal kerja yang tumbuh kuat sebesar 148,13% (yoy), diikuti dengan pembiayaan konsumsi yang tumbuh sebesar 24,50% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan investasi mengalami kontraksi sebesar 15,53% (yoy).

Kinerja pembiayaan syariah di Provinsi Maluku tercermin dari perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) yang masih berada pada level relatif terjaga, meskipun mengalami peningkatan pada Triwulan II 2026. Tingkat NPF tercatat sebesar 1,85%, lebih tinggi dibandingkan Triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 1,52%. Meskipun meningkat, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa risiko pembiayaan syariah

secara umum berada pada level yang relatif rendah. Berdasarkan jenis penggunaannya, NPF pembiayaan konsumsi tetap terjaga pada level rendah, yaitu sebesar 1,00%. Sementara itu, NPF pembiayaan modal kerja, meskipun masih tergolong tinggi, menunjukkan perbaikan dengan menurun menjadi 12,87% dari 19,09% pada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, NPF pembiayaan investasi mengalami peningkatan menjadi 10,21%, lebih tinggi dibandingkan 6,13% pada Triwulan I 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa risiko pembiayaan syariah masih terkonsentrasi pada segmen pembiayaan produktif, khususnya investasi, sehingga perlu terus dicermati untuk menjaga kualitas pembiayaan ke depan.



Grafik 3.17 Perkembangan DPK Syariah Maluku

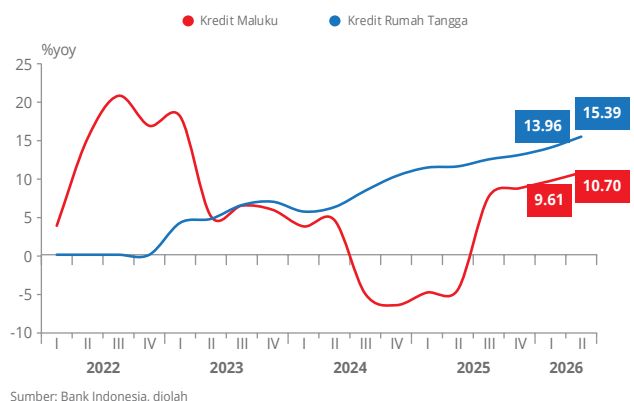


Grafik 3.18 Perkembangan DPK Syariah Maluku

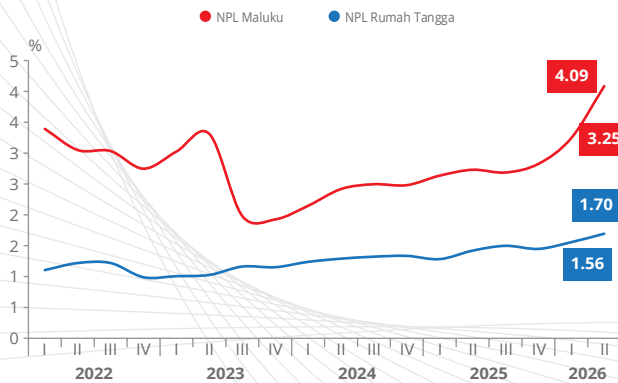
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah di Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan pada Triwulan II 2026. Dari sisi penghimpunan dana, DPK Syariah tumbuh sebesar 10,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 5,84% (yoy). Namun demikian, pangsa DPK Syariah terhadap total DPK perbankan di Maluku sedikit menurun, dari 4,59% pada Triwulan I 2026 menjadi 4,37% pada triwulan laporan. Penurunan pangsa tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan DPK perbankan secara keseluruhan masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK Syariah, meskipun secara nominal penghimpunan dana syariah tetap mencatatkan peningkatan yang solid.

3.2.3. ASESMEN STABILITAS KEUANGAN RUMAH TANGGA

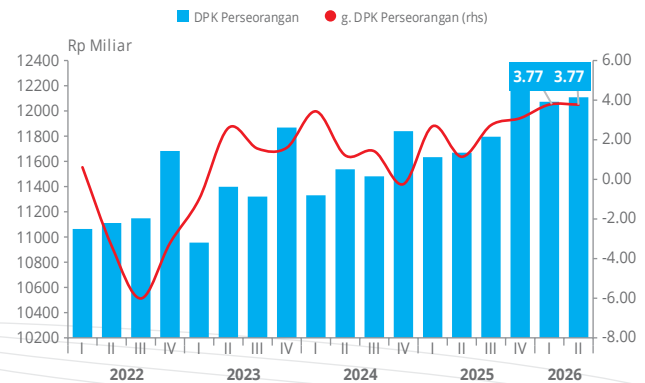
Penyaluran Kredit Rumah Tangga (RT) di Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 tumbuh positif sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi pada berbagai perayaan Hari Keagamaan Nasional, penyaluran gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN), serta terjaganya daya beli masyarakat. Kredit RT pada Triwulan II 2026 tercatat tumbuh positif sebesar 15,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,96% (yoy). Kinerja penyaluran Kredit Rumah Tangga tetap terjaga, terutama didorong oleh pertumbuhan Kredit Multiguna yang mencapai 17,06% (yoy) pada Triwulan II 2026, meningkat dibandingkan capaian sebesar 15,16% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan rumah tangga untuk konsumsi, terutama selama periode berbagai hari Keagamaan Nasional. Sementara itu, Kredit Properti masih mengalami kontraksi sebesar 1,86% (yoy) pada Triwulan II 2026, meskipun membaik dibandingkan kontraksi 6,66% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya permintaan pembiayaan untuk pembelian rumah dan properti, seiring masyarakat yang cenderung memprioritaskan konsumsi jangka pendek.



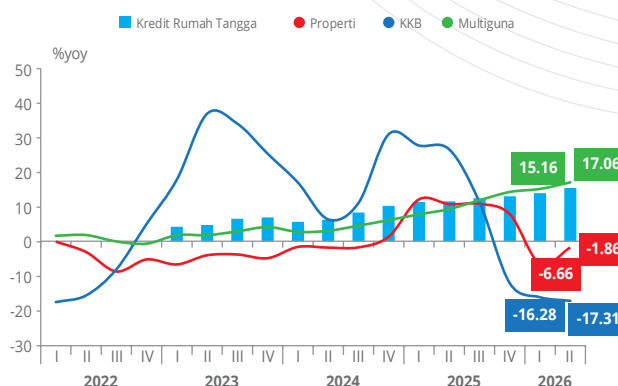
Grafik 3.19 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Maluku



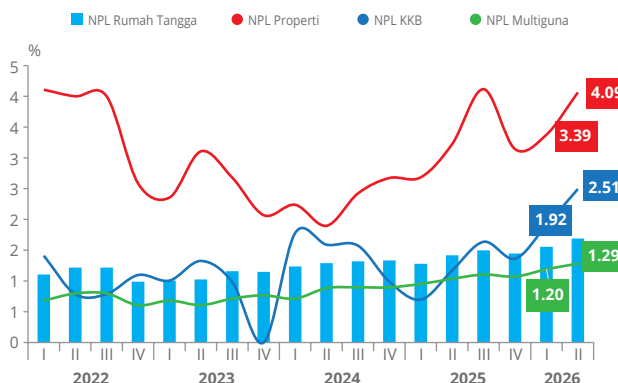
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.20 NPL Kredit Rumah Tangga Maluku

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.23 Perkembangan DPK Rumah Tangga/Perseorangan Maluku

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.21 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Maluku Berdasarkan Jenis Penggunaannya

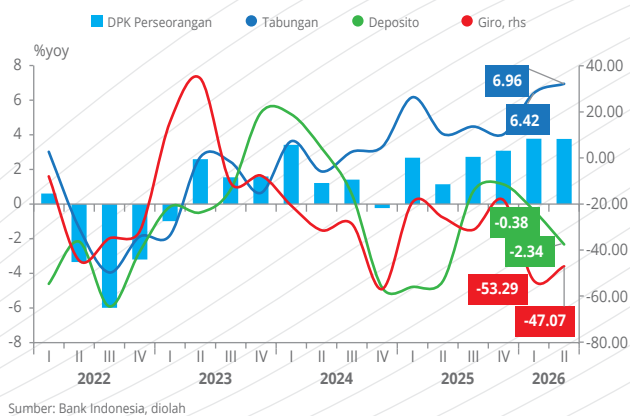
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.22 NPL Kredit Rumah Tangga Maluku Berdasarkan Jenis Penggunaannya

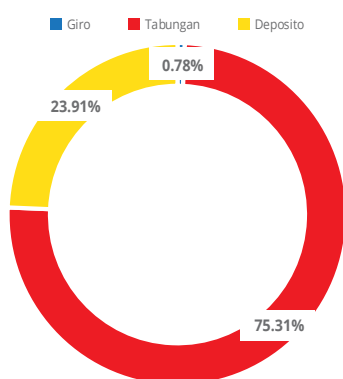
Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (RT) yang tetap positif diiringi oleh risiko kredit yang secara umum masih terjaga. Pada Triwulan II 2026, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Kredit Rumah Tangga tercatat sebesar 1,70%, sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,56%, namun masih berada

pada level yang relatif rendah. Berdasarkan jenis penggunaannya, terjaganya kualitas Kredit Rumah Tangga terutama ditopang oleh NPL Kredit Multiguna yang relatif tetap rendah, yaitu sebesar 1,29%. Sementara itu, NPL Kredit Properti tercatat sebesar 4,09% dan NPL Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 2,51%, yang masih berada di bawah ambang batas aman sebesar 5%. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko Kredit Rumah Tangga di Provinsi Maluku masih terkendali dan tetap mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Pada Triwulan II 2026, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rumah Tangga di Provinsi Maluku tetap menunjukkan kinerja yang positif di tengah konsumsi masyarakat yang masih terjaga. DPK Rumah Tangga tercatat tumbuh sebesar 3,77% (yoy), relatif tidak berbeda dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang juga sebesar 3,77% (yoy). Berdasarkan komponen pembentuknya, pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan Tabungan. Tabungan Rumah Tangga tumbuh sebesar 6,96% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang sebesar 6,42% (yoy). Di sisi lain, Deposito dan Giro Rumah Tangga masih mengalami kontraksi. Giro Rumah Tangga terkontraksi cukup dalam sebesar 47,07% (yoy), meskipun relatif membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 53,29% (yoy). Sementara itu, Deposito Rumah Tangga mengalami kontraksi sebesar 2,34% (yoy), lebih



Grafik 3.24 Perkembangan Komponen DPK Rumah Tangga Maluku



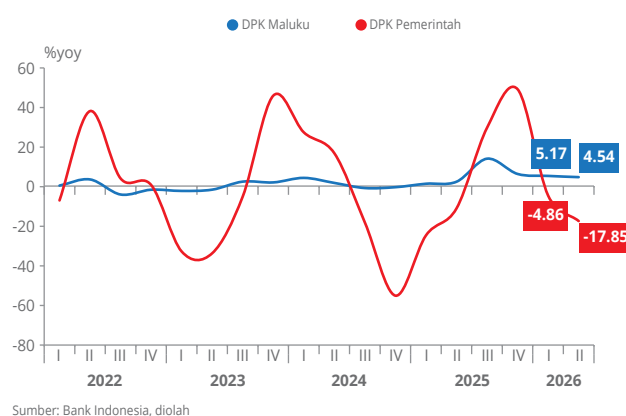
Grafik 3.25 Pangsa DPK Rumah Tangga Maluku

dalam dibandingkan kontraksi 0,38% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan pangsaanya, Tabungan masih mendominasi struktur DPK Rumah Tangga dengan pangsa sebesar 75,31%, diikuti oleh Deposito sebesar 23,91% dan Giro sebesar 0,78%. Perkembangan ini mencerminkan likuiditas rumah tangga yang relatif terjaga, dengan pergeseran komposisi simpanan ke instrumen yang lebih likuid.

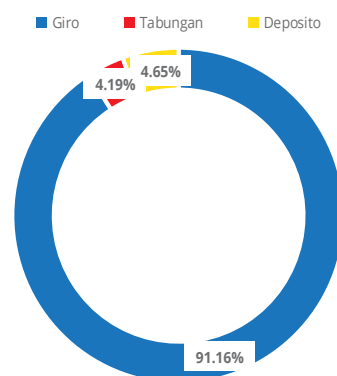
3.2.4. PERKEMBANGAN DANA PIHAK KETIGA PEMERINTAH DAERAH

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku mengalami penurunan pada Triwulan II 2026. DPK Pemerintah Daerah tercatat terkontraksi sebesar 17,85% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 4,86% (yoy) pada Triwulan I 2026.

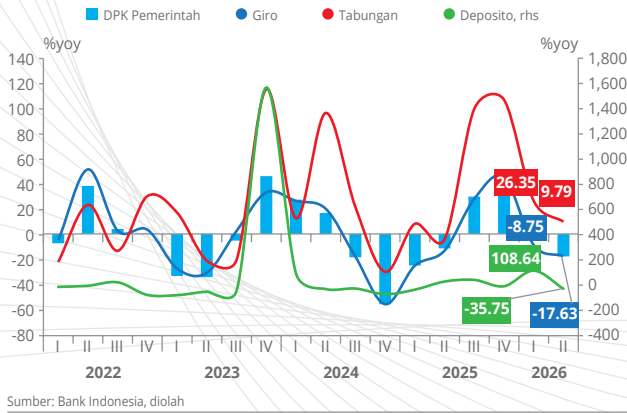
Berdasarkan komponennya, penurunan DPK Pemerintah Daerah bersumber dari perlambatan pada seluruh instrumen simpanan, yaitu Deposito, Giro, dan Tabungan. Deposito mengalami kontraksi sebesar 35,73% (yoy), berbalik dari pertumbuhan yang tinggi pada triwulan sebelumnya sebesar 108,64% (yoy). Giro juga terkontraksi sebesar 17,63% (yoy), lebih dalam dibandingkan Triwulan I 2026 yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 8,75% (yoy). Sementara itu, Tabungan masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 9,79% (yoy), namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,35% (yoy). Adapun di antara ketiga komponen tersebut, dana pemerintah yang disimpan sebagian besar disimpan dalam bentuk Giro dengan pangsa sebesar 91,16%. Diikuti dengan Deposito dan Tabungan dengan pangsa masing-masing sebesar 4,65% dan 4,19%.



Grafik 3.26 Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Maluku



Grafik 3.27 Pangsa DPK Pemerintah Daerah Maluku Berdasarkan Komponennya



Sumber: Bank Indonesia, diolah

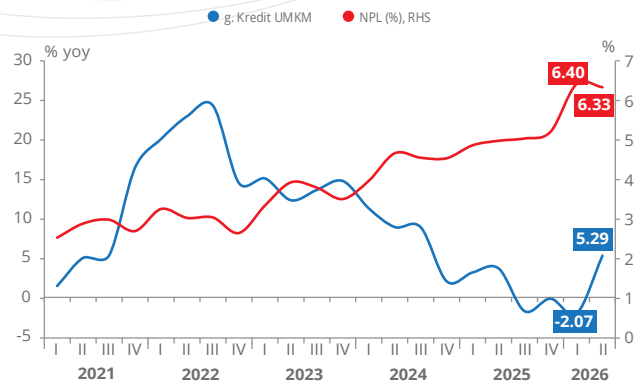
Grafik 3.28 Perkembangan DPK Pemerintah Daerah Maluku Berdasarkan Komponennya

3.3. PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT UMKM

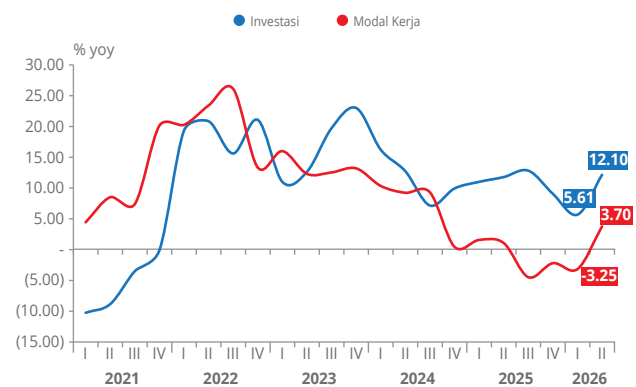
Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Maluku menunjukkan perbaikan pada Triwulan II 2026. Kredit UMKM tumbuh sebesar 5,29% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang masih mengalami kontraksi sebesar 2,07% (yoy). Perbaikan tersebut mencerminkan mulai meningkatnya aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan pelaku UMKM seiring tetap terjaganya aktivitas perekonomian daerah. Di sisi lain, risiko kredit UMKM masih berada di atas ambang batas aman. Pada Triwulan II 2026, rasio *Non-Performing Loan* (NPL) Kredit UMKM tercatat sebesar 6,33%, relatif menurun dibandingkan Triwulan sebelumnya yang sebesar 6,40%, namun masih berada di atas *threshold* 5%.

Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan penyaluran kredit UMKM terutama didorong oleh membaiknya Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Kredit Investasi tumbuh sebesar 12,10% (yoy), meningkat dari 5,61% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, Kredit Modal Kerja tumbuh sebesar 3,70% (yoy) setelah pada Triwulan I 2026 mengalami kontraksi sebesar 3,25% (yoy). Perkembangan tersebut mengindikasikan

meningkatnya kebutuhan pembiayaan UMKM, baik untuk ekspansi kapasitas usaha maupun untuk mendukung kegiatan operasional. Secara keseluruhan, dinamika tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembiayaan UMKM di Provinsi Maluku terus mengalami pemulihan, tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit pada seluruh jenis pembiayaan produktif. Meskipun demikian, kualitas kredit masih perlu terus dicermati mengingat rasio NPL UMKM masih berada di atas ambang batas aman, sehingga diperlukan penguatan manajemen risiko serta pendampingan terhadap pelaku UMKM agar pertumbuhan kredit tetap berkelanjutan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.29 Perkembangan Kredit dan NPL UMKM Maluku


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.30 Perkembangan Kredit UMKM Maluku berdasarkan Jenis Penggunaan

BOKS 1

PENGUATAN EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH MELALUI KEGIATAN FESTIVAL EKONOMI SYARIAH KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2026

Ekonomi dan keuangan syariah terus mengalami perkembangan yang tercermin dari *State of Global Islamic Economy (SGIE) Report* yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-3 dunia di Tahun 2024, lebih tinggi dari Tahun 2022 yang berada di peringkat ke-4. Sejalan dengan capaian tersebut, pada bulan Desember 2025, total aset perbankan syariah di Maluku mencapai Rp1,02 triliun dengan nilai pembiayaan syariah sebesar Rp710 miliar. Nilai pembiayaan syariah tersebut tumbuh 18,30 persen jika dibandingkan Desember 2024 (yoy). Di Maluku, kinerja penyaluran Pembiayaan Syariah pada Triwulan II 2026 menunjukkan pertumbuhan sebesar 26,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 24,78% (yoy). Pangsa Pembiayaan Syariah pada periode laporan tercatat sebesar 3,92% terhadap total penyaluran kredit/pembiayaan di Provinsi Maluku, angka ini juga menunjukkan kenaikan dari triwulan sebelumnya sebesar 3,78%.

Pengembangan ekonomi dan keuangan digital serta syariah diyakini dapat menjadi akselerator bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal dimaksud, Bank Indonesia secara konsisten mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan digital dan syariah di daerah melalui berbagai program kerja bersinergi dengan mitra kerja strategis di daerah. Mengacu pada Kerangka Kerja Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam upayanya mencapai sasaran terkait peningkatan literasi ekonomi syariah melalui penguatan literasi, inklusi, dan halal *lifestyle*, salah satu program kerja Bank Indonesia yang dilaksanakan adalah berupa

pengembangan festival ekonomi dan keuangan syariah yang memperkuat halal *lifestyle* melalui kegiatan Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF) yang diselenggarakan secara tahunan. Kegiatan tersebut diturunkan di daerah melalui kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) yang dilaksanakan pada 3 regional yaitu Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mencakup Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pada Tahun 2026, FESyar KTI dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 10-12 Juli 2026 dan dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat regional Kawasan Timur Indonesia, sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia dan Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, penguatan ekonomi syariah dilakukan melalui tiga pilar utama, yaitu pengembangan ekosistem rantai nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing, optimalisasi pembiayaan syariah, serta perluasan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

Pada sisi pengembangan ekosistem, FESyar KTI 2026 turut mendorong penguatan sektor-sektor unggulan dalam *Halal Value Chain* (HVC), khususnya *halal food*, *modest fashion*, dan pariwisata ramah muslim (PRM). Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pengembangan model bisnis pembiayaan sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah serta penguatan kebijakan yang mendukung pembiayaan syariah menjadi bagian



Gambar 1.
Pembukaan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia Tahun 2026

dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan. Upaya tersebut dilengkapi dengan peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah melalui sinergi bersama berbagai pemangku kepentingan.

Dengan arah tersebut, **FESyahr KWTI 2026 mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital.”** Tema ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan pemanfaatan transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan FESyahr KWTI 2026 membawa sejumlah penyempurnaan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Salah satunya adalah penguatan sinergi lintas program dan kegiatan FESyahr dengan rangkaian kegiatan *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)*, sehingga FESyahr tidak berdiri sebagai kegiatan yang terpisah,

tetapi menjadi bagian dari rangkaian menuju penyelenggaraan ISEF. Selain itu, koordinasi dan kolaborasi dengan daerah juga diperkuat untuk meningkatkan inklusi, termasuk melalui keterlibatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan secara berjenjang.

Perluasan sinergi dan kolaborasi juga menjadi salah satu perhatian utama dalam FESyahr 2026. Di lingkungan internal Bank Indonesia, sinergi dilakukan melalui pembagian peran antar-Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam satu regional. Sementara itu, dari sisi eksternal, kolaborasi diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah, KDEKS, industri Hotel, Restoran dan Cafe (HORECA), asosiasi perbankan syariah, serta kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara berbagai program ekonomi dan keuangan syariah sekaligus memperluas jangkauan manfaat FESyahr di daerah.

Dalam pelaksanaannya, FESyahr KWTI 2026 mencakup rangkaian kegiatan *Sharia Fair, Sharia Education, dan Sharia Economic Forum, serta berbagai kompetisi yang relevan dengan*

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. *Sharia Fair* sendiri melibatkan pelaku usaha syariah IKRA, UMKM binaan Bank Indonesia maupun mitra Bank Indonesia, pondok pesantren binaan, lembaga jasa keuangan syariah, serta berbagai stakeholder terkait. Beberapa area yang dihadirkan antara lain Halal Mart, ZISWAF Corner, Pojok Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta area Pariwisata Ramah Muslim. Keterlibatan KDEKS, OJK, MES, HEBITREN, komunitas perempuan, dan pihak terkait lainnya juga memperluas ekosistem yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain pameran, *Sharia Fair* juga diarahkan untuk membuka peluang transaksi dan kerja sama melalui *business matching* pembiayaan, *business matching* penjualan, *business coaching*, serta penandatanganan kerja sama atau MoU. Dengan demikian, kegiatan tidak berhenti pada aspek pameran, tetapi dapat menjadi sarana untuk mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan, calon pembeli, maupun mitra

strategis yang dapat mendukung pengembangan usaha.

Rangkaian kompetisi dalam FESyar KTI 2026 ditujukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus menjadi sarana edukasi dan pengembangan potensi ekonomi syariah.

Beberapa kompetisi yang dilaksanakan antara lain *Modest Fashion Designer Competition*, *Halal Chef Competition*, Kompetisi Dakwah Ekonomi Syariah, Kompetisi Konten Ekonomi Syariah, Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN) Regional KTI, serta Kompetisi Program Pemberdayaan Ekonomi Lembaga ZISWAF.

Pada sisi edukasi, FESyar KTI 2026 menyediakan rangkaian kegiatan Sharia Education yang dikemas dalam bentuk *talkshow*, *training of trainer* (ToT), *workshop*, dan kegiatan edukatif lainnya. Topik yang diangkat mencakup model pemberdayaan usaha syariah, penguatan produk halal, literasi *halal food*, optimalisasi dana ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi produktif, hingga *business coaching*. Terdapat pula kegiatan peningkatan kapasitas seperti ToT Da'i dan Da'iyah, ToT *content creator*, serta sertifikasi kompetensi nadzir.

Sementara itu, **Sharia Economic Forum** menjadi ruang untuk membahas isu ekonomi dan keuangan syariah secara lebih luas melalui seminar *flagship* ekonomi dan keuangan syariah nasional, *economic forum*, *tabligh akbar*, dan (Zakat dan Wakaf Walk (ZAWA Walk)). Rangkaian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat dan stakeholder mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus mendorong diskusi mengenai peluang pengembangannya di daerah.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Maluku sendiri mengikutsertakan berbagai pihak eksternal sebagai delegasi untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan FESyar KTI 2026. Pada kegiatan *Sharia Fair*, KPwBI



Gambar 2. Booth Pameran Produk UMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku



Gambar 3. Prestasi Delegasi KPw BI Provinsi Maluku pada FESyar KTI 2026

Provinsi Maluku mengirimkan 8 (delapan) UMKM yang terdiri dari 3 (tiga) UMKM sektor wastra, *ready to wear*, dan aksesoris serta 5 (lima) UMKM sektor makanan, minuman, dan olahan. Pada kegiatan kompetisi, KPwBI Provinsi Maluku secara total mengirimkan 6 (enam) delegasi dengan rincian sebanyak 1 (satu) orang mengikuti *Halal Chef Competition* kategori profesional, 1 (satu) orang mengikuti *Halal Chef Competition* kategori pondok pesantren, 1 (satu) orang mengikuti *Halal Chef Competition* kategori umum, 1 (satu) orang mengikuti *Modest Fashion Designer Competition* kategori pelajar, 1 (satu) orang mengikuti Kompetisi Dakwah Ekonomi Syariah, dan 1 (satu) orang mengikuti Program Pemberdayaan Ekonomi Lembaga ZISWAF kategori zakat. Selain kegiatan *Sharia Fair* dan kompetisi, KPwBI Provinsi Maluku

juga mengirimkan delegasi untuk mengikuti kegiatan *Sharia Education* dengan rincian 1 (satu) orang mengikuti *Training of Trainers* Da'i, 1 (satu) orang mengikuti *Training of Trainers Content Creator*, dan 2 (dua) orang mengikuti kegiatan sertifikasi nazhir.

Keikutsertaan seluruh delegasi KPwBI Provinsi Maluku pada kegiatan FESyar KTI 2026 telah dipersiapkan melalui berbagai pelatihan dan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat. Hasilnya, dari seluruh kegiatan yang diikuti, delegasi KPwBI Provinsi Maluku berhasil membawa beberapa prestasi yaitu: Juara III Kompetisi Dakwah Ekonomi Syariah; Juara III Kompetisi Program Pemberdayaan Ekonomi Lembaga ZISWAF kategori zakat; serta 2 (dua) orang Nazhir tersertifikasi kompeten oleh BNSP.

Pelaksanaan FESyar KTI 2026 menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di kawasan Timur Indonesia. Rangkaian kegiatan yang meliputi *Sharia Fair*, kompetisi, *Sharia Education*, dan *Sharia Economic Forum* tidak hanya menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi dan produk ekonomi syariah, tetapi juga mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem halal, perluasan akses pembiayaan, peningkatan literasi, serta penguatan kapasitas pelaku usaha dan masyarakat. Sejalan dengan tema FESyar KTI 2026, pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan pentingnya sinergi dan pemanfaatan transformasi digital dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, keterlibatan KPwBI Provinsi Maluku melalui keikutsertaan UMKM, delegasi kompetisi, maupun peserta kegiatan edukasi menjadi bagian dari upaya membawa potensi dan kapasitas pelaku ekonomi syariah di Maluku untuk terhubung dengan ekosistem ekonomi syariah di tingkat regional.

QRIS QR Code Standar
Pembayaran Nasional



KIOS EXPERIENCE

NMID : ID1023255532971

A01



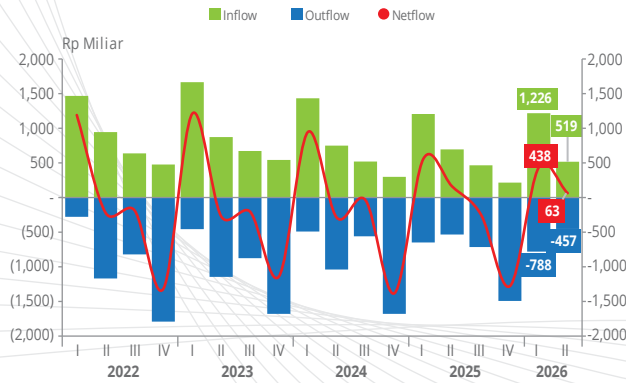
SATU QRIS UNTUK SEMUA
Cek aplikasi penyelenggara
di: www.aspi-qris.id

Dicetak oleh : 93600503
Versi Cetak : 1.0-2023.05.17



BAB 4

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1 Rekapitulasi Kegiatan Perkasan KPwBI Provinsi Maluku

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar 4.1 Peta Lokasi Kas Titipan di Provinsi Maluku

4.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

4.1.1. PERPUTARAN UANG TUNAI

Pada Triwulan II 2026, peredaran uang kartal di Provinsi Maluku tercatat mengalami **net-inflow** seiring dengan normalisasi permintaan uang pasca-HBKN Ramadhan. Provinsi Maluku mencatat *net-inflow* sebesar Rp 62 miliar pada triwulan laporan, setelah pada Triwulan I 2026 mencatatkan *net-outflow* mencapai Rp438 miliar. Kondisi *net-inflow* terutama didorong oleh tingginya *inflow* Uang Pecahan Besar (UPB) pada April 2026 yang sejalan dengan normalisasi kebutuhan uang kartal setelah periode HBKN Ramadhan. Peningkatan *inflow* tersebut mencerminkan adanya pengembalian uang kartal ke Bank Indonesia setelah sebelumnya terjadi peningkatan *outflow* untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri.

4.1.2. PELAYANAN PERKASAN & EDUKASI RUPIAH

KPwBI Provinsi Maluku terus memperluas akses layanan kas kepada masyarakat melalui layanan kas di dalam maupun luar kantor. Layanan kas di dalam kantor dilaksanakan melalui kegiatan penukaran uang secara terjadwal setiap hari Selasa dan Kamis, pukul 09.00 s.d. 11.30

WIT. Masyarakat yang menggunakan layanan tersebut diwajibkan terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui www.pintar.bi.go.id. Sementara itu, layanan kas di luar kantor dilakukan melalui kegiatan kas keliling dengan menerapkan *Clean Money Policy* sebagai upaya penyediaan Uang Layak Edar (ULE) dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, dan tepat kualitas kepada seluruh lapisan masyarakat hingga wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) di Provinsi Maluku.

Selain kas keliling, KPwBI Provinsi Maluku juga menyediakan layanan kas melalui keberadaan kas titipan untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah masyarakat, khususnya di wilayah 3T. Pada Triwulan II 2026, KPwBI Provinsi Maluku mengelola 4 (empat) kas titipan yang berlokasi di Kab. Buru, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku, dan Kab. Fak-Fak di Provinsi Papua Barat. Dalam pelaksanaan, KPwBI Provinsi Maluku bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk., serta PT Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah di wilayah layanan.

Pada Triwulan II 2026, layanan kas keliling KPwBI Provinsi Maluku dilaksanakan pada 4 (empat) titik di Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu Desa Waisamu, Desa Hatusua, Desa Kamal, dan Desa Waisarisa. Pelaksanaan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya KPwBI Provinsi

Maluku dalam memperluas jangkauan layanan kas sekaligus memastikan ketersediaan ULE bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kas.

Selain penyediaan layanan kas, KPwBI Provinsi Maluku secara konsisten melaksanakan edukasi dan sosialisasi melalui Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah kepada beragam lapisan masyarakat, antara lain institusi pendidikan, komunitas masyarakat, dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Rupiah, tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara. Edukasi mencakup pengenalan karakteristik dan ciri uang Rupiah, sikap menghargai dan merawat Rupiah, serta penggunaan Rupiah secara bijak dalam bertransaksi.

4.2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI

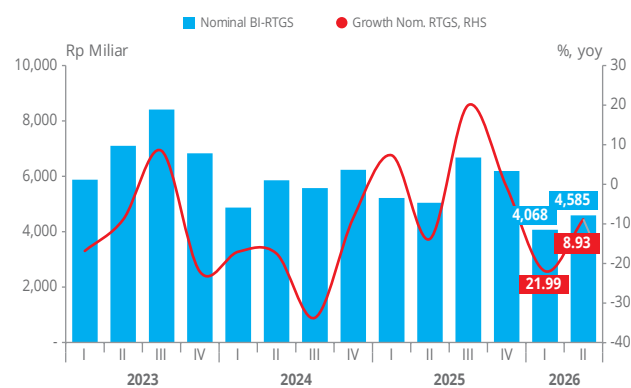
4.2.1. TRANSAKSI *REAL-TIME GROSS SETTLEMENT* (RTGS) DI PROVINSI MALUKU

Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS) merupakan mekanisme penyelesaian transaksi pembayaran secara bruto (*gross*) dan *real time*, yang mana setiap transaksi diselesaikan secara individual dan bersifat final serta tidak dapat dibatalkan. BI-RTGS digunakan untuk transaksi bernilai besar dengan batas minimum nominal sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan dikenakan biaya transfer sebesar Rp25.000,- s.d. Rp50.000,- (Dua Puluh Lima Ribu s.d. Lima Puluh Ribu Rupiah).

Transaksi BI-RTGS di Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 menunjukkan perkembangan yang beragam. Nominal transaksi pada

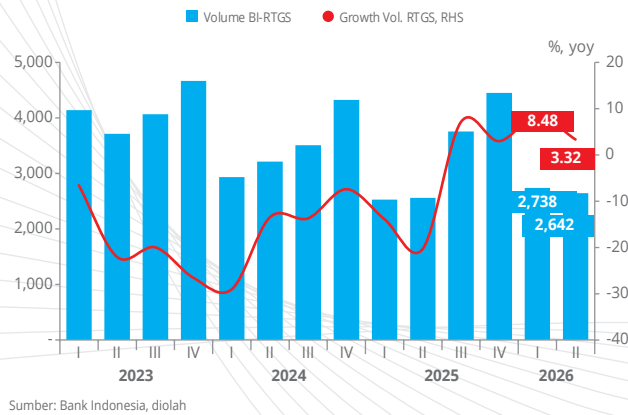
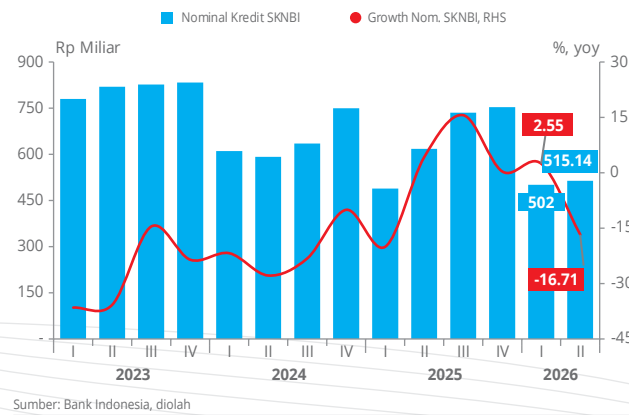
Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp4,58 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, volume transaksi tercatat sebesar 2.642 transaksi, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, nominal transaksi masih mengalami kontraksi sebesar 8,93% (yoy), namun tidak sedalam triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 21,99% (yoy). Di sisi lain, volume transaksi pada Triwulan II 2026 tetap tumbuh positif sebesar 3,32% (yoy), meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,48% (yoy).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas transaksi melalui BI-RTGS di Provinsi Maluku tetap dilakukan, meskipun frekuensi transaksi mengalami penurunan secara triwulanan. Peningkatan nominal transaksi di tengah penurunan volume mengindikasikan adanya peningkatan nilai rata-rata transaksi BI-RTGS pada Triwulan II 2026. Sementara itu, secara tahunan, perbaikan kontraksi nominal dan pertumbuhan volume yang tetap positif menunjukkan bahwa transaksi bernilai besar melalui BI-RTGS masih menjadi bagian dari aktivitas pembayaran di Provinsi Maluku yang sejalan dengan masih kuatnya kinerja Lapangan Usaha utama pada Triwulan II 2026.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan Nominal Transaksi BI-RTGS Provinsi Maluku

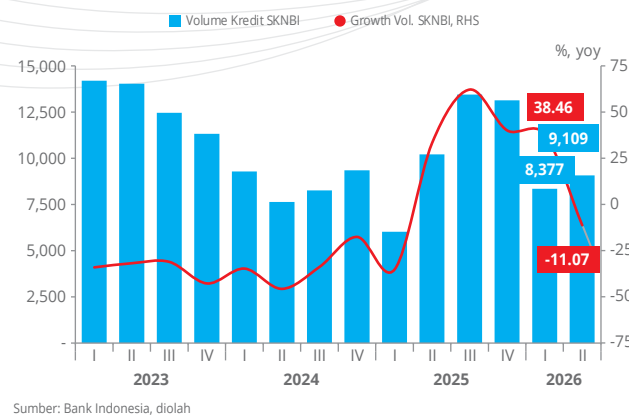

Grafik 4.3 Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS Provinsi Maluku

Grafik 4.4 Perkembangan Nominal SKNBI Provinsi Maluku

4.2.2. TRANSAKSI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI) DI PROVINSI MALUKU

Pada Triwulan II 2026, transaksi SKNBI di Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan secara triwulanan, namun secara tahunan masih mengalami kontraksi, baik dari sisi volume maupun nominal transaksi. SKNBI merupakan infrastruktur yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk memproses transfer dana dan kliring berjadwal melalui layanan transfer dana, kliring warkat debit, pembayaran reguler, dan penagihan reguler.

Nominal transaksi SKNBI pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp515,14 miliar, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian, secara tahunan, nominal transaksi SKNBI terkontraksi sebesar 16,71% (yoy), setelah pada Triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 2,55% (yoy). Sejalan dengan perkembangan tersebut, volume transaksi SKNBI tercatat sebanyak 9.109 transaksi atau mengalami kontraksi sebesar 11,07% (yoy), berbalik arah dari pertumbuhan sebesar 38,46% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

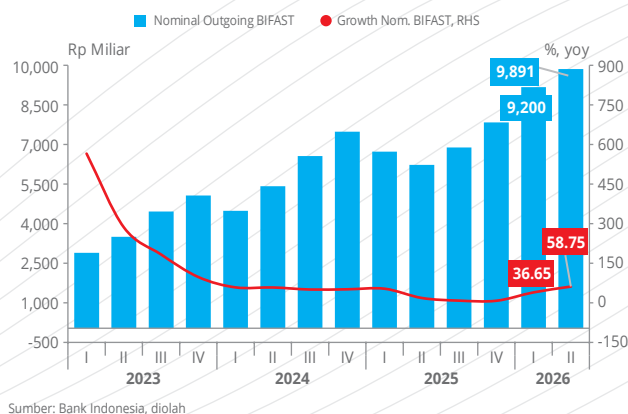
Kontraksi transaksi SKNBI secara tahunan mengindikasikan adanya pergeseran preferensi masyarakat menuju instrumen pembayaran ritel yang lebih cepat dan efisien, khususnya BI-FAST. Pergeseran tersebut sejalan dengan semakin


Grafik 4.5 Perkembangan Volume SKNBI Provinsi Maluku

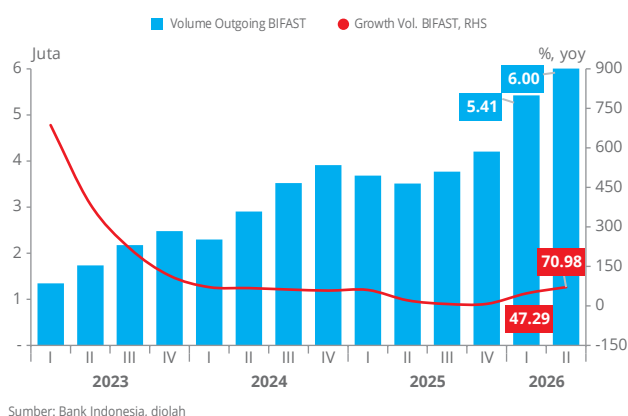
bekembangnya alternatif kanal pembayaran digital yang memungkinkan transfer dana secara *real time* dan tersedia sepanjang waktu.

4.2.3. TRANSAKSI BI-FAST DI PROVINSI MALUKU

Pada Triwulan II 2026, transaksi BI-FAST masih mencatatkan pertumbuhan yang semakin kuat, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara *real-time*, aman, efisien, dan tersedia setiap saat (24/7). Kehadiran BI-FAST dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan transfer dana yang lebih cepat dan efisien,



Grafik 4.6 Perkembangan Nominal BI-FAST Provinsi Maluku



Grafik 4.7 Perkembangan Volume BI-FAST Provinsi Maluku

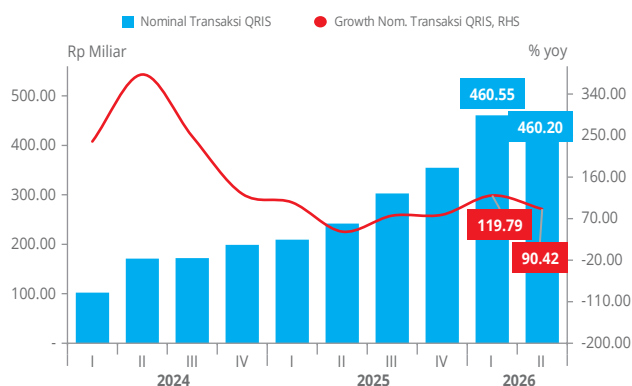
dengan biaya transaksi sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) per transaksi, dengan limit transfer dana sebesar Rp250 juta per hari.

Pada Triwulan II 2026, nominal transaksi BI-FAST tercatat sebesar Rp9,89 triliun dengan volume mencapai 5,99 juta transaksi. Secara tahunan, nominal transaksi BI-FAST tumbuh sebesar 58,75% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 36,65% (yoy). Sejalan dengan itu, volume transaksi BI-FAST tumbuh sebesar 70,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 47,29% (yoy). Penguatan pertumbuhan tersebut semakin memperkuat pemanfaatan BI-FAST sebagai kanal pembayaran ritel di Provinsi Maluku.

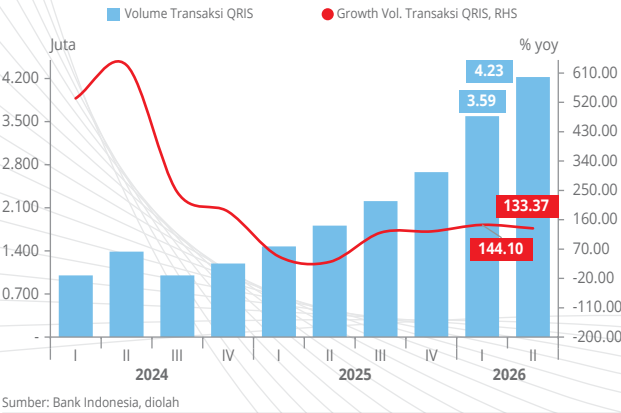
Peningkatan transaksi BI-FAST didorong oleh semakin luasnya penggunaan layanan transfer ritel yang cepat, murah, dan tersedia secara *real time*. Pertumbuhan tersebut turut didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pada periode berbagai momen Hari Raya Keagamaan, periode libur/akhir tahun ajaran, serta berbagai aktivitas konsumsi masyarakat seperti wisuda universitas. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya adopsi BI-FAST sebagai salah satu kanal utama dalam transaksi pembayaran ritel di Provinsi Maluku.

4.2.4. TRANSAKSI QRIS DI PROVINSI MALUKU

Pada Triwulan II 2026, penggunaan QRIS di Provinsi Maluku terus menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mendorong akselerasi pembayaran nontunai untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Upaya tersebut didukung melalui pengembangan berbagai fitur QRIS yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, antara lain QRIS CPM (*Customer Presented Mode*), MPM (*Merchant Presented Mode*), Tanpa Tatap Muka (TTM), QRIS Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (TUNTAS), QRIS Antarnegara, dan QRIS Tanpa Pindai (TAP).



Grafik 4.8 Perkembangan Volume Transaksi QRIS Provinsi Maluku



Grafik 4.9 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS Provinsi Maluku

Pada Triwulan II 2026, nominal transaksi QRIS tercatat sebesar Rp460,20 miliar atau tumbuh sebesar 90,42% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 119,79% (yoy). Sementara itu, volume transaksi QRIS mencapai 4,23 juta transaksi atau tumbuh sebesar 133,37% (yoy), meningkat dibandingkan dengan volume transaksi pada triwulan sebelumnya sebanyak 3,59 juta transaksi, meskipun laju pertumbuhannya melambat dari 144,10% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan QRIS di Provinsi Maluku tetap tumbuh kuat dan semakin terintegrasi dalam aktivitas transaksi masyarakat.

Pertumbuhan QRIS turut didukung oleh upaya KPwBI Provinsi Maluku dalam memperluas

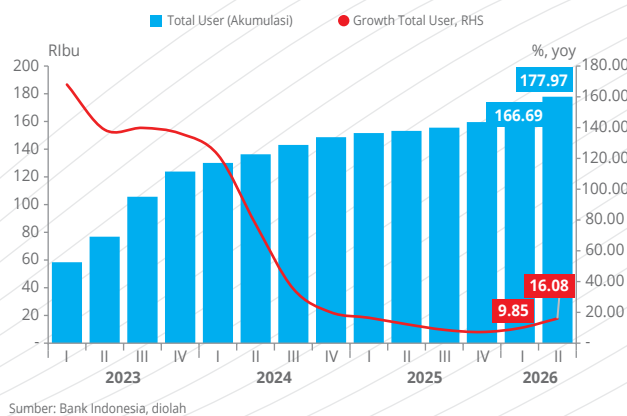
ekosistem dan meningkatkan literasi pembayaran digital, antara lain melalui kegiatan Salam Fest x Moluccas Digifest 2026 serta edukasi dan sosialisasi pembayaran nontunai dan perlindungan konsumen melalui program LEKAS (Layanan Edukasi Keliling dan Akuisisi QRIS) di berbagai wilayah. Berbagai kegiatan tersebut mendorong peningkatan akseptasi QRIS sekaligus memperluas pemanfaatannya sebagai kanal pembayaran yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH).

Secara spasial, aktivitas transaksi QRIS di Provinsi Maluku masih terkonsentrasi di Kota Ambon, namun mulai menunjukkan perluasan ke sejumlah kabupaten/kota lainnya. Pada Triwulan II 2026, Kota Ambon memiliki pangsa volume transaksi QRIS sebesar 58,37%, tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Di sisi lain, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Kep. Aru, Kab. Buru Selatan menunjukkan peningkatan pangsa volume transaksi. Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya perluasan penggunaan QRIS di luar pusat aktivitas ekonomi Provinsi Maluku, yang turut didukung oleh peningkatan literasi dan akseptasi pembayaran digital melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan TP2DD (Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah) di berbagai wilayah Maluku.

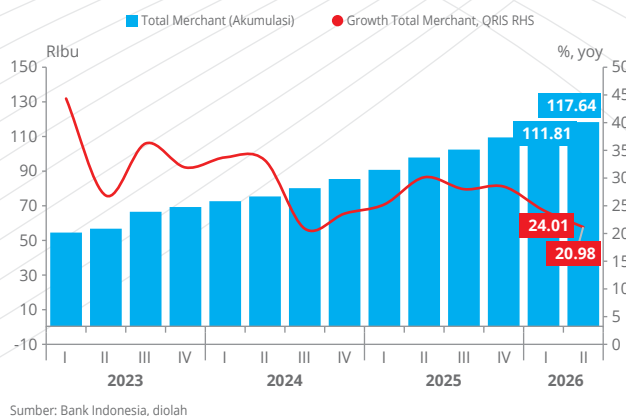
Tabel 4.1. Data Spasial Pangsa Volume Transaksi QRIS di Provinsi Maluku

Pangsa Volume Transaksi QRIS	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kab. Buru	1,15	3,33	5,45	2,48	1,50	1,37	1,38	1,91	4,04	3,52
Kab. Buru Selatan	0,17	0,10	0,18	0,28	0,31	0,12	0,28	0,28	0,48	0,48
Kab. Maluku Barat Daya	0,62	0,48	1,02	0,89	0,70	0,36	0,28	0,47	0,36	0,56
Kab. Maluku Tengah	11,08	11,77	10,15	9,67	11,24	9,00	11,11	12,80	17,94	14,29
Kab. Maluku Tenggara	3,62	2,58	5,58	5,56	3,80	3,68	5,33	5,35	4,97	4,17
Kab. Kepulauan Tanimbar	2,65	2,76	1,70	1,64	1,35	1,01	1,15	1,34	1,53	1,72
Kota Ambon	75,95	62,32	66,82	75,42	77,35	79,75	75,22	68,67	61,32	58,37
Kab. Kepulauan Aru	0,59	0,79	1,11	1,02	0,77	0,84	0,81	1,33	0,91	1,25
Kab. Seram Bagian Barat	1,45	13,03	5,38	1,25	1,07	0,77	1,06	2,66	1,11	12,41
Kab. Seram Bagian Timur	0,83	1,62	1,00	0,28	0,41	1,26	1,10	3,21	5,44	1,41
Kota Tual	1,88	1,22	1,62	1,50	1,50	1,85	2,28	1,98	1,90	1,82
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

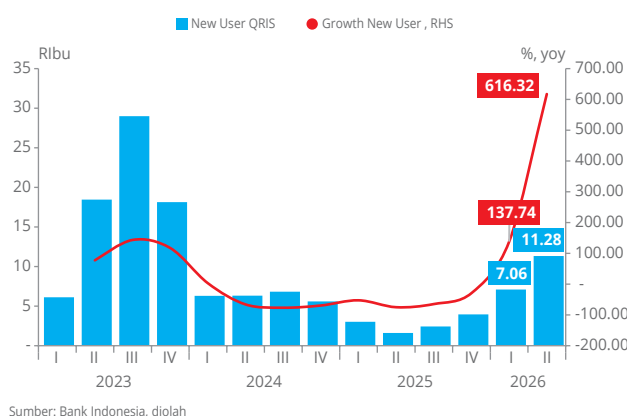
Sumber: Bank Indonesia, diolah



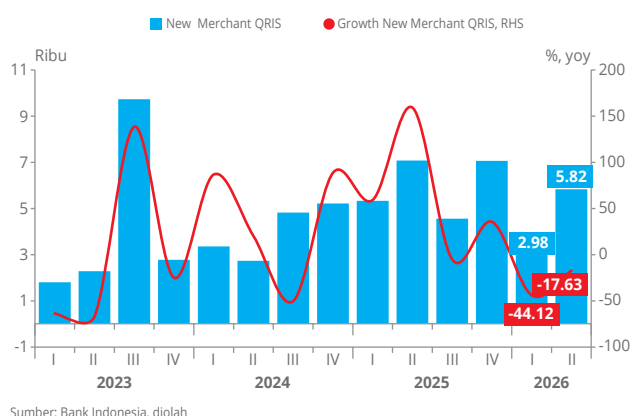
Grafik 4.10 Perkembangan Total User QRIS Provinsi Maluku



Grafik 4.12 Perkembangan Total Merchant QRIS Provinsi Maluku



Grafik 4.11 Perkembangan New User QRIS Provinsi Maluku



Grafik 4.13 Perkembangan New Merchant QRIS Provinsi Maluku

Peningkatan transaksi QRIS juga diikuti oleh perluasan basis pengguna. Secara kumulatif, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 mencapai 177,97 ribu pengguna atau tumbuh sebesar 16,08% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 166,69 ribu pengguna. Sejalan dengan itu, jumlah pengguna baru pada Triwulan II 2026 mencapai 11,28 ribu pengguna, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 137,74% (yoy). Peningkatan pengguna baru tersebut menunjukkan semakin kuatnya akseptasi masyarakat terhadap QRIS sebagai salah satu kanal pembayaran nontunai.

Dari sisi pelaku usaha, jumlah merchant QRIS juga terus mengalami pertumbuhan meskipun

dengan laju yang lebih moderat. Pada Triwulan II 2026, jumlah merchant QRIS mencapai 117,64 ribu merchant atau tumbuh sebesar 20,98% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 24,01% (yoy). Namun demikian, penambahan merchant baru secara triwulanan meningkat, dari 2,98 ribu merchant baru pada Triwulan I 2026 menjadi 5,82 ribu merchant pada triwulan laporan. Secara tahunan, jumlah merchant baru masih terkontraksi sebesar 17,63% (yoy), namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 44,12% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perluasan basis merchant tetap berlanjut, dengan laju kontraksi merchant baru yang semakin mereda.

Tabel 4.2. Data Spasial Pangsa Merchant QRIS di Provinsi Maluku

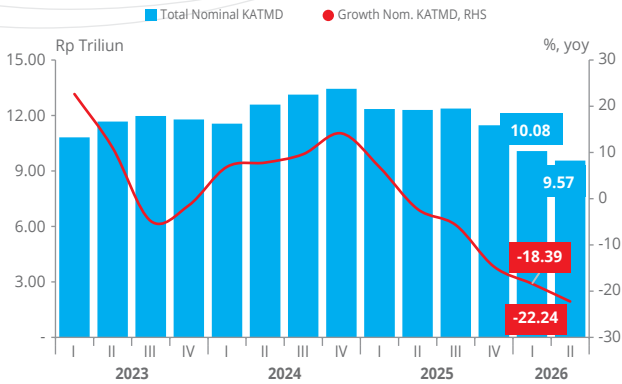
Keterangan	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kab. Buru	4,06	4,06	4,09	4,17	4,18	3,74	3,87	4,07	4,13	4,33
Kab. Buru Selatan	0,53	0,55	0,56	0,59	0,87	2,76	2,75	2,74	2,63	2,74
Kab. Kep. Aru	1,75	1,86	1,88	1,88	1,99	2,03	2,05	2,12	2,33	2,58
Kab. Kepulauan Tanimbar	5,02	4,97	4,87	4,79	4,66	4,44	4,39	4,38	4,40	4,58
Kab. Maluku Barat Daya	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	5,14	5,14	5,05	4,70	4,66
Kab. Maluku Tengah	11,51	11,52	11,61	11,56	11,76	12,89	12,90	12,96	13,27	13,82
Kab. Maluku Tenggara	7,23	7,45	7,52	7,62	7,75	5,30	5,35	5,47	5,95	6,42
Kab. Seram Bagian Barat	4,72	4,72	4,71	4,71	4,93	6,28	6,23	6,23	6,12	6,30
Kab. Seram Bagian Timur	2,84	3,03	3,14	3,21	3,43	4,25	4,22	4,17	3,95	4,03
Kota Ambon	61,70	61,21	61,00	60,83	59,82	50,36	50,24	49,96	50,00	48,05
Kota Tual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	2,85	2,85	2,52	2,48
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sebaran *merchant* QRIS masih didominasi oleh Kota Ambon, sejalan dengan tingginya aktivitas ekonomi dan basis pengguna QRIS di wilayah tersebut. Pada Triwulan II 2026, Kota Ambon memiliki pangsa *merchant* QRIS sebesar 48,05%. Namun demikian, pertumbuhan *merchant* juga mulai meluas ke Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kep. Tanimbar, dan Kab. Buru. Perkembangan tersebut mencerminkan semakin luasnya partisipasi pelaku usaha dalam ekosistem pembayaran digital, yang didukung oleh sinergi KPwBI Provinsi Maluku dengan pemerintah daerah, OJK, dan perbankan, serta melalui kegiatan edukasi dan akuisisi *merchant* QRIS.

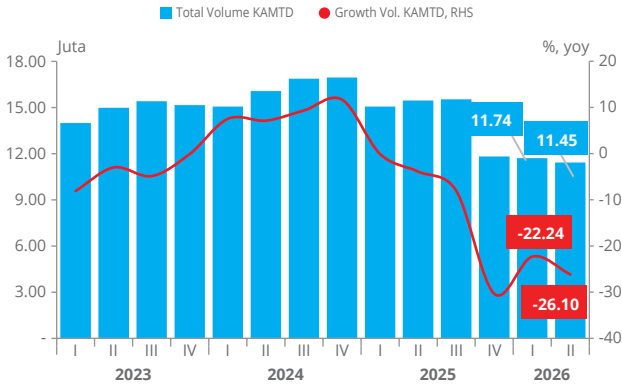
4.2.5. TRANSAKSI ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)

Transaksi menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) terdiri atas Kartu ATM dan Kartu Debit (ATMD) serta Kartu Kredit. Kartu Debit dapat digunakan untuk transaksi pembayaran dan belanja melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC), sementara kartu ATM pada prinsipnya digunakan untuk transaksi melalui mesin ATM.



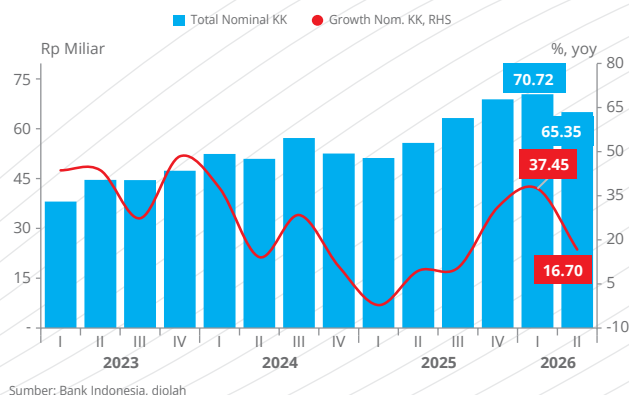
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14 Perkembangan Nom. Transaksi KATMD Provinsi Maluku

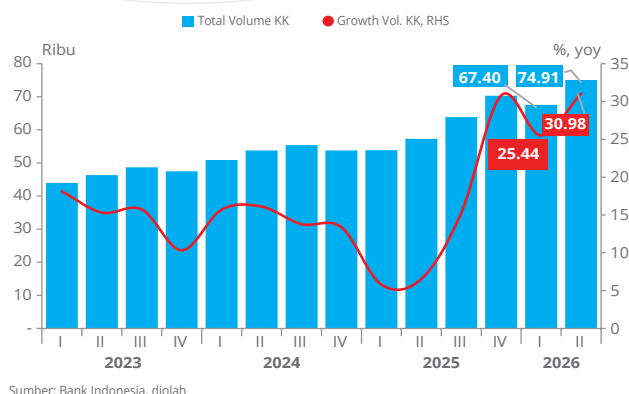


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15 Perkembangan Vol. Transaksi KATMD Provinsi Maluku



Grafik 4.16 Perkembangan Nom. Transaksi KK Provinsi Maluku



Grafik 4.17 Perkembangan Vol. Transaksi KK Provinsi Maluku

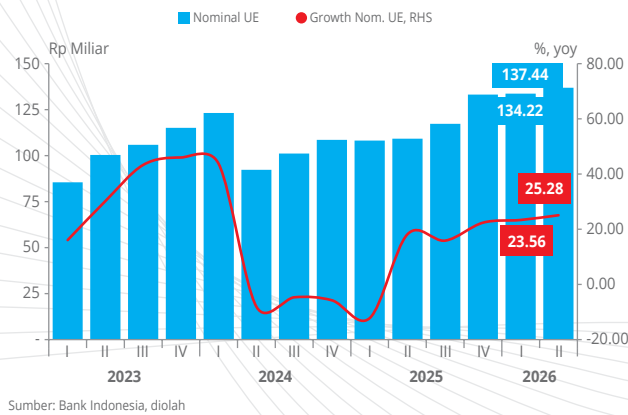
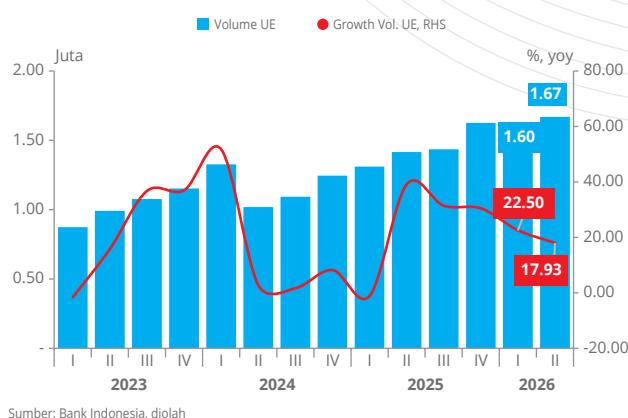
Transaksi Kartu ATMD di Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 melanjutkan tren penurunan, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Nominal transaksi Kartu ATMD tercatat sebesar Rp9,57 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp10,08 triliun, dan secara tahunan terkontraksi sebesar 22,24% (yoy). Sejalan dengan perkembangan nominal, volume transaksi Kartu ATMD juga mengalami kontraksi sebesar 26,10% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 22,24% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan semakin terbatasnya penggunaan kartu ATMD sebagai kanal transaksi, sejalan dengan pergeseran preferensi masyarakat menuju kanal pembayaran digital yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisien, seperti *mobile banking*, dompet digital, dan QRIS.

Di sisi lain, transaksi Kartu Kredit tetap mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun terdapat perbedaan perkembangan antara nominal dan volume transaksi. Nominal transaksi Kartu Kredit tercatat tumbuh sebesar Rp63,35 miliar atau 16,70% (yoy), namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 37,45% (yoy). Sementara itu, volume transaksi Kartu Kredit mencapai 74,91 ribu transaksi atau tumbuh sebesar 30,98% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 25,44% (yoy). Pertumbuhan volume yang lebih tinggi dibandingkan nominal menunjukkan peningkatan frekuensi penggunaan Kartu Kredit dengan nilai transaksi rata-rata yang relatif lebih rendah.

4.2.6. TRANSAKSI ALAT PEMBAYARAN UANG ELEKTRONIK (UE)

Uang Elektronik berbasis *server* maupun berbasis kartu dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran nontunai di Provinsi Maluku. UE dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan transaksi, mulai dari pembayaran belanja hingga penggunaannya pada sektor transportasi dan retribusi. Dalam implementasinya, UE mengharuskan pengguna melakukan pengisian saldo terlebih dahulu sebelum digunakan untuk bertransaksi. Berdasarkan media penyimpanannya, UE terdiri atas dua jenis, yaitu berbasis *server* (*server based*) dan berbasis kartu (*card based*). Kehadiran UE menjadi salah satu alternatif instrumen pembayaran nontunai yang dapat mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.

Kinerja transaksi Uang Elektronik (UE) di Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 tetap mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun terdapat perlambatan pada sisi volume transaksi. Secara nominal, transaksi UE tercatat sebesar Rp137,44 miliar atau tumbuh sebesar 25,28% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan


Grafik 4.18 Perkembangan Nom. Transaksi UE Provinsi Maluku

Grafik 4.19 Perkembangan Vol. Transaksi UE Provinsi Maluku

sebelumnya yang tercatat sebesar Rp134,22 miliar atau tumbuh 23,56% (yoy). Sementara itu, volume transaksi UE mencapai 1,67 juta transaksi, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun secara tahunan tumbuh sebesar 17,93% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,50% (yoy).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa akseptasi pembayaran nontunai melalui Uang Elektronik di Provinsi Maluku terus terjaga, tercermin dari pertumbuhan nominal dan peningkatan volume transaksi. Pertumbuhan nominal yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan volume juga mengindikasikan adanya peningkatan rata-rata nilai transaksi UE. Perkembangan tersebut turut didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pada Triwulan II 2026, serta menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan

instrumen pembayaran nontunai dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

4.2.7. EDUKASI MASYARAKAT DAN KEGIATAN LAINNYA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku telah melaksanakan berbagai program strategis bersama *stakeholders* di Triwulan II 2026 dalam rangka mendorong perluasan dan akseptasi digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Maluku, di antaranya:

a. Pemilihan Duta QRIS & Pelindungan Konsumen

Pemilihan Duta QRIS dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Provinsi Maluku dilaksanakan berkolaborasi dengan kegiatan Pemilihan Duta Kampus Universitas Pattimura. Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi yang melalui rangkaian wawancara dan presentasi. Dalam kegiatan tersebut, terpilih masing-masing satu Duta QRIS dan Duta PK yang diharapkan dapat memperkuat peran generasi muda sebagai agen edukasi dan *role model* dalam meningkatkan literasi sistem pembayaran nontunai dan PK, yang dimulai dari lingkungan kampus dan selanjutnya menjangkau masyarakat secara lebih luas.

b. Salam Fest x Moluccas Digifest

Salam Fest x Moluccas Digifest 2026 merupakan salah satu flagship event KPwBI Provinsi Maluku yang mengintegrasikan rangkaian *road to Fesyar* (Festival Ekonomi Syariah) dan *road to FEKDI* (Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia). Kegiatan yang diselenggarakan pada 16 s.d. 18 April 2026 tersebut menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan interaktif, antara lain seminar dan diskusi terkait keuangan syariah, Pelindungan Konsumen, bedah buku, serta berbagai perlombaan. Kegiatan turut diramalkan oleh 32 UMKM lokal

yang bergerak pada sektor makanan dan minuman serta *fashion* wastra, yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai kanal pembayaran. Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh sekitar 38 ribu pengunjung yang menjadi sarana untuk mendorong akseptasi dan penggunaan pembayaran digital, khususnya QRIS di kalangan masyarakat dan pelaku UMKM, memperluas literasi ekonomi dan keuangan syariah, serta memajukan UMKM lokal.

c. Edukasi Sistem Pembayaran Digital & Pelindungan Konsumen

KPwBI Provinsi Maluku terus memperluas edukasi sistem pembayaran digital dan Pelindungan Konsumen kepada berbagai segmen masyarakat. Kegiatan edukasi dilaksanakan melalui berbagai kanal, antara lain sosialisasi dan edukasi langsung, *open booth* pada berbagai kegiatan daerah, serta *Training of Trainers* (ToT) yang berkolaborasi dengan perbankan. Untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materi dan keterlibatan peserta, edukasi dikemas secara interaktif melalui permainan (*games*) dan *post-test* sebagai sarana untuk mengukur pemahaman peserta. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat literasi masyarakat sekaligus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

d. Penguatan Implementasi ETPD di Provinsi Maluku

Sebagai bagian dari peran Bank Indonesia sebagai *advisory* pemerintah daerah, KPwBI Provinsi Maluku terus mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui sinergi dengan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Implementasi ETPD diarahkan pada perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah, baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Pada sisi pendapatan, digitalisasi didorong melalui

penyediaan dan pemanfaatan berbagai kanal pembayaran nontunai, antara lain QRIS, *Virtual Account*, ATM, *mobile banking*, hingga Agen Bank.

Penguatan komitmen implementasi ETPD di Provinsi Maluku turut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Implementasi SIPD-RI *Online* dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh Gubernur Provinsi Maluku, Kepala KPwBI Provinsi Maluku, Direktur Utama Bank Maluku Malut selaku Bank RKUD, serta seluruh Kepala BPKAD di wilayah Maluku. Penandatanganan tersebut dilaksanakan pada rangkaian seremoni pembukaan Salam Fest x Moluccas Digifest 2026 dan menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Untuk mempercepat implementasi ETPD, KPwBI Provinsi Maluku juga melaksanakan *capacity building* dan studi tiru bagi Pemda potensial di Kota Balikpapan, sebagai daerah penerima penghargaan TP2DD terbaik di wilayah Kalimantan. Kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran atas praktik terbaik (*best practice*) implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik daerah di Maluku. Selain itu, KPwBI Provinsi Maluku mendorong penyusunan dan implementasi roadmap ETPD pada masing-masing pemerintah daerah sebagai acuan untuk memperjelas target, tahapan, dan rencana kerja digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Dalam rangka memperkuat kesiapan pemerintah daerah mengikuti *Championship* P2DD yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KPwBI Provinsi Maluku turut menyelenggarakan *Mini Championships* P2DD sebagai sarana simulasi dan evaluasi capaian digitalisasi daerah berbasis kompetisi. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh TP2DD di Maluku dengan Bapenda sebagai koordinator, sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kesiapan pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi ETPD.

BOKS 2

QRIS JELAJAH INDONESIA 2026: JELAJAH KULINER NUSANTARA, BAYAR PRAKTIS DENGAN QRIS

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia menjalankan salah satu mandat utama yaitu mengatur, menjaga, dan mengawasi kelancaran sistem pembayaran guna mewujudkan ekosistem sistem pembayaran yang **CeMuMuAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Andal)**. Implementasi peran tersebut dilaksanakan secara konkret melalui berbagai inisiatif termasuk digitalisasi dan kampanye sistem pembayaran. Hal ini selaras dengan pesatnya era digitalisasi yang semakin mendorong perubahan perilaku masyarakat dan bertransformasi menuju pola aktivitas yang cepat, praktis, dan terintegrasi secara digital. Kondisi ini sejalan dengan angka Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Provinsi Maluku yang semakin membaik setiap tahunnya.

Namun demikian, akseptasi digitalisasi termasuk adopsi pembayaran digital di Provinsi Maluku masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Kondisi tersebut memerlukan sinergi lintas instansi yang lebih masif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kondisi ini tercermin dari angka Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Provinsi Maluku Tahun 2025 sebesar 39,24 poin dan berada di bawah angka rata-rata nasional sebesar 44,53 poin. Terutama pada pilar infrastruktur dan ekosistem sebagai penentu kualitas ekosistem dan lingkungan bagi masyarakat dalam

pemanfaatan teknologi untuk kegiatan produktif dengan geografis sebagai daerah kepulauan. Di sisi lain, angka tersebut menunjukkan bahwa dari sisi kesiapan masyarakat, peluang perluasan dan akseptasi digitalisasi di wilayah Maluku masih terbuka. Sejalan dengan keterampilan digital yang relatif baik dan dinilai memiliki kemampuan adaptasi yang memadai terhadap penggunaan sistem pembayaran digital.

Dalam rangka mendukung percepatan literasi digital masyarakat, termasuk akseptasi pembayaran digital, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali menyelenggarakan salah satu *event* tahunan yakni **QRIS Jelajah Indonesia Tahun 2026**. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital serta literasi masyarakat melalui pengenalan instrumen, kanal, dan infrastruktur pembayaran digital. Pada tahun ketiga penyelenggaraannya, QRIS Jelajah Indonesia mengangkat tema Kuliner Nusantara. Tema ini diangkat selaras dengan upaya Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan beragam kuliner khas dan primadona di Provinsi Maluku. Salah satunya inovasi yang dilaksanakan adalah QRIS STAR, dimana Bank Indonesia melakukan seleksi dan kurasi dari berbagai *merchant* kuliner di Provinsi Maluku. Setelah itu, keseluruhan *merchant* terpilih dibagi menjadi 2 (dua) kategori

Tabel Boks 2.1. Data Kementerian Komunikasi dan Digital RI

Pilar Penyusun	Nasional	Maluku	Maluku Tengah	Tual	Ambon	Maluku Barat Daya	Seram Bagian Timur	Maluku Tenggara	Kepulauan Aru	Buru	Buru Selatan	Seram Bagian Barat	Kepulauan Tanimbar
Indeks Masyarakat Digital	44,53	39,24	50,44	48,82	48,66	42,49	40,37	37,43	34,92	33,87	33,78	31,61	29,26
Pilar Infrastruktur dan Ekosistem	53,06	42,63	46,85	47,37	58,16	38,25	43,12	43,26	36,43	37,62	35,24	40,35	42,23
Pilar Keterampilan Digital	49,28	52,71	76,38	70,99	57,22	55,55	53,90	49,25	51,85	44,78	51,29	36,27	32,38
Pilar Pemberdayaan	34,32	24,34	38,65	33,15	38,26	36,23	27,76	18,95	16,99	18,02	11,19	19,19	9,34
Pilar Pekerjaan	42,91	39,01	34,98	42,91	40,14	38,55	37,05	42,55	36,98	38,71	42,95	33,63	40,66
Catatan:		Di bawah rata-rata nasional					Di atas rata-rata nasional						

yakni Kuliner *Legend* dan Kuliner *Hidden Gem* berdasarkan tingkat popularitas, lama usaha, dan ketersediaan QRIS sebagai salah satu kanal pembayaran. Berikutnya, *merchant* akan mendapatkan kesempatan untuk diperkenalkan dan dipromosikan oleh tim Jelajah dengan tujuan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Terakhir, pemenang dari QRIS STAR pada QRIS Jelajah Indonesia akan mendapatkan apresiasi sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap pengembangan sektor pariwisata dan kuliner di wilayah Maluku.

Penyelenggaraan QRIS Jelajah Indonesia wilayah Maluku tahun ini dilaksanakan di 2 (dua) tempat ikonis Provinsi Maluku yakni Negeri Rutong, Kota Ambon dan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari terhitung sejak 13 s.d. 17 Juli 2026 dan diikuti oleh 6 tim Jelajah yang terpilih dari puluhan pesaing dengan berbagai latar belakang. Keseluruhan tim melakukan 3 (tiga) jenis misi mencakup misi lapangan, misi postingan media sosial, dan misi kuliner. Misi lapangan bertujuan untuk mengampanyekan inisiatif dan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran, mencakup QRIS, BI-FAST, Pelindungan Konsumen, Manajemen Risiko, Keamanan dan Ketahanan Siber, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Kartu Kredit Indonesia, Cinta, Bangga, Paham Rupiah, serta promosi kuliner dan budaya

Provinsi Maluku. Berikutnya misi postingan media sosial, dimana peserta diajak untuk membuat sebuah konten edukasi dari misi lapangan yang dilaksanakan dengan konsep paling kreatif yang dimiliki masing-masing tim. Terakhir, pelaksanaan misi kuliner yang memperkenalkan dan mempromosikan berbagai *merchant* terpilih sebagai upaya mendorong akseptasi pembayaran digital pada sektor makanan dan minuman.

Rangkaian kegiatan QRIS Jelajah Indonesia wilayah Maluku Tahun 2026 diawali dengan Opening Ceremony yang dibuka oleh Wakil Walikota Ambon di Desa Wisata Negeri Rutong. Kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia untuk terus bersinergi erat dengan pemerintah dan industri dalam memperluas akseptasi pembayaran digital dan penguatan aspek pelindungan konsumen sekaligus menjadi penanda bahwa perjalanan tim Jelajah dalam mengedukasi dan mendorong digitalisasi pembayaran di sektor kuliner dan pariwisata di Maluku telah dimulai. Pelaksanaan kegiatan pada hari pertama dilanjutkan dengan pelaksanaan Misi Elektronifikasi Sektor Pariwisata dimana peserta bersama pelaku UMKM dan pengelola wisata mencoba kemudahan bertransaksi menggunakan QRIS dan harapannya dapat diperluas guna membangun ekosistem pembayaran yang semakin mudah, cepat, aman, dan praktis bagi masyarakat maupun wisatawan.



Gambar Boks 2.1. Pembukaan dan Pelepasan Peserta QRIS Jelajah Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2026

Kegiatan QRIS Jelajah Indonesia berlanjut dengan semangat memperluas implementasi transaksi digital ke Pulau Banda. Tim Jelajah selanjutnya menjalankan Misi Elektronifikasi Sektor Transportasi melalui edukasi yang dikemas interaktif terkait pemesanan tiket secara daring dan pembayaran menggunakan kanal nontunai. Sebanyak lebih dari 80 penumpang kapal laut sudah teredukasi dengan baik sekaligus wujud nyata sinergi pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih praktis, aman, dan mendukung percepatan transformasi digital di sektor transportasi. Setibanya di Pulau Banda, Tim Jelajah melanjutkan Misi: QRIS Donasi dan Wisata Budaya, dengan mengunjungi destinasi wisata bersejarah sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan donasi di rumah ibadah menggunakan QRIS seperti Benteng Belgica, Gereja Tua, Rumah Bung Hatta, Istana Mini, dan lainnya. Melalui kemudahan transaksi digital, semangat berbagi dapat berjalan berdampingan dengan upaya melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya yang menjadi warisan berharga Maluku.

Penjelajahan di hari ketiga dilakukan dengan pelaksanaan misi yang memperkuat pemahaman tentang inisiatif pembayaran digital, serta pelestarian warisan budaya dan kuliner Nusantara. Tim Jelajah memulai hari dengan mengerjakan Misi QRIS TAP, sebuah

inovasi fitur QRIS berbasis teknologi NFC (*Near Field Communication*) yang memberikan pengalaman transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan mudah. Selanjutnya, Tim Jelajah diharuskan menyelesaikan Misi Edukasi Pelindungan Konsumen, Ketahanan dan Keamanan Siber, serta Manajemen Risiko kepada para siswa dan mahasiswa. Sebanyak lebih dari 187 siswa dan mahasiswa berhasil mendapatkan edukasi yang bermanfaat dan tentunya menjadi bekal dalam meningkatkan kesadaran diri untuk bertransaksi secara aman, bijak, dan bertanggung jawab di era digital. Selanjutnya, misi dilanjutkan dengan penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan melalui edukasi dan kampanye ASN Go Digital kepada lebih dari 83 aparatur sipil negara dari berbagai OPD di Banda Neira. Berikutnya, terdapat 40 wisatawan yang berhasil diedukasi dan mencoba kemudahan transaksi menggunakan BI-FAST *Proxy Address* sebagai salah satu pilihan layanan transfer yang cepat, murah, dan andal, serta berkontribusi dalam mendukung ekosistem pembayaran digital di Indonesia.

Tidak hanya di Pulau Banda, Tim Jelajah juga turut melakukan edukasi mengenai digitalisasi sistem pembayaran dan akuisisi pengguna baru di 6 (enam) desa yang tersebar di Pulau Banda Besar, mencakup Desa Lonthoir, Boiyauw, Walang, Salemon, Dender, dan Rajawali dengan



Gambar Boks 2.2. Keseruan QRIS Jelajah Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2026

total peserta sebanyak 401 orang. Pemberian edukasi tidak hanya sebatas pelaksanaan misi melainkan juga mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan mampu memberikan perlindungan dari risiko kejahatan siber di tengah maraknya modus penipuan yang terjadi saat ini. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Tim Jelajah melaksanakan Misi QRIS Peduli Lingkungan, dengan melakukan penanaman pohon pala sebagai salah satu identitas dan komoditas unggulan di Provinsi Maluku. Kemeriahan pelaksanaan misi QRIS Jelajah Indonesia wilayah Maluku ditutup dengan pelaksanaan Misi Cinta, Bangga, dan Pahami Rupiah melalui edukasi dan memberikan layanan

penukaran Uang Tidak Laik Edar (UTLE) kepada pedagang di Pasar Pulau Banda. Tujuannya memberikan pemahaman kepada pedagang di pasar untuk selalu menjaga dan merawat uang Rupiah yang menjadi simbol kedaulatan bangsa.

Setiap destinasi yang dikunjungi, setiap *merchant* yang terlibat, setiap edukasi yang diberikan, dan setiap transaksi QRIS melalui sinergi dan kolaborasi yang dibangun antara pemerintah, industri, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi bukti nyata kita bersama dalam membangun ekosistem dan akseptasi pembayaran digital yang lebih luas di Provinsi Maluku serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 5

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

5.1. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi ketenagakerjaan Provinsi Maluku pada periode laporan menunjukkan perbaikan yang tercermin dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Maluku pada Februari 2026 tercatat sebesar 67,84%, lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebesar 67,56%. Peningkatan TPAK tersebut didorong oleh bertambahnya jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja pada periode laporan. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,80%, menurun dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebesar 5,95%. Penurunan angka TPT pada Februari 2026 tersebut mengindikasikan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Maluku.

5.1.1. PENDUDUK USIA KERJA DAN ANGKATAN KERJA

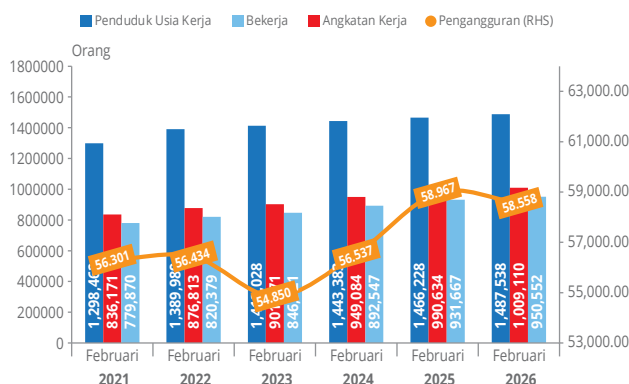
Peningkatan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) pada periode Februari 2026 menunjukkan optimisme kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Maluku. Jumlah PUK pada Februari 2026 tercatat sebanyak 1.487.538 orang atau mengalami

peningkatan sebesar 21.310 orang dibandingkan dengan Februari 2025 yang tercatat sebesar 1.466.228 orang. Sejalan dengan peningkatan PUK, jumlah angkatan kerja di Provinsi Maluku pada Februari 2026 juga meningkat menjadi 1.009.110 orang, lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebesar 990.634 orang. Dari total angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk bekerja tercatat sebanyak 950.552 orang, sementara jumlah pengangguran tercatat sebanyak 58.558 orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang sejalan dengan bertambahnya penduduk usia kerja serta menurunnya jumlah pengangguran mengindikasikan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja di Provinsi Maluku. Ke depan, perbaikan tersebut perlu didukung melalui penguatan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Selain itu, peningkatan investasi perlu terus didorong untuk memperluas kesempatan kerja sehingga tambahan tenaga kerja dapat terserap secara lebih optimal.

5.1.2. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Maluku mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Pada Februari 2026, angka TPAK di Provinsi Maluku tercatat sebesar 67,84%, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 67,56%. Peningkatan capaian TPAK per Februari 2026 sejalan dengan kinerja positif perekonomian Maluku pada Triwulan I 2026 yang tumbuh 5,16% (yoy). Selain itu, kondisi peningkatan TPAK juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah PUK beriringan dengan peningkatan serapan tenaga kerja.

Angka Penduduk Setengah Pengangguran pada Februari 2026 menurun dibandingkan



Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 5.1 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku

Tabel 5.1. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku

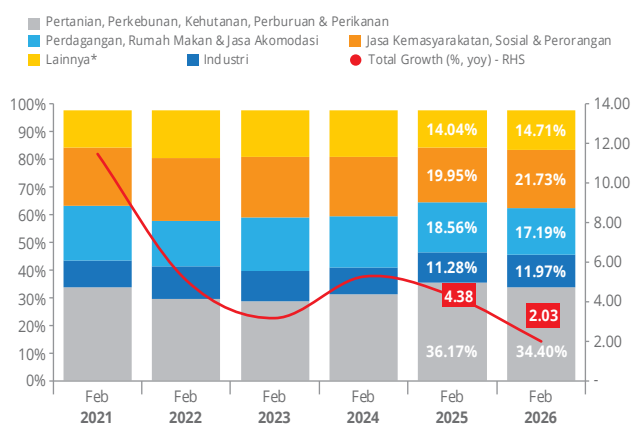
Kondisi Ketenagakerjaan	Februari 2025	Februari 2026	Perubahan Februari 2025 - Februari 2026	
	Orang	Orang	Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	1.466.228	1.487.538	21.310	1,45
Angkatan Kerja	990.634	1.009.110	18.476	1,87
a. Bekerja	931.667	950.552	18.885	2,03
b. Pengangguran	58.967	58.558	-409	(0,69)
	Persen	Persen	Persen	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,56	67,84	0,28	↑
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,95	5,80	-0,15	↓
	-	Februari 2024	Februari 2025	Februari 2026
Setengah Pengangguran (Orang)		98.318	96.672	85.710
Rasio Setengah Pengangguran (Persen)		11,02	10,38	9,02

Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

dengan Februari 2025. Penduduk setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam setiap minggu atau masih mencari pekerjaan atau masih mau menerima pekerjaan tapi belum bekerja. Jumlah Penduduk Setengah Pengangguran di Provinsi Maluku pada Februari 2026 tercatat sebanyak 85.710 orang atau 9,02% dari jumlah seluruh penduduk bekerja, lebih rendah dibandingkan Februari 2025 sebanyak 96.672 orang atau 10,38% (Tabel 5.1). Kondisi tersebut mengindikasikan membaiknya kualitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Maluku, yang tercermin dari menurunnya jumlah dan proporsi tenaga kerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal.

5.1.3. PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA

Struktur tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Maluku didominasi oleh Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PKP) serta LU Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Pada Februari 2026, LU PKP mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 326.990 orang (34,40% total tenaga kerja di Maluku). Melihat jumlah tersebut, LU PKP menjadi LU yang menyerap tenaga kerja paling besar di Provinsi Maluku. Sementara itu, LU Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan menjadi LU kedua terbesar yang menyerap tenaga kerja di Provinsi Maluku dengan jumlah sebesar 206.555



Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

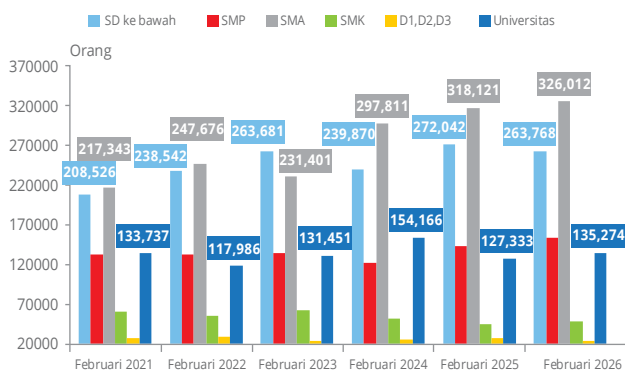
Grafik 5.2 Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

orang (21,73% total tenaga kerja di Maluku). Secara umum, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, struktur tenaga kerja sektoral di Provinsi Maluku relatif stabil dengan dominasi Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP), LU Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan, LU Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, serta LU Industri sebagai sektor utama penyerap tenaga kerja.

5.1.4 PENDUDUK BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Maluku pada Februari 2026 masih didominasi oleh jenjang Sekolah

Menengah Atas (SMA). Jumlah penduduk yang bekerja dengan jenjang SMA tercatat sebanyak 326.012 orang, atau mengalami peningkatan dibandingkan periode Februari 2025 yang tercatat sebanyak 318.121 orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja dengan jenjang SD ke bawah tercatat menurun menjadi 263.768 orang dibandingkan dengan periode Februari 2025 yang tercatat sebanyak 272.042 orang. Di sisi lain, jumlah penduduk bekerja pada jenjang pendidikan tertinggi, yaitu tingkat Universitas, mengalami peningkatan dari 127.333 orang pada Februari 2025 menjadi 135.274 orang pada Februari 2026. Peningkatan jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi mengindikasikan membaiknya kualitas tenaga kerja di Provinsi Maluku. Kondisi tersebut menunjukkan beberapa hal positif, terutama terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dan potensi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Namun demikian, program pengembangan ekonomi melalui peningkatan investasi terhadap sektor-sektor padat karya perlu terus didorong sehingga dapat terus meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kerjasama antar dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha (*link and match*) sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja.

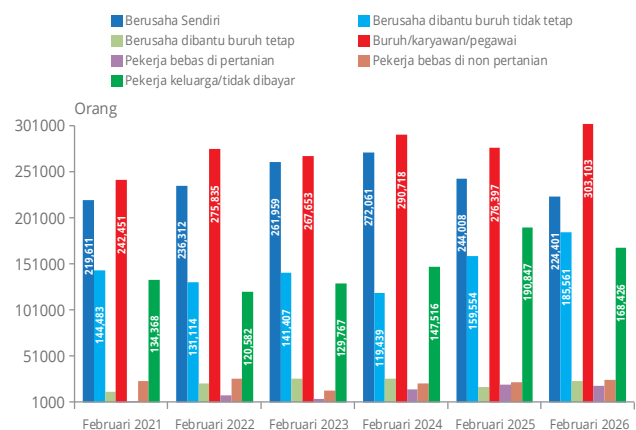


Sumber : BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 5.3 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Tamatan Tingkat Pendidikan

5.1.5. PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Pada Februari 2026, status pekerjaan utama penduduk bekerja di Provinsi Maluku masih didominasi oleh penduduk dengan status **Buruh/Karyawan/Pegawai** yang tercatat sebesar **31,89% dari total penduduk bekerja**. Jumlah penduduk bekerja dengan status pekerjaan utama Buruh/Karyawan/Pegawai dan Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap mengalami peningkatan menjadi masing-masing sebesar 303.103 orang dan 185.561 orang, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang masing-masing berjumlah 276.397 orang dan 159.554 orang. Di sisi lain, jumlah penduduk bekerja dengan status Berusaha Sendiri menurun menjadi 224.401 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 244.008 orang. Penduduk bekerja dengan status Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar juga mengalami penurunan menjadi 168.426 orang, menurun dibandingkan periode Februari 2025 yang berjumlah 190.847 orang. Kondisi ini sejalan dengan kinerja positif pada sektor yang menyerap penduduk bekerja terbesar di Provinsi Maluku yaitu LU PKP dan LU Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan.



Sumber : BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 5.4 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Tabel 5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Karakteristik

Karakteristik Pengangguran	Februari 2025	Februari 2026	Perubahan Februari 2025 - Februari 2026
	(Persen)	(Persen)	(Persen Poin)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,95	5,80	-0,15
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	7,81	7,65	-0,16
Perdesaan	4,74	4,45	-0,29
TPT Menurut Jenis Kelamin			
Laki-laki	5,52	5,37	-0,15
Perempuan	6,54	6,41	-0,13

Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

5.1.6. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

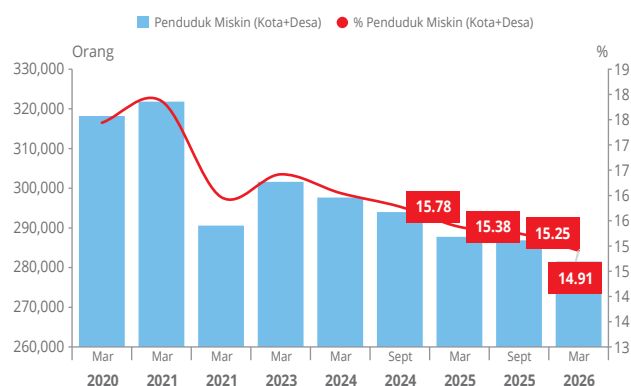
Tingkat pengangguran di Provinsi Maluku mengalami penurunan, tercermin dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tercatat sebesar 5,80% pada Februari 2026. Berdasarkan tempat tinggal, TPT di wilayah perkotaan dan perdesaan masing-masing tercatat sebesar 7,65% dan 4,45% pada Februari 2026 lebih rendah dibandingkan Februari 2025 yang masing-masing sebesar 7,81% dan 4,74%. Penurunan TPT pada wilayah perkotaan maupun perdesaan ini mengindikasikan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja, meskipun tingkat pengangguran di wilayah perkotaan masih relatif tinggi dibandingkan pedesaan. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, TPT Laki-laki tercatat menurun dari 5,52% pada Februari 2025 menjadi 5,37% pada Februari 2026. TPT perempuan juga mengalami penurunan dari 6,54% menjadi 6,41% pada periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja baik pada laki-laki maupun perempuan.

5.2. PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku tercatat tumbuh positif yang tercermin dari kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang relatif terjaga sepanjang Tahun 2025 hingga Triwulan I 2026 dan penurunan persentase jumlah penduduk miskin kota maupun desa di wilayah Maluku pada Maret

2026. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, tingkat pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga pada Triwulan I 2026 tercatat tumbuh positif sebesar 6,56% (yoy). Sementara itu, indikator angka kemiskinan pada Triwulan I 2026 mengalami perbaikan yang tercermin dari persentase jumlah penduduk miskin kota maupun desa di Provinsi Maluku yang tercatat menurun dari 15,38% pada Maret 2025 menjadi 14,91% pada Maret 2026.

Perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat maluku yang tercatat pada Maret 2026 ini sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku yang mencapai 5,16% (yoy) pada Triwulan I 2026. Capaian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku pada Triwulan I 2026. Selain itu, peningkatan kesejahteraan juga didukung oleh adanya penyesuaian Upah Minimum Pegawai (UMP) Maluku di Tahun 2026 yang meningkat



Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Maluku

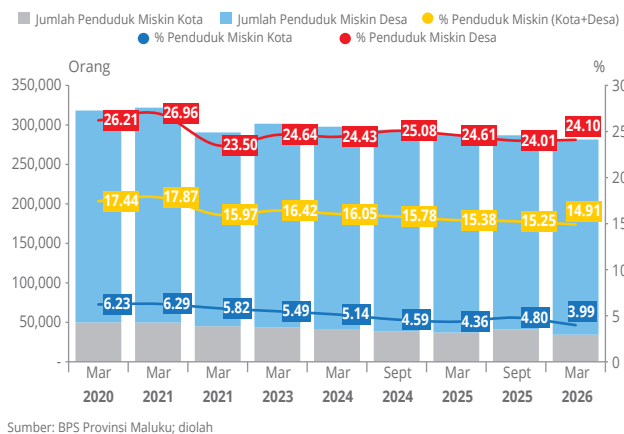
6,1% (yoy). Secara umum, peningkatan kondisi kesejahteraan juga mengindikasikan bahwa ekspansi ekonomi khususnya pada sektor-sektor unggulan Maluku telah terdistribusi dengan baik, sehingga mampu meningkatkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

5.2.1. JUMLAH PENDUDUK MISKIN

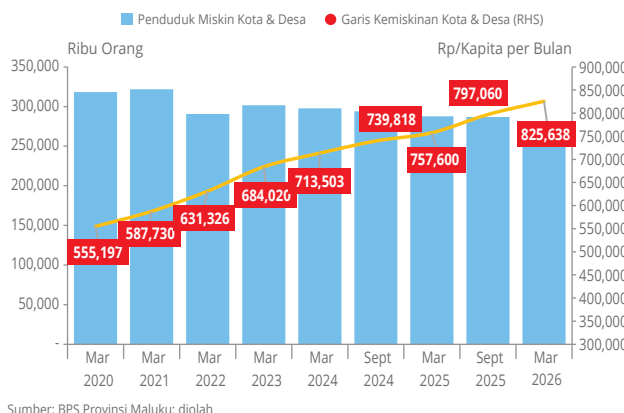
Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di desa maupun kota mengalami penurunan seiring tren positif kinerja perekonomian. Jumlah agregat penduduk miskin (kota dan desa) pada Maret 2026 tercatat sebanyak 281,54 ribu orang (14,91% dari total penduduk), menurun dibandingkan dengan Maret 2025 yang tercatat

sebesar 287,76 ribu orang (15,38% dari total penduduk). Jumlah penduduk miskin hingga periode Maret 2026 masih didominasi oleh daerah perdesaan dengan jumlah 247,08 ribu orang, atau 87,76% dari total penduduk miskin di Provinsi Maluku. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin perdesaan pada Maret 2026 mengalami penurunan dari 250,60 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 247,08 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin perkotaan pada Maret 2026 juga mengalami penurunan dari 37,16 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 34,46 ribu orang. Penurunan agregat jumlah penduduk miskin (kota dan desa) di Provinsi Maluku antara lain dipengaruhi oleh perubahan garis kemiskinan. Pada Maret 2025, batas garis kemiskinan (kota dan desa) meningkat menjadi Rp825.638/kapita/bulan dari sebelumnya sebesar Rp797.600/kapita/bulan pada Maret 2025.

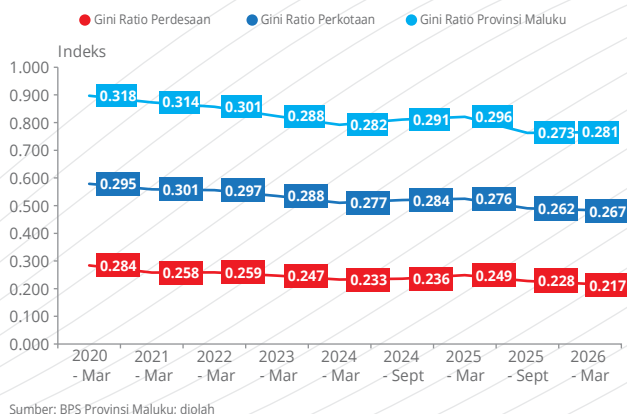
Ke depan, perbaikan kesejahteraan masyarakat Maluku tidak terlepas dari intervensi dan kebijakan strategis pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat kelas ekonomi bawah melalui berbagai program sosial. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan rumah tangga berpenghasilan rendah, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli kebutuhan pangan, Bantuan Sosial Atensi Yatim Piatu, maupun Bantuan Pangan Beras di Provinsi Maluku. Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan program sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku dalam bentuk alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah turut memperkuat intervensi melalui Program Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, serta Koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana untuk memperkuat perekonomian dan



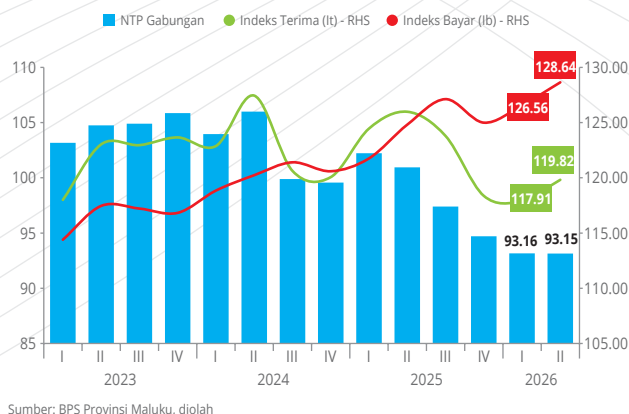
Grafik 5.6 Perkembangan Penduduk Miskin Maluku



Grafik 5.7 Garis Kemiskinan Penduduk Maluku



Grafik 5.8 Perbandingan *Gini Ratio* Perkotaan dan Perdesaan di Maluku



Grafik 5.9 Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan

pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Provinsi Maluku juga melanjutkan program Manggurebe Biking Bae Rumah untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang lebih layak.

5.2.2. TINGKAT KETIMPANGAN (*GINI RATIO*)

Tingkat Ketimpangan (*Gini Ratio*) di Provinsi Maluku pada periode laporan terakhir menunjukkan perbaikan dari capaian awal sebesar 0,296 pada Maret 2025 menjadi sebesar 0,281 pada Maret 2026. Capaian ini didorong oleh *gini ratio* perdesaan yang tercatat menurun dari 0,249 pada Maret 2025 menjadi 0,217 pada Maret 2026 serta *gini ratio* perkotaan yang juga menurun dari 0,276 pada Maret 2025 menjadi 0,267 pada September 2026. Menurunnya *gini ratio* di Provinsi Maluku, baik di desa maupun kota, merupakan capaian indikator yang baik karena menunjukkan ketimpangan ekonomi yang semakin kecil dan peningkatan pemerataan pendapatan yang sejalan dengan capaian pengurangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku pada periode yang sama. Sementara itu, penurunan rasio ini juga berpotensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.

5.2.3. NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku, khususnya petani, dapat tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP). NTP gabungan Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 93,15. Capaian tersebut melandai tipis dibandingkan Triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 93,16. Nilai NTP yang tercatat berada di bawah 100 menunjukkan bahwa kondisi daya tukar petani masih belum optimal. Kondisi capaian NTP gabungan yang berada di bawah *threshold* ini disebabkan oleh kondisi indeks yang dibayarkan petani (IB) masih relatif lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang diterima oleh petani (IT) dari keseluruhan proses produksi pertanian. Indeks yang dibayarkan petani (IB) mengalami peningkatan dari semula 126,56 pada Triwulan I 2026 menjadi 128,64 pada Triwulan II 2026. Sementara itu, indeks yang diterima petani (IT) tercatat meningkat dari 117,91 pada Triwulan I 2026 menjadi 119,82 pada Triwulan II 2026. Kondisi capaian IB dan IT tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan harga yang diterima petani dari hasil produksi pertanian belum mampu mengimbangi peningkatan harga yang harus dibayarkan petani, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi.

Tabel 5.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Dimensi Penyusunnya

Komponen	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	Tahun	69,85	70,16	70,45	70,68	71,02
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,97	14,00	14,08	14,09	14,10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,03	10,19	10,20	10,26	10,51
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp000	8770	8876	9278	9684	9900
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,55	72,04	72,75	73,40	74,09
Pertumbuhan (Rhs)	%	0,29	0,68	0,99	0,89	0,94

Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah

Secara sektoral, penurunan NTP gabungan Provinsi Maluku pada Triwulan II 2026 utamanya dipengaruhi oleh menurunnya NTP subsektor Perkebunan dan Peternakan. NTP subsektor Perkebunan dan Peternakan pada Triwulan II 2026 masing-masing tercatat sebesar 84,62 dan 98,02, menurun dibandingkan Triwulan I 2026 yang masing-masing sebesar 85,82 dan 98,17. Namun demikian, beberapa subsektor mengalami peningkatan NTP yang turut menahan penurunan NTP agregat. NTP Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan pada Triwulan II 2026 tercatat masing-masing sebesar 89,02, 110,92 dan 116,98, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 88,20, 108,29 dan 115,25. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Triwulan II 2026, khususnya Hari Raya Idul Adha dan Paskah. Selain itu, momentum wisuda turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan dan hasil perikanan.

5.3. PEMBANGUNAN MANUSIA

Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Maluku tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercatat pada Tahun 2025 meningkat 0,94% (yoy) atau sebesar 0,69 poin menjadi 74,09. Peningkatan IPM Provinsi Maluku didorong oleh peningkatan pada semua dimensi pendukungnya. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir Tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 71,02 tahun, meningkat 0,34 tahun dibandingkan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, pada dimensi pengetahuan, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 14,10 tahun, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak (berumur 7 tahun) mampu menyelesaikan pendidikan hingga setara Diploma (D1). Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan Tahun 2024. Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas turut meningkat 0,25 tahun pada Tahun 2025 dari tahun sebelumnya 10,26 tahun menjadi 10,51 tahun. Sejalan dengan hal itu, rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga tercatat meningkat dari Rp9,68 juta pada Tahun 2024 menjadi Rp9,90 juta pada Tahun 2025.



BAB 6

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH



6.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian domestik diperkirakan tetap tumbuh solid di tengah dinamika global dan tekanan geopolitik maupun fragmentasi perdagangan yang masih berlanjut di Tahun 2026. Perekonomian dunia pada Tahun 2026 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,00% (yoy), relatif lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya dalam World Economic Outlook (WEO) April 2026 sebesar 3,10% (yoy). Revisi tersebut mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi global yang masih menghadapi tekanan akibat konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga energi, meskipun sebagian tertahan oleh tetap kuatnya investasi dan permintaan terkait teknologi seiring pesatnya perkembangan dan adopsi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*). Dampak terhadap masing-masing negara bervariasi, bergantung pada eksposur terhadap konflik geopolitik, posisi dalam rantai nilai industri teknologi global, serta status sebagai eksportir atau importir energi. Akibatnya, prospek pertumbuhan ekonomi global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang relatif tinggi.

Perekonomian domestik diperkirakan tetap kuat dan tumbuh positif pada kisaran 4,9 – 5,7% (yoy). Pertumbuhan perekonomian domestik di Tahun 2026 didukung oleh penguatan Konsumsi Pemerintah ditopang berlanjutnya realisasi program prioritas serta percepatan belanja, terutama gaji ke-13 ASN dan bantuan sosial. Konsumsi rumah tangga juga terjaga didorong oleh berbagai stimulus Pemerintah, seperti bantuan pangan, potongan tarif transportasi, serta program magang dan vokasi. Investasi terutama didukung oleh investasi bangunan terkait realisasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di tengah investasi swasta yang perlu terus ditingkatkan, sementara kinerja ekspor perlu terus diperkuat. Ke depan, program prioritas Pemerintah terus dioptimalkan, bersinergi dengan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

Real GDP (% yoy)	2025	2026*	2027*
Dunia	3,5	3,0	3,4
Negara Maju	1,9	1,7	1,8
Amerika Serikat	2,1	2,3	2,2
Kawasan Eropa	1,4	0,9	1,2
Jepang	1,1	0,6	0,7
Negara Berkembang	4,5	3,8	4,5
Tiongkok	5,0	4,6	4,1
India	7,7	6,4	6,7
Amerika Latin	2,4	2,4	2,7
Negara Berkembang Eropa	2,0	1,9	2,1
Timur Tengah dan Asia Tengah	3,7	0,7	6,5

* Proyeksi World Economic Outlook, Juli 2026

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,98 – 5,38% (yoy). Kuatnya kinerja perekonomian Maluku Tahun 2026 ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga yang diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat didorong oleh peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku yang meningkat 6,10% di Tahun 2026, serta masih terjaganya optimisme masyarakat yang tercermin dari hasil Survei Konsumen dimana Indeks Keyakinan Konsumen masyarakat Maluku masih berada di atas *threshold* optimis 100.

Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang terjaga ditengah perbaikan pendapatan dan inflasi yang terjaga diperkirakan mampu mendorong kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) sebagai komponen dengan pangsa terbesar dalam PDRB Provinsi Maluku. Terjaganya daya beli sejalan dengan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku. Pada Tahun 2026, UMP Maluku ditetapkan sebesar Rp3.334.490 atau meningkat 6,10% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, terjaganya daya beli tersebut juga ditopang oleh realisasi inflasi yang diperkirakan berada dalam rentang target inflasi nasional. Kenaikan UMP tersebut secara langsung

memberikan tambahan ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok pekerja formal. Selain itu, Konsumsi Pemerintah juga berkontribusi melalui realisasi belanja yang diarahkan pada program-program prioritas seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas layanan publik, serta pembangunan infrastruktur dasar di berbagai wilayah. Lebih lanjut, kinerja ekspor luar negeri diperkirakan turut menopang pertumbuhan ekonomi Maluku. Dari sisi *demand*, prospek ekspor didukung oleh tetap terjaganya permintaan perikanan dari negara-negara mitra dagang utama. Sementara itu, dari sisi *supply*, prospek ekspor didukung oleh mulai beroperasinya dua Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru pada Semester II 2026 serta rencana pengoperasian 2 (dua) UPI tambahan hingga akhir Tahun 2026, yang diperkirakan akan meningkatkan kapasitas pengolahan, jumlah armada penangkapan, dan volume produksi perikanan di Provinsi Maluku.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Maluku 2026 diperkirakan ditopang oleh kinerja LU PKP dan LU Perdagangan dan Reparasi. Kinerja LU PKP diperkirakan tetap tumbuh solid pada Tahun 2026, didukung oleh implementasi program swasembada pangan nasional yang mendorong peningkatan produksi komoditas pangan strategis, serta meningkatnya kapasitas produksi subsektor perikanan seiring beroperasinya 2 (dua) Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru pada Tahun 2026 dan rencana pengoperasian 2 (dua) UPI tambahan pada Semester II 2026. Di sisi lain, prospek pertumbuhan sektor PKP tetap menghadapi sejumlah risiko, terutama potensi gangguan cuaca yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan perikanan. Selanjutnya, kinerja LU Perdagangan dan Reparasi diperkirakan tetap tumbuh positif, didukung oleh peningkatan aktivitas distribusi barang, terjaganya stabilitas inflasi, serta perbaikan daya beli masyarakat sejalan dengan peningkatan UMP Maluku Tahun 2026.

6.2. PROSPEK INFLASI

Bank Indonesia memprakirakan realisasi IHK Provinsi Maluku Tahun 2026 berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1% (yoy).

Optimisme tersebut dilandasi beberapa faktor sebagai berikut:

- Kebijakan moneter yang bersifat *forward looking* dan *pre-emptive* untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran sejalan dengan *stance* kebijakan moneter yang *pro-stability*.
- Sinergitas dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
- Penguatan bauran kebijakan moneter guna memitigasi risiko tekanan inflasi termasuk dari kenaikan *imported inflation* serta kenaikan harga energi dan pangan global.
- Pelaksanaan GPIPS yang lebih intensif untuk pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan, termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca (El Nino) terhadap harga pangan

Upaya pengendalian inflasi di Provinsi Maluku pada Tahun 2026 diperkirakan masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko, baik yang bersumber dari faktor global maupun domestik. Dari sisi eksternal, salah satu risiko utama adalah meningkatnya ketidakpastian global dan eskalasi ketegangan geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas global serta gangguan rantai pasok internasional. Kondisi tersebut dapat meningkatkan harga berbagai input produksi strategis, seperti plastik, energi, dan bahan baku industri lainnya, sehingga mendorong peningkatan biaya produksi dan tekanan inflasi inti (*core inflation*). Dari sisi domestik, penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) yang lebih tinggi pada Tahun 2026 diperkirakan turut meningkatkan daya beli dan permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas. Meskipun positif bagi

pertumbuhan konsumsi rumah tangga, peningkatan permintaan tersebut berpotensi memberikan tambahan tekanan pada inflasi inti, khususnya pada kelompok barang dan jasa Non-subsidi. Meski demikian, inflasi inti diperkirakan tetap terjaga sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan di tengah harga emas global yang cenderung terkoreksi dalam beberapa bulan terakhir.

Potensi risiko tekanan inflasi yang bersumber dari komoditas *volatile food* diperkirakan bersumber dari faktor cuaca yang mempengaruhi produksi komoditas pangan, ketergantungan yang relatif tinggi terhadap pasokan yang berasal dari luar daerah, rantai distribusi yang relatif panjang, dan transmisi kenaikan harga pangan global. Namun demikian, terdapatnya kebijakan pemerintah untuk memperkuat swasembada pangan pada Tahun 2026 diperkirakan dapat menjadi faktor penahan inflasi seiring peningkatan target produksi komoditas pangan, terutama untuk komoditas padi. Di sisi lain, tekanan inflasi komoditas perikanan diperkirakan masih perlu diwaspadai. Meskipun fenomena El Niño moderat hingga kuat berpotensi meningkatkan produktivitas penangkapan ikan pelagis di perairan Maluku, ketersediaan pasokan di pasar domestik berpotensi tetap terbatas akibat tingginya permintaan dari industri pengolahan, terutama ketika volume tangkapan belum mampu mengimbangi permintaan. Akibatnya, harga ikan konsumsi di pasar lokal berpotensi tetap mengalami tekanan meskipun kondisi penangkapan secara umum membaik. Selain itu, inflasi komoditas pangan dan hortikultura juga diperkirakan tetap terjaga seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk peningkatan produksi dan pasokan melalui program perluasan implementasi *best practice* dan korporatisasi pertanian. Sementara itu, beberapa komoditas *administered prices* berpotensi memberikan tekanan inflasi, terutama dari penyesuaian harga BBM dan avtur seiring fluktuasi harga minyak

dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan eskalasi tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Upaya pengendalian inflasi di wilayah Maluku juga diperkirakan terus berlanjut sejalan dengan penguatan sinergi dan koordinasi di dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

TPID di Wilayah Maluku berkomitmen untuk terus memunculkan berbagai inovasi serta kebijakan pengendalian inflasi yang akan diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Secara umum, strategi pengendalian inflasi masih bertumpu pada strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Koordinasi antara TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi pangan. Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai instrumen pengendalian inflasi di daerah yang didukung oleh optimalisasi realisasi anggaran pemerintah dalam pengendalian inflasi terus diperkuat dan diperluas melalui koordinasi dan sinergi TPID baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Maluku pada Tahun 2026. Adapun, beberapa program kerja TPID yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan untuk menjaga nilai inflasi yang rendah dan stabil utamanya bahan pangan strategis dalam kerangka GPIPS di antaranya sebagai berikut:

- i. Dari sisi **ketersediaan pasokan**, dilakukan dengan melanjutkan *monitoring* harga dan sidak pasar maupun sidak distributor secara berkala utamanya untuk komoditas yang berpotensi mengalami peningkatan ke depan seperti aneka bawang dan aneka cabai. Selanjutnya, dapat dilakukan pemetaan kondisi *surplus/defisit* pasokan di setiap Kabupaten/Kota di Wilayah Maluku guna memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pasokan bahan pangan di setiap wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan KAD Aglomerasi Intra-Wilayah Maluku. Dari sisi hulu, dapat dilakukan

pengembangan klaster pangan skala rumah tangga serta melakukan optimalisasi lahan tidur guna meningkatkan kemandirian tanaman pangan di wilayah Maluku.

- ii. Dalam rangka menciptakan **keterjangkauan harga**, dilakukan penyelenggaraan Gelar Pangan Murah (GPM) / Operasi Pasar khusus komoditas strategis di tengah kondisi pasokan yang terbatas. Selain itu, diperlukan adanya strategi pengendalian harga wajar/kepastian harga pada masa panen untuk menjaga optimisme pelaku usaha maupun petani. Lebih lanjut, dapat dilaksanakan pasar tani / *farmers market* yang mempertemukan antara para Kelompok Tani dan masyarakat secara langsung untuk memotong rantai distribusi biaya yang panjang, sehingga masyarakat dapat memperoleh harga bahan pangan yang terjangkau dan segar dari para petani.
- iii. Guna memastikan **kelancaran distribusi**, TPID secara rutin melakukan pemantauan kelancaran jalur distribusi utama baik dari segi kesiapan infrastruktur maupun ketersediaan bahan bakar serta melanjutkan

kebijakan di level Provinsi terkait pemberian subsidi ongkos angkut bagi angkutan bahan pangan strategis yang mendorong inflasi. Lebih lanjut, perlu dilakukan penguatan realisasi dan transaksi Kerjasama Antar Daerah (KAD) *existing* maupun yang baru akan dilaksanakan. Di sisi lain, perlunya dilakukan penciptaan iklim bisnis yang sehat dengan melakukan minimalisasi peran-peran agregator yang berlebih sehingga dapat menekan tambahan biaya bahan pangan.

- iv. Untuk memperkuat **komunikasi yang efektif**, dilakukan pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk berbelanja bijak melalui berbagai kanal seperti media sosial, serta mendorong gerakan menanam di sekolah dan pekarangan rumah terhadap komoditas penyumbang inflasi seperti aneka cabai. Selain itu, penciptaan komunikasi efektif juga dapat dilakukan melalui adanya optimalisasi peran kepala daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menjaga ekspektasi dan belanja sesuai kebutuhan.

DAFTAR ISTILAH

<i>Administered prices</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk barang/jasa yang harganya diatur oleh pemerintah, seperti harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Barang Modal (<i>Capital</i>)	Barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi.
Bahan baku (<i>Raw Material</i>)	Barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri.
BI Rate	Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya. Sejak Agustus 2016 diubah menjadi <i>BI 7 Days Reverse Repo Rate</i> .
BI-RTGS	Bank Indonesia- <i>Real Time Gross Settlement</i> , merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar (<i>settlement</i>) yang dilakukan secara <i>on-line</i> atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka.
Ekspor dan Impor	Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara, antar provinsi atau antar suatu wilayah tertentu.
<i>Financing/ Loan to Deposit Ratio</i>	Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.
(FDR/ LDR)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan tingkat ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan tingkat ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang.
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi inti	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu Inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental. Dihitung berdasarkan inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .
Inflow	Adalah uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu aktivitas produksi melalui peningkatan kapasitas atau teknologi
Kredit	penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Konsumsi (<i>Consumption</i>)	Kategori barang-barang jadi yang digunakan langsung untuk konsumsi, baik habis pakai maupun tidak.
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/ statistik dan informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dana rah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Mtm	<i>Month to Month</i> . Perbandingan antara data di bulan tertentu dengan data bulan sebelumnya.
Net Inflow	Uang yang diedarkan <i>inflow</i> lebih besar dari <i>outflow</i> .
Non Performing Financing/Loan (NPF/ NPL)	Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional. Kriteria NPF atau NPL adalah: (1) Kurang lancar, (2) Diragukan, dan (3) Macet.
Outflow	Adalah aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Mencerminkan agregat/ keseluruhan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu selama periode tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
Qtq	<i>Quarter to Quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "Meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "Menurun" dan mengabaikan jawaban "Sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian antara saldo bersih suatu lapangan usaha/ sub kategori usaha dengan bobot lapangan usaha/subsektor yang bersangkutan
Volatile Food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu komoditas pangan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
Yoy	<i>Year on Year</i> . Perbandingan antara data di periode tertentu dengan data periode yang sama tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN LAPORAN

Penanggung Jawab:

Surya Alamsyah - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku

Editor:

Rakhmat Pratama - Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku

Tim Penulis:

- **Bab I – Perkembangan Makro Ekonomi Daerah**
Muhammad Abiyyu Adikara T. – Ekonom Yunior KPwBI Provinsi Maluku
- **Bab II – Perkembangan Inflasi Daerah**
Muhammad Fikri Faizan & Asyia I. A. Sain – Kepala Seksi Kehumasan & Asisten Peneliti KPwBI Provinsi
- **Bab III – Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan UMKM**
Muhammad Abiyyu Adikara T. – Ekonom Yunior KPwBI Provinsi Maluku
BOKS 1 – Penguatan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Kegiatan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia Tahun 2026
Athufail Araafi Soeripto – Analis Yunior KPwBI Provinsi Maluku
- **Bab IV – Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**
Ivan Firmanda Dindahutama & Ketut Ananda Kuvera Witana – Ekonom & Analis Yunior KPwBI Provinsi Maluku
BOKS 2 – QRIS JELAJAH INDONESIA 2026: Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan QRIS
Rian Surya Kesuma – Asisten Peneliti KPwBI Provinsi Maluku
- **Bab V – Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan**
Eka Rahmawati P. & Agustina Ginting – Asisten Analis & Asisten Peneliti KPwBI Provinsi Maluku
- **Bab VI – Prospek Perekonomian Daerah**
Muhammad Abiyyu Adikara T. – Ekonom Yunior KPwBI Provinsi Maluku



Scan QRcode untuk
mengunduh *ebook*
LPP Maluku



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI MALUKU**

Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA

Jl. Ahmad Yani Nomor 9
Ambon, 97124

Telp: 0911-352762-63 ext. 8350

Fax: 0911-356517

Homepage: www.bi.go.id